

Buha Aritonang dkk.

KOHESI LEKSIKAL

DALAM EDITORIAL SURAT KABAR NASIONAL

5



PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA

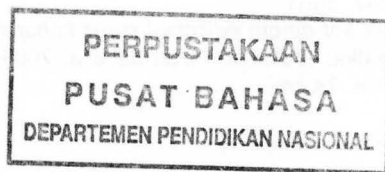


IPK Rtl

KOHESI LEKSIKAL

DALAM EDITORIAL SURAT KABAR NASIONAL

**BUHA ARITONANG
WATI KURNIAWATI
HIDAYATUL ASTAR**



HADIAH

**PUSAT BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional
2009**

Kohesi Leksikal dalam Editorial Surat Kabar Nasional

Penyelaras Bahasa: Ebah Suhaebah
Perancang Sampul: Andri Supriyadi
Penata Letak: Andri Supriyadi

Diterbitkan pertama kali pada tahun 2009 oleh
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun
Jakarta Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

499.215

ARI

k

ARITONANG, Buha

Kohesi leksikal dalam editorial surat kabar nasional/Buha

Aritonang dkk.—Jakarta: Pusat Bahasa, 2009.

vii, 172 hlm, 24 cm

ISBN 978-970-685-794-4

1. BAHASA INDONESIA-WACANA
2. BAHASA INDONESIA-KOSAKATA

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA	
<p><i>PD</i> Klasifikasi <i>499.215</i> <i>ARI</i> <i>k</i></p>	<p>No. Induk : <i>183</i></p> <p>Tgl. : <i>22-02-2010</i></p> <p>Ttd. : _____</p>

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT BAHASA

Bahasa menjadi ciri identitas suatu bangsa. Melalui bahasa orang dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat, bahkan dapat mengenali perilaku dan kepribadian masyarakat penuturnya. Oleh karena itu, masalah kebahasaan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat penuturnya. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan, terutama yang berkaitan dengan tatanan baru kehidupan dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, khususnya teknologi informasi, yang semakin sarat dengan tuntutan dan tantangan globalisasi. Kondisi itu telah menempatkan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, pada posisi strategis yang memungkinkan bahasa itu memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa dan mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Kondisi itu telah membawa perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbahasa. Gejala munculnya penggunaan bahasa asing di pertemuan-pertemuan resmi, di media elektronik, dan di media luar ruangan menunjukkan perubahan perilaku masyarakat tersebut. Sementara itu, bahasa-bahasa daerah, sejak reformasi digulirkan tahun 1998 dan otonomi daerah diberlakukan, tidak memperoleh perhatian dari masyarakat ataupun dari pemerintah, terutama sejak adanya alih kewenangan pemerintah di daerah. Penelitian bahasa dan sastra daerah yang telah dilakukan Pusat Bahasa sejak tahun 1974 tidak lagi berlanjut. Selain itu, kini Pusat Bahasa mengolah hasil penelitian yang telah dilakukan masa lalu sebagai bahan informasi

kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Selain itu, bertambahnya jumlah Balai Bahasa dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia turut memperkaya kegiatan penelitian di berbagai wilayah di Indonesia. Tenaga peneliti di unit pelaksana teknis Pusat Bahasa itu telah dan terus melakukan penelitian di wilayah kerja masing-masing di hampir setiap provinsi di Indonesia. Kegiatan penelitian itu akan memperkaya bahan informasi tentang bahasa-bahasa di Indonesia.

Berkenaan dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut, Pusat Bahasa menerbitkan hasil penelitian Drs. Buha Aritonang (ketua), Dra. Wati Kurniawati, M.Hum. (anggota), dan Drs. Hidayatul Astar, M.Hum. (anggota) yang berjudul *Kohesi Leksikal dalam Editorial Surat Kabar Nasional*. Sebagai pusat informasi tentang bahasa di Indonesia, penerbitan buku ini memiliki manfaat besar bagi upaya pengayaan sumber informasi tentang pengajaran bahasa di Indonesia. Karya penelitian ini diharapkan dapat dibaca oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang memiliki minat terhadap linguistik di Indonesia. Semoga upaya ini memberi manfaat bagi langkah pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa di Indonesia dan bagi upaya pengembangan linguistik di Indonesia ataupun masyarakat internasional.

Jakarta, Maret 2009

Dendy Sugono

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ‘Kohesi Leksikal dalam Editorial Surat Kabar Nasional’ ini merupakan lanjutan penelitian sebelumnya—dalam hal ini-- “Kohesi Gramatikal dalam Editorial Surat Kabar Nasional”. Penelitian ini merupakan salah satu kegiatan Penelitian Bidang Pengkajian Bahasa dan Sastra, Pusat Bahasa, Tahun Anggaran 2007. Penelitian ini dilaksanakan oleh Drs. Buha Aritonang (Ketua), Dra. Wati Kurniawati, M.Hum. (anggota), dan Drs. Hidayatul Astar, M.Hum. (anggota).

Penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan Dr. Hans Lapoliwa selaku konsultan. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau. Ucapan terima kasih, kami sampaikan juga kepada Kepala Pusat Bahasa, Dr. Dendy Sugono, Kepala Bidang Pengkajian, Dr. Mu’jizah, Kepala Subpengkajian Bahasa Indonesia dan Daerah, Drs. Sutiman, M.Hum., dan rekan-rekan yang membantu penelitian ini.

Materi dalam penelitian ini dapat dinyatakan belum begitu sempurna. Walaupun demikian, kami masih bersedia untuk memperbaiki penelitian ini jika ada masukan dari pembaca.

Jakarta, Desember 2007

Buha Aritonang
Ketua Tim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT BAHASA	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Masalah.....	3
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian	3
1.3 Landasan Teori.....	4
1.4 Metodologi Penelitian	5
1.4.1 Teknik Pengumpulan Data	5
1.4.2 Teknik Analisis Data	6
1.5 Sumber Data	6
1.6 Sistematika Penulisan Laporan.....	7
 BAB II IHWAL KAJIAN KOHESI LEKSIKAL DALAM WACANA	 8
2.1 Pengantar.....	8
2.2 Ihwal Kajian Kohesi Leksikal Sebelumnya.....	8
 BAB III PENGGUNAAN ALAT KOHESI LEKSIKAL DALAM	
EDITORIAL SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA.....	39
3.1 Pengantar.....	39
3.2 Kesinoniman.....	39
3.3 Keantoniman	44
3.3.1 Oposisi Mutlak	44

3.3.2 Antonim	47
3.3.3 Oposisi Kebalikan.....	53
3.3.4 Oposisi Hierarkis (Berdaur)	56
3.4 Kehiponiman	58
3.5 Kameroniman	61
3.6 Keparoniman	69
3.7 Kolokasi	72
3.8 Repetisi/Pengulangan	83
3.8.1 Repetisi (Perulangan) Seluruhnya	84
3.8.2 Repetisi (Perulangan) Sebagian.....	101
BAB IV SIMPULAN.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
Lampiran	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

1.1.1 Latar Belakang

Tradisi kajian analisis wacana di negeri Barat dimulai sejak Harris (1952) dalam Oetomo (1992:6). Harris menekankan bahwa sudah saatnya kalimat dalam sebuah teks dihubungkan dalam tataran kebahasaan yang lebih luas, baik melalui pengacuan anaforis dan kataforis, substitusi, elipsis, hubungan konjungtif, dan hubungan leksikal.

Jika dikaitkan dengan persepsi yang mendukung bahwa bahasa terdiri atas bentuk (*form*) dan makna (*meaning*), relasi antarbagian dalam sebuah wacana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hubungan kohesi (*cohesion*) dan koherensi (*coherence*) (Puryadi, 2006:175). Eksistensi kedua jenis relasi itu dapat mewujudkan sebuah wacana yang utuh atau padu. Hubungan atau relasi kohesi merupakan alat yang digunakan untuk melihat struktur lahir sebuah wacana, sedangkan koherensi adalah untuk melihat hubungan batin dalam sebuah wacana. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Halliday dan Hasan (1976:6) yang membagi kohesi menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal (*grammatical cohesion*) yang berkaitan dengan struktur lahir dan kohesi leksikal (*lexical cohesion*) yang berkaitan dengan struktur batin.

Kohesi ini tergolong aspek formal bahasa dalam organisasi sintaktik karena organisasi sintaktik ini merupakan wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat. Dengan susunan yang demikian, dihasilkan tuturan. Hal itu tentu mendukung pengertian

kohesi sebagai hubungan antarkalimat di dalam sebuah wacana. Dengan mengacu pada pemahaman itu, dengan penguasaan dan pengetahuan kohesi yang baik, seseorang akan dapat menghasilkan wacana yang baik.

Dalam kohesi, kaidah-kaidah yang digunakan adalah berdasarkan penyampaian maklumat lama dan maklumat baru. Kaidah-kaidah itu adalah kaidah perujukan, penggantian, pengguguran, konjungsi, dan kohesi leksikal, seperti yang telah dilontarkan sebelumnya. Wacana juga dicirikan oleh kesinambungan maklumat yang diartikan sebagai kesatuan makna. Kesatuan makna dalam wacana ini pula dapat dilihat dari segi makna logik dan makna tautan.

Tautan (*cohesion*) berbeda dengan keteraturan pikiran. Ini berarti bahwa kohesi ataupun tautan merupakan konsep semantik yang juga merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapat pada suatu ujaran yang membentuk wacana. Menurut Halliday dan Hasan (1976), tautan yang wujud dalam bahasa untuk menjadikan suatu teks itu berpadu. Artinya, hubungan makna sama dengan makna leksikal atau makna kalimat yang perlu diwujudkan secara terpadu dalam kesatuan yang membentuk teks.

Menurut Halliday dan Hasan (1976), kohesi berhasil apabila interpretasi terhadap sesuatu unsur yang terdapat dalam wacana terikat atau tergantung pada interpretasi unsur yang lain dalam wacana yang serupa. Satu unsur bahasa membayangkan makna unsur yang lain dalam keadaan unsur tersebut sukar dipahami dengan jelas melainkan dengan bantuan unsur sebelumnya. Oleh karena itu, hubungan kohesi berlaku di antara dua unsur, yaitu unsur yang membayangkan (*presupposing element*) dan unsur yang dibayangkan (*presupposed element*) yang kedua-duanya disatukan dalam sebuah wacana. Ditambahkan pula bahwa kohesi mengandung apa yang dinamakan sebagai konsep perkaitan (*relational concept*). Kohesi tidak hanya terjadi dengan wujud unsur bahasa tertentu yang dianggap mempunyai nilai kohesif dalam teks tanpa ada pertalian dengan unsur bahasa yang lain. Sebaliknya, kohesi merupakan perkaitan di antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kohesi terjadi apabila interpretasi terhadap suatu unsur dalam sebuah wacana memerlukan rujukan terhadap unsur atau bagian dalam wacana yang sama. Rujukan inilah yang mengaitkan bagian

wacana yang hendak diinterpretasi dengan bagian-bagian wacana yang lain.

Kohesi sangat berbeda dengan struktur informasi dalam suatu teks. Kohesi bersifat potensial untuk menghubungkan suatu elemen dengan elemen lainnya dalam suatu teks. Oleh karena itu, kohesi merupakan bagian komponen teks dalam sistem linguistik.

Kepaduan wacana (*discourse*) selain didukung oleh aspek gramatikal atau kohesi gramatikal juga didukung oleh aspek leksikal atau kohesi leksikal. Dalam wacana, kohesi merupakan aspek formal bahasa dan pemahaman wacana tentu memerlukan pengetahuan dan penguasaan kohesi yang baik. Pengetahuan dan penguasaan kohesi tidak saja bergantung pada pengetahuan kita tentang kaidah-kaidah bahasa, tetapi pengetahuan kita mengetahui realitas. Selain mempunyai bentuk dan makna dan merupakan aspek formal bahasa, kohesi tergolong juga sebagai organisasi sintaksis atau merupakan wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan. Kohesi lebih cenderung mengacu pada aspek formal bahasa. Hal itu berarti bahwa kohesi adalah hubungan antarkalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun strata leksikal tertentu. Sehubungan dengan hal itu, kajian di sini mencoba mendeskripsikan kajian kohesi leksikal dalam editorial surat kabar nasional. Alat kohesi leksikal yang akan dideskripsikan meliputi sinonimi, keantoniman, kehiponiman, meronimi dan holonimi, keparoniman, kolokasi, repetisi/pengulangan, polisemi dan homonimi.

1.1.2 Masalah

Kohesi dalam editorial surat kabar berbahasa Indonesia mengandung beberapa permasalahan yang memerlukan kajian lebih lanjut. Jadi, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

- (1) Apakah pengertian kohesi leksikal?
- (2) Bagaimanakah ihwal kajian kohesi leksikal dalam wacana yang telah dilakukan oleh para linguist selama ini?
- (3) Bagaimanakah penggunaan bentuk-bentuk kohesi leksikal dalam editorial surat kabar nasional?

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ihwal kohesi leksikal dalam berbagai jenis wacana secara umum. Akan tetapi,

tujuan khusus penelitian ini lebih fokus pada pendeskripsian penggunaan alat-alat kohesi leksikal dalam surat kabar nasional. Sementara itu, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penggunaan alat-alat kohesi leksikal dalam surat kabar nasional.

1.3 Landasan Teori

Wacana dapat diklasifikasikan berdasarkan media media, kelangsungan dan ketidaklangsungan pengungkapan, cara penuturan, dan bentuk. Berdasarkan medianya, wacana dapat diklasifikasikan atas wacana tulis dan wacana lisan. Berdasarkan langsung atau tidaknya pengungkapan, wacana dapat diklasifikasikan atas wacana langsung dan wacana tidak langsung. Berdasarkan cara menuturkannya, wacana dapat diklasifikasikan atas wacana penuturan. Berdasarkan bentuknya, wacana dapat diklasifikasikan atas wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama.

Klasifikasi lain dikemukakan Sumarlam (2003:17) adalah berdasarkan cara dan tujuan pemaparan, yang menghasilkan wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Wacana narasi adalah wacana penceritaan atau penuturan, yaitu wacana yang mementingkan urutan waktu, dituturkan oleh persona pertama atau ketiga dalam waktu tertentu. Wacana deskripsi, yaitu wacana yang bertujuan melukiskan, menggambarkan, atau memberikan sesuatu menurut apa adanya. Wacana eksposisi atau wacana pembeberan, yaitu wacana yang tidak mementingkan waktu dan pelaku, tetapi lebih mementingkan pokok pembicaraan dan bagian-bagiannya diikat secara logis. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan meyakinkan pembaca akan kebenaran ide atau gagasannya. Adapun wacana persuasi adalah wacana yang isinya bersifat ajakan atau nasihat, biasanya ringkas dan menarik, serta bertujuan untuk mempengaruhi secara kuat pada pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat atau ajakan tersebut.

Dalam kaitan dengan wacana, Halliday dan Hasan (1976) menyatakan bahwa kohesi leksikal adalah keterikatan semantis yang direalisasikan ke dalam sistem leksikal. Kohesi jenis ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) reiterasi (*reiteration*), (2) nomina umum (*general nouns*), dan (3) kolokasi (*colocation*). Reiterasi

berhubungan dengan perulangan makna leksikal yang telah disebutkan sebelumnya dan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) perulangan, (2) kesinoniman, dan (3) kata generik. Kemudian, Halliday dan Hasan (1976 dan 1989) lebih rinci mengelompokkan jenis kohesi leksikal menjadi enam, yaitu (1) perulangan, (2) kesinoniman, (3) keantoniman, (4) kehiponiman, (5) kemeroniman, dan (6) kolokasi. Oleh karena itu, kohesi dapat diartikan sebagai tautan yang mengikat teks bersama dan memberikannya arti. Dalam kaitan dengan pengertian itu, penelitian ini menggunakan kerangka teori Halliday dan Hasan dalam *Cohession in English* (1976). Selain itu, digunakan juga buku-buku acuan, seperti *Pengajaran Wacana* (Tarigan, 1987), *Dasar-dasar Analisis Wacana dalam Ilmu Bahasa* (Praptomo, 2002), dan *Teori dan Praktik Analisis Wacana* (Sumarlam, 2003).

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena penelitian ini memusatkan perhatian pada ciri-ciri atau sifat-sifat data secara alami atau secara apa adanya, yang secara empiris hidup dalam penutur-penutur bahasa sehingga hasil yang akan diperoleh merupakan pemberian bahasa yang aktual (Sudaryanto, 1982:62). Untuk menganalisis data dilakukan prosedur analisis sebagai berikut:

- (1) mengidentifikasi kohesi gramtikal dan leksikal dalam teks,
- (2) menabulasi dan mempersentase jenis kohesi dalam tiap-tiap korpus data,
- (3) menyimpulkan hasil analisis dengan merujuk persentase pemunculan bentuk kohesi dalam teks, dan
- (4) mendeskripsikan hasil analisis.

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan teknik catat dan dokumentasi pemakaian bahasa dalam media massa cetak—dalam hal ini surat kabar nasional. Kegiatan mengumpulkan data diawali dengan pemeriksaan data dari sumber data. Kegiatan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. membaca teks narasi dan argumentasi yang dijadikan sumber data dengan cermat—dalam hal ini editorial surat kabar nasional;

2. menandai kalimat dalam teks yang merupakan bentuk kohesi leksikal dengan stabilo;
3. data yang telah dikumpulkan diberi kode dan nomor urut teks beserta nomor urut paragraf.

Contoh pencatatan data yang dilakukan adalah TJ/K/12/Maret/2006 yang berarti Tajuk Rencana *Kompas*, Paragraf 12, tanggal 12 Maret 2006.

1.4.2 Teknik Analisis Data

Data editorial dari surat kabar nasional dipilih sesuai dengan pokok masalah. Setelah itu, dilakukan pencatatan dan pengklasifikasian. Dengan mengikuti langkah-langkah itu, data itu dianalisis. Untuk menganalisis data dilakukan prosedur analisis sebagai berikut:

1. mengidentifikasi kohesi gramtikal dan leksikal dalam teks;
2. menabulasi dan mempresentase jenis kohesi dalam tiap-tiap korpus data;
3. menyimpulkan hasil analisis dengan merujuk persentase pemunculan bentuk kohesi dalam teks;
4. mendeskripsikan hasil analisis.

1.5 Sumber Data

Para ahli tata bahasa pada galibnya mengkhususkan dirinya dalam analisis hubungan kata-kata dalam kalimat (*internal-sentential construction*). Contoh-contoh kalimat yang diambil seringkali didasarkan atas atau disesuaikan dengan kehendaknya, teristimewa kalimat-kalimat yang dianggap baku. Sementara itu, para analis wacana cenderung meneropong kalimat dari segi fungsinya. Artinya, kalimat-kalimat yang akan dianalisis diambil dari kehidupan sehari-hari. Konsekuensinya adalah bahwa data yang terekam mencerminkan ujaran-ujaran sehari-hari dalam situasi nyata (*psychologically real*). Oleh karena itu, kemungkinan besar bahwa data tersebut berisi juga kalimat-kalimat yang tidak baku. Jika mengacu pada pernyataan itu, penelitian ini mengambil data berupa wacana tulis yang ditulis oleh pemimpin redaksi media cetak, yaitu berupa editorial/tajuk yang terdapat dalam surat kabar nasional. Jadi, data penelitian ini bersumber dari surat kabar *Kompas*, *Tempo*, *Suara Pembaharuan*, *Suara Karya*, *Pelita*, *Media Indonesia*, *Republika* dan lain-lain terbitan tahun 2006.

1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dipilah menjadi empat bab yang dirinci sebagai berikut.

Bab I berupa pendahuluan yang mencakup (1) latar belakang, (2) masalah, (3) tujuan dan ruang lingkup penelitian, (4) landasan teori, (5) metodologi penelitian yang mencakup pengumpulan data dan teknis analisis data, (6) sumber data, dan (7) sistematika penulisan. Bab II berupa ihwal kajian dan instrumen kohesi gramatikal dalam editorial surat kabar berbahasa Indonesia yang meliputi (1) pengantar dan (ii) ihwal kajian kohesi leksikal sebelumnya. Bab III mencakup penggunaan alat kohesi leksikal dalam editorial surat kabar berbahasa Indonesia, yaitu (i) kesinoniman, (ii) keantoniman, (iii) kehiponiman, (iv) kemeroniman, (v) paronimi, (vi) kolokasi, dan (vi) repetisi/pengulangan. Bab IV adalah Simpulan.

BAB II

IHWAL KAJIAN KOHESI LEKSIKAL DALAM WACANA

2.1 Pengantar

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa kajian kohesi leksikal dalam wacana sudah banyak dilakukan oleh para linguist. Akan tetapi, salah satu buku yang khusus memuat kajian kohesi leksikal dalam berbagai jenis wacana adalah *Analisis Wacana Iklan, Lagu, Puisi, Cerpen, Novel, dan Drama Penanda* (Sumarlam, dkk., 2004). Dalam buku ini terdapat kajian kohesi leksikal dalam berbagai jenis wacana, seperti (i) wacana iklan, (ii) wacana lirik lagu, dan (iii) wacana karya sastra. Sehubungan dengan itu, pada 2.2 akan diinformasikan tentang alat-alat kohesi leksikal dan contoh bahasan yang berhasil diungkapkan oleh para linguist dalam ketiga jenis wacana tersebut.

2.2 Ihwal Kajian Kohesi Leksikal Sebelumnya

Dalam *Analisis Wacana Iklan, Lagu, Puisi, Cerpen, Novel, dan Drama Penanda* (Sumarlam, dkk., 2004), para linguist mencoba mengungkapkan berbagai jenis wacana dalam kaitan pembahasan kohesi leksikal. Untuk mengungkapkan hal itu, mereka tetap berpedoman pada temuan data kohesi leksikal dalam setiap jenis wacana. Dari tiga jenis wacana—dalam hal ini—wacana iklan, wacana lirik lagu, dan wacana karya didapatkan alat kohesi leksikal, seperti (i) repetisi (perulangan) yang berupa mesodiplosis (pengulangan satuan lingual di tengah-tengah baris atau kalimat secara berturut-turut, (ii) sinonimi (padanan kata), (iii) kolokasi (sanding kata), dan majas.

Kusrianti dalam Sumarlam, dkk. (2004:9–10) yang menerapkan analisis wacana terhadap iklan kosmetika produk perawatan dewasa *Pigeon Two Way Cake* menemukan tiga alat kohesi leksikal, yaitu (i) repetisi (perulangan) yang berupa mesodiplosis (pengulangan satuan lingual di tengah-tengah baris atau kalimat secara berturut-turut, (ii) sinonimi (padanan kata), dan (iii) kolokasi (sanding kata).

Konstituen *kulit* pada (1–3) digolongkan sebagai repetisi epizeuksis, yaitu pengulangan satuan lingual (kata) yang dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut karena konstituen *kulit* diulang tiga kali untuk menekankan pentingnya kata *kulit* dalam konteks kalimat tersebut.

- (1) AMAN. Untuk segala jenis kulit.
- (2) TABIR SURYA. Melindungi kulit dari sinar matahari.
- (3) PELEMBAB ALAMI. Agar kulit tidak kering.

Sinonimi morfem (bebas) *aku* dengan morfem (terikat) *-ku*, seperti dalam konstruksi *Kenapa sih dia liatin aku terus? Mungkin karena wajahku yang halus, lembut, dan cantik berseri* pada (4).

- (4) *Kenapa sih dia liatin aku terus? Mungkin karena wajahku yang halus, lembut, dan cantik berseri!*

Bentuk *wajahku yang halus, lembut, dan cantik berseri* dan bentuk *Pigeon Two Way Cake, aman, tabir surya, pelembab alami, tekstur lembut, dan praktis* pada (5) menunjukkan kolokasi yang mendukung kepaduan wacana iklan *Pigeon Two Way Cake* tersebut.

- (5) *Karena apapun kesempatannya selalu kugunakan cara praktis Pigeon Two Way Cake. AMAN, untuk segala jenis kulit. TABIR SURYA, melindungi kulit dari sinar matahari. PELEMBAB ALAMI, agar kulit tidak kering. TEKSTUR LEMBUT, mudah menempel, tahan lama. PRAKTIS, untuk segala aktivitas.*

Siminto dalam Sumarlam, dkk. (2004:28–30) menganalisis iklan televisi *Royco Rasa Terasi* dari aspek leksikal yang meliputi (i) kata-kata tidak baku, (ii) repetisi, (iii) sinonimi, dan (iv) kolokasi.

Konstituen *nggak*, *sempet*, dan *kayak* pada (1–3) diidentifikasi sebagai kata-kata yang tidak baku; konstituen *kangen* dan *ya* diidentifikasi sebagai perulangan, seperti pada (4); konstituen *mudik* dengan *pulang* pada (5) diidentifikasi sebagai sinonim berupa kata; dan konstituen *Setahun nggak mudik*, *ya*; *Kangen nih...*; dan *Pulaaang* pada (6) berkolokasi dengan masyarakat urban yang meninggalkan kampung halaman dan memiliki tradisi mudik pada hari raya Idul Fitri.

- (1) a. *setahun nggak mudik, ya?*
b. *setahun tidak mudik, ya?*
- (2) a. *Nggak sempet, Bu.*
b. *Tidak sempet, Bu.*
- (3) a. *Kayak di kampung, ya?*
b. *Seperti di kampung, ya?*
- (4) I : *Setahun nggak mudik, ya?*
S : *Hmm...*
I : *Kangen nih...*
S : *Nggak sempet, Bu.*
I : *Heh, eh!*
S : *Mmm... Jadi ingat tumis kangkung terasinya Ibu.*
I : *Iya. Jadi?*
S : *Ya, nggak usah mudik. Kan, udah diobati kangennya.*
Kayak di kampung, ya?
I : *Iya. Jadi?*
S : *Ya, nggak usah mudik. Kan, udah diobati kangennya*
I : *(menghela napas)*
- (5) I : *Iya. Jadi?*
S : *Ya, nggak usah mudik. Kan, udah diobati kangennya*
I : *(menghela napas)*
S : *Pulaaang...*
- (6) I : *Setahun nggak mudik, ya?*
S : *Hmm...*

- I : *Kangen nih...*
 S : *Mmm... Jadi ingat tumis kangkung terasinya Ibu.*
 S : *Pulaaang...*
 I : *Ah, Bapak...*

Adhani dalam Sumarlam, dkk.(2004:9–10) menganalisis “Yogyakarta” dari aspek leksikal yang meliputi (i) repetisi (perulangan), (ii) sinonimi (padan kata), dan (iii) kolokasi (sanding kata).

Repetisi dalam “Tak Bisa ke Lain Hati” menurut Adhani dapat berupa (i) repetisi epanalepsis, yaitu pengulangan yang berwujud kata terakhir dari suatu baris merupakan pengulangan dari kata pertama baris tersebut (lihat 1) dan (ii) repetisi anadiplosis, yaitu repetisi berupa pengulangan kata terakhir pada suatu baris menjadi kata pertama baris berikutnya (lihat 2).

- (1) *Terwujud keinginan yang tak pernah terwujud*
 (2) *Aku tak bisa pindah*
Pindah ke lain hati.

Selain kedua jenis repetisi tersebut, bentuk repetisi berupa perulangan bait yang disebut refren diidentifikasi juga, seperti pada (3). Hal itu tampak pada perulangan bait kedua dan baris pertama, kedua, dan ketiga bait kelima, dan baris kedua dan ketiga tersebut juga merupakan perulangan penuh dari baris pertama. Bait atau baris yang diulang itu sebagai berikut.

- (3) *Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi*
Tercipta nelangsa merenggut sukma
Terwujud keinginan yang tak pernah terwujud
Aku tak bisa pindah
Pindah ke lain hati.
Sungguh kuakui. Tak bisa ke lain hati
Sungguh kuakui. Tak bisa ke lain hati
Sungguh kuakui. Tak bisa ke lain hati

Adhani mengidentifikasi kolokasi (sanding kata), seperti pada (4–8). Diperjelas bahwa kesepian, kesendirian, kesenduan, dan kesedihan akibat ditinggal sang kekasih yang masih tetap dicintainya

dalam wacana lagu "Tak Bisa ke Lain Hati" terangkum dalam kata-kata *kuayun sendiri, langkah-langkah sepi, hampa, nelangsa, lelah, dan sendiri*.

- (4) *Kuayun sendiri langkah-langkah sepi.*
 - (5) *Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi.*
 - (6) *Tercipta nelangsa merenggut sukma.*
 - (7) Begitu lelah sudah kuharus menepi.
 - (8) *Menghapus, mengenangmu, menggapai paras wajahmu.*
- Sendiri**

Dalam "Analisis Wacana Lagu Countri You Were Mine karya Martie and Emily dari Kelompok Musik Country Dixie Chicks" ditemukan juga aspek kajian kohesi leksikal yang mendukung kepaduan wacana secara semantik, yaitu meliputi (i) repetisi (repetisi anafora, repetisi epistrofa, dan repetisi penuh), (ii) sinonimi, dan (iii) kolokasi (Kusrianti dalam Sumarlam, dkk., 2004:77–79).

Kustianto mengidentifikasi tiga jenis repetisi dalam wacana syair lagu "You were Mine", yaitu repetisi anafora, repetisi epistrofa, dan repetisi penuh.

Repetisi anafora 'pengulangan satuan lingual berupa kata atau frasa awal pada tiap baris atau kalimat berikutnya' dicontohkan seperti pada (1). Frasa pada awal baris ke-1 diulang pada frasa awal baris 4, seperti pada tuturan (1) dan (2).

- (1) *I can't find a reason to let go.*
'Saya tidak bisa menemukan alasan membiarkan(mu) pergi'
- (2) *I can't find a reason to hang on.*
'Saya tidak bisa menemukan alasan untuk berdiam diri'

Tujuan dari pengulangan frasa tersebut adalah untuk menekankan bahwa sang istri (penutur) benar-benar heran dan tidak menemukan alasan untuk berdiam diri dan membiarkan suaminya pergi. Demikian halnya pada tuturan (4) dan (5), ada pengulangan unsur *sometimes* 'kadang-kadang aku'. Ini berfungsi untuk menekankan bahwa dia (penutur) terkadang menangis dan berteriak.

- (4) *Sometimes I wake up crying at night.*
'Terkadang aku bangun dan menangis di malam hari'

- (5) *And sometimes I scream out your name.*

'Dan terkadang aku meneriakkan namamu'

Repetisi epistrofa 'repetisi kata atau frasa atau klausa pada akhir baris atau kalimat. Klausa *you were mine* '(ketika) kamu jadi milikku' pada baris (6) diulang pada baris (7), seperti diperlihatkan pada tuturan (6) dan (7) berikut ini.

- (6) *When for so long, you were mine.*

'Ketika begitu lama kamu jadi milikku'

- (7) *I remember when you were mine.*

'Aku teringat saat kamu jadi milikku'

Repetisi penuh dalam syair lagu yang berjudul "You were Mine", pada (8–11) berfungsi sebagai refren atau *chorus* 'bagian yang diulang', seperti berikut berikut ini.

- (8) *Sometimes I wake up crying at night.*

'Terkadang aku bangun menangis di malam hari.'

- (9) *And sometimes I scream out your name.*

'Dan terkadang aku meneriakkan namamu.'

- (10) *What right does she have to take you away*

'Apa haknya dia harus mengambilmu.'

- (11) *When for so long, you were mine.*

'Ketika begitu lama kau jadi milikku.'

Bagian ini diulang sebanyak tiga kali dalam penuturannya. Pengulangan itu diartikan bahwa makna yang terkandung pada baris-baris tersebut dipentingkan di antara baris-baris yang lain.

Sinonimi yang diidentifikasi terlihat pada (12) dan (13) karena pada tuturan (12) baris 11 frasa *our wedding day* 'hari pernikahan kita' bersinonim dengan frasa *a time of love and laughter* 'saat cinta dan gelak tawa' pada tuturan (13).

- (12) *I took out all the pictures of our wedding day.*

'Kukeluarkan semua gambar pada hari pernikahan kita.'

- (13) *It was a time of love and laughter.*

'Itulah saat cinta dan gelak tawa.'

Beberapa kolokasi yang berhubungan dengan syair lagu "You were Mine" meliputi kata atau frasa seperti *love*, *wedding day*, dan *laughter* yang tergolong sebagai kata-kata yang berkolokasi dengan suasana kegembiraan yang diceritakan dalam sebagian syair tersebut. Frasa *living alone*, kata *crying* dan *scream out* berkolokasi dengan kondisi kesedihan yang menjadi topik utama syair lagu "You were Mine".

Kepaduan wacana lirik lagu pun harus didukung oleh kohesi leksikal (Sumarlam dalam Sumarlam, dkk., 2004:93–98). Kohesi leksikal yang dianalisis Sumarlam mencakup (i) repetisi/pengulangan –dalam hal ini–pengulangan kata sapaan, pengulangan klausa, pengulangan jumlah suku kata, (ii) sinonimi (padan kata), (iii) kolokasi (sanding kata), dan (iv) hiponimi (hubungan atas-bawah).

Hasil deskripsi Sumarlam memperlihatkan bahwa repetisi yang terdapat dalam dalam lagu "*Yen ing Tawang Ana Lintang*" terdapat tiga jenis repetisi (pengulangan) yang menonjol, yaitu pengulangan kata sapaan, pengulangan satu klausa secara utuh, dan pengulangan jumlah suku kata yang sarna.

Pengulangan kata sapaan dalam Lirik lagu "*Yen ing Tawang Ana Lintang*" terdapat dua kata sapaan khas yang digunakan untuk menyapa seorang wanita, yaitu sapaan *cah ayu* 'anak cantik' dan *nimas* 'sayang'. Setiap kata sapaan tersebut digunakan tiga kali dalam lirik lagu tersebut, yakni pada (1–3) untuk kata *cah ayu* 'anak cantik' dan pada (4–7) untuk kata *nimas* 'sayang', seperti berikut ini.

- (1) *Yen ing tawang ana lintang, cah ayu*
'Jika di angkasa ada bintang, anak cantik'
- (2) *Janji-janji aku eling, cah ayu*
'Ketika aku ingat, anak cantik'
- (3) *Yen ing tawang ana lintang, cah ayu*
'Jika di angkasa ada bintang, anak cantik'
- (4) *Marang mega ing akasa, nimas*
'Kepada mega di angkasa, sayang'
- (5) *Lintang-lintang ngiwi-iwi, nimas*
'Bintang-bintang menggoda, sayang'
- (6) *Binarung swaraning ratri, nimas*
'Bersama suara malam, sayang'

Dari 14 baris lirik lagu "Yen ing Tawang Ana Lintang" diidentifikasi satu klausa yang diulang secara utuh. Pengulangan itu terjadi pada baris pertama yang diulang kembali secara utuh pada baris kesebelas. Agar lebih jelas bahwa baris yang diulang itu sebuah klausa maka kutipan berikut ini juga menyertakan dua baris lagi, baris ke-2 pada (8) dan ke-12 pada (10), yang masing-masing mengikuti baris ke-1 pada (7) dan ke-11 pada (9).

- (7) *Yen ing tawang ana lintang, cah ayu* (1)
'Jika di angkasa ada bintang, anak cantik'
- (8) *Aku nggenteni tekamu* (2)
'Aku menunggu kedatanganmu'
- (9) *Yen ing tawang ana lintang, cah ayu* (11)
'Jika di angkasa ada bintang, anak cantik'
- (10) *Rungokna tangising ati* (12)
'Dengarkanlah tangisan hati'

Seperti pada (7) bahwa klausa *Yen ing tawang ana lintang, cah ayu* 'Jika di angkasa ada bintang, anak cantik' pada baris pertama diulang kembali secara utuh pada (9), atau pada baris kesebelas. Pengulangan tersebut memberikan penekanan bahwa 'jika di angkasa terdapat bintang' ia (pencipta lagu) selalu menunggu kehadiran 'anak cantik', dan dalam kondisi seperti itu ia memohon agar didengarkan tangisan hatinya.

Pengulangan jumlah suku kata dalam lagu "*Yen ing Tawang Ana Lintang*" mencakup pengulangan lirik-lirik dalam jumlah suku kata yang sama, yaitu sebelas suku kata pada baris ke-1 pada (11), 5 pada (15), dan 11 pada (19); sepuluh suku kata pada baris ke-3 pada (13), 7 pada (17), dan 13 pada (21); serta delapan suku kata secara konsisten pada setiap baris genap, yakni baris ke-2 pada (12), 4 pada (14), 6 pada (16), 8 pada (18), 12 pada (20), dan 14 pada (22). Apabila kata-kata sapaan pada lagu itu (untuk sementara) dilesapkan, hampir semua baris pada lirik lagu itu masing-masing berjumlah delapan suku kata.

- (11) *Yen ing tawang ana lintang* (1)
- (12) *aku nggenteni tekamu* (2)
- (13) *marang mega ing akasa* (3)

- (14) *sun takokke pawartamu* (4)
- (15) *janji-janji aku eling* (5)
- (16) *sumedhot rasaning ati* (6)
- (17) *Lintang-lintang ngiwi-iwi* (7)
- (18) *tresnaku sundhul wiyati* (8)
- (19) *Yen ing tawang ana lintang* (11)
- (20) *rungokna tangising ati* (12)
- (21) *binarung swaraning ratri* (13)
- (22) *ngenteni mbulan ndadari* (14)

Di dalam lirik lagu "*Yen ing Tawang Ana Lintang*" sinonimi yang diidentifikasi mencakup sinonimi antara morfem bebas dan morfem terikat serta sinonimi antarkata, seperti pada (23–27) berikut.

- (23) *Aku ngenteni tekamu* (2)
'Aku menunggu kedatanganmu'
- (24) *Tresnaku sundhul wiyati* (8)
'Cintaku menyentuh langit'
- (25) *Yen ing tawang ana lintang, cah ayu* (1)
'Jika di angkasa ada bintang, anak cantik'
- (26) *Marang mega ing akasa, nimas* (3)
'Kepada mega di angkasa, sayang'
- (27) *Mega kartika kairing rasa tresna asih* (10)
'Mega bintang diiringi rasa cinta kasih'

Pada (23) dan (24) diidentifikasi sinonimi antara morfem bebas *aku* 'aku, saya' dengan morfem terikat *-ku* 'ku'. Sebagai morfem bebas, *aku* 'aku' dapat berdiri sendiri sedangkan morfem terikat *-ku* 'ku' harus menempel atau melekat pada bentuk lain, tetapi kedua morfem tersebut bersinonim dan mengacu pada maujud yang sama, yaitu pencipta lagu itu. Sementara itu, diidentifikasi pula sinonimi antarkata, yaitu antara kata *tawang* 'angkasa' (25) dengan kata *akasa* 'angkasa' (26); demikian juga antara kata *lintang* 'bintang' (25) dengan kata *kartika* 'bintang' (27). Pemanfaatan kata-kata yang bersinonim dalam lagu itu dapat berfungsi untuk menjalin hubungan makna yang sepadan antara kata yang satu dengan kata lainnya, dan dengan demikian juga mendukung kepaduan wacana.

Kata-kata yang saling berkolokasi dan mendukung kepaduan wacana lagu "*Yen ing Tawang Ana Lintang*" tersebut ialah kata *eling*

'ingat', *sumedhot* 'sedih (karena seperti disedhot/ditarik)', *ngiwi-iwi* 'menggoda', *tresna* 'cinta', *asih* 'kasih, sayang', *janji* 'berjanji', dan *tangising ati* 'tangisan/jeritan hati', di samping kata-kata sapaan yang digunakannya, yaitu *cah ayu* 'anak cantik' dan *nimas* 'sayang'. Beberapa baris lagu yang di dalamnya terdapat kata-kata yang berkolokasi itu diperlihatkan pada contoh berikut.

- (28) *janji-janji aku eling, cah ayu* (5)
'setiap aku ingat, anak cantik'
- (29) *sumedhot rasaning ati* (6)
'sedih rasa di hati'
- (30) *lintang-lintang ngiwi-iwi, nimas* (7)
'bintang-bintang menggoda, sayang'
- (31) *mega kartika kairing rasa tresna asih* (10)
'mega bintang diiringi rasa cinta kasih'
- (32) *rungokna tangising ati* (12)
'dengarkanlah tangisan hati'

Hiponimi dalam lagu "*Yen ing Tawang Ana Lintang*" karya Andjar Any, dicontohkan pada kata sapaan kepada perempuan sebagai hipernim yang meliputi *cah ayu* 'anak cantik' dan *nimas* 'sayang' sebagai hiponimnya. Kata *lintang* 'bintang', *kartika* 'bintang', dan *mbulan* 'bulan' sebagai anggota hiponim, berada di bawah cakupan "planet ruang angkasa" sebagai hipernimnya. Selain itu, kata *tawang* 'angkasa', *mega* 'mega, angin', *akasa* 'angkasa', dan *wiyati* 'langit' juga merupakan hiponim yang dapat ditemukan pada lirik lagu tersebut. Pemanfaatan kata-kata yang berhiponim dalam lirik lagu pun dapat mendukung kepaduan sebuah wacana.

Analisis koheisi leksikal terhadap langgam keroncong "Bengawan Solo" yang dianalisis oleh Ambarsari dalam Sumarlam, dkk. (2004:120–121) mencakup (i) repetisi (pengulangan), (ii) antonimi (lawan kata), dan (iv) hiponimi (hubungan atas-bawah)

Dalam wacana lirik langgam keroncong "Bengawan Solo", temuan bentuk repetisi (pengulangan) tampak menonjol, berupa referen atau perulangan bait, yaitu bait ketiga dan keempat yang diulang penuh pada bait kelima dan keenam, seperti pada (1) berikut ini.

- (1) *Mata airmu dari Solo*
Terkurung gunung seribu
Air mengalir sampai jauh
Akhirnya ke laut
Itu perahu
Riwayatnya dulu
Kaum pedagang s'lalu
Naik itu perahu

Selain pengulangan, penuh berupa refren, dalam data (1) juga ditemukan repetisi epizeusis, yaitu pengulangan kata *air* dan *perahu* karena kata tersebut merupakan unsur yang dipentingkan dalam hubungannya dengan bengawan, sungai besar.

Aspek leksikal yang berupa antonimi antara kata *kemarau* dan *hujan*. Kepaduannya tergambarkan dengan peristiwa bila *musim kemarau airmu ta' b'rapa*, sedangkan bila *di musim hujan air meluap sampai jauh akhirnya ke laut*, seperti pada (2) dan (3) berikut.

- (2) *Musim kemarau*
Ta' b'rapa airmu
(3) *Di musim hujan*
Air meluap sampai jauh

Pada wacana "Bengawan Solo" Ambarsari menemukan tiga bentuk hiponimi (hubungan atas bawah), yaitu (1) *alam* sebagai hipemim dengan *bengawan*, *air*, *gunung seribu*, dan *laut* sebagai kohiponim, (2) *Bengawan Solo* sebagai hipemim yang memiliki kohiponim *air*, *mata air*, dan *perahu*, dan (3) hipernim gerak atau banyaknya air dengan kohiponim berupa *ta' b'rapa airmu*, *air meluap*, dan *air mengalir*.

Terhadap syair lagu kontroversial "Mendem Wedokan" ciptaan Dr. Ganang Trikora W, S.H., Poniman dalam Sumarlam, dkk., 2004:141–145) menerapkan kajian kohesi leksikal berupa (i) repetisi, (ii) sinonimi, (iii) antonimi, (iv) kolokasi (sanding kata), dan (v) ekuivalensi (hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan lainnya dalam sebuah paradigma).

Repetisi yang terdapat pada syair lagu "*Mendem Wedokan*" dikelompokkan menjadi repetisi anafora (lihat 1–10) dan epizeuksis (lihat 11).

- (1) *Simbok-simbok wetengku luwe*
'Ibu-ibu perutku lapar'
- (2) *Simbok-simbok aku wis gedhe*
'Ibu-ibu saya sudah besar'
- (3) *Thole-thole ketane abang*
'Nak-nak nasi ketannya merah'
- (4) *Thole-thole rabine gampang*
'Nak-nak menikah itu mudah'
- (5) *Ana ketan aku tukokna*
'Ada nasi ketan tolong saya dibelikan'
- (6) *Ana prawan coba takokna*
'Ada gadis coba ditanyakan'
- (7) *Adhuh simbok penting kawinan*
'Adhuh ibu pokoknya menikah'
- (8) *Adhuh simbok ra_bisa turu*
'Adhuh ibu saya tidak bisa tidur'
- (9) *Yen mung nururi mendemmu*
'Kalau hanya menuruti mabukmu'
- (10) *Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe*
Kalau begitu bu biarkan saya bekerja'

Pada tuturan (1) dan (2) kata *simbok* 'ibu' diulang masing-masing dua kali. Hal serupa juga terjadi terhadap kata *thole* 'anak' pada tuturan (3) dan (4). Repetisi anafora selanjutnya terdapat pada tuturan (5) dan (6), yakni pengulangan kata *ana* 'ada', (7) dan (8) pengulangan kata *adhuh* 'aduh', serta (9) dan (10) pengulangan kata *yen* 'kalau'. Sementara itu, contoh repetisi epizeuksis, yang merupakan pengulangan satuan lingual berupa kata yang dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut (lihat 11) karena kata *pengin* 'ingin' diulang sampai tiga kali berturut-turut.

- (11) *Awan bengi pengin, pengin, pengin ketemu* (III/12)
'Siang-malam saya ingin selalu bertemu'

Sinonimi yang diidentifikasi dalam syair lagu "*Mendem Wedokan*" meliputi sinonimi kata dengan kata (lihat 12–16) dan klausa dengan klausa (lihat 17–20).

- (12) *Ana prawan coba takokna*
'Ada gadis coba ditanyakan'
- (13) *Aku iki mbok wis mendem wedokan*
'Saya ini bu sudah tergila-gila terhadap perempuan'
- (14) *Adhuh simbok penting kawinan*
'Adhuh ibu pokoknya menikah'
- (15) *Ora gampang wong jejodhoan*
'Tidak mudah orang berumah tangga'
- (16) *Golek dhuwit kanggo nikahan*
'Mencari uang untuk biaya menikah'
- (17) *Paling penting golek gaweyan*
'Paling penting mencari pekerjaan'
- (18) *Kudu bisa golek sandhang pangan*
'Harus bisa mencari penghidupan'
- (19) *Yew mengkono mbok aku tak nyambut gawe*
'Kalau begitu bu biarkan saya bekerja'
- (20) *Golek dhuwit kanggo nikahan*
'Mencari uang untuk biaya menikah'

Pada (12) dan (13) kata *prawan* 'gadis' bersinonim dengan *wedokan* 'perempuan'. Kata *prawan* sebenarnya merujuk pada 'perempuan yang belum menikah' dan kata *wedokan* pada 'perempuan pada umumnya'. Bahkan, di daerah tertentu kata kedua ini bermakna negatif, yakni, 'perempuan murahan'. Pada konteks ini keduanya bersinonim karena sama-sama menunjukkan jenis kelamin wanita dan dalam pernikahan memang menjadi pasangan laki-laki. Pada (14) dan (15) kata *kawinan*. 'kawin' bersinonim dengan *jejodhoan* 'berumah tangga' dan *nikahan* 'menikah'. Kata *kawinan* merupakan istilah umum (baik untuk manusia, binatang maupun tumbuhan) yang bermakna percampuran (fisik) antara pria-wanita atau jantan-betina. Kata *jejodhohan* (khusus pada manusia) berarti ikatan pria-wanita yang mengutamakan kecocokan (*jodho* = cocok, serasi). Kata *nikahan* merupakan istilah resmi yang dipakai untuk "pelegalan" hubungan antara pria-wanita yang berumah tangga.

Dalam konteks syair lagu ini ketiga kata tersebut berarti 'berumah tangga', yaitu menjalin ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama.

Sementara itu sinonimi antara klausa dengan klausa dapat disimak pada tuturan di bawah ini. Ungkapan *golek gaweyan* 'mencari pekerjaan' dan *golek sandhang pangan* 'mencari penghidupan' pada tuturan (16) dan (17) mengandung makna yang sama, yakni 'mempersiapkan diri secara material agar dapat mencukupi kebutuhan hidup'. Sementara itu, ungkapan *nyambut gawe* 'bekerja' dan *golek dhuwit* 'mencari uang' pada tuturan (19) dan (20) pada dasarnya sama dengan kedua ungkapan sebelumnya. Namun, maknanya lebih konkret yaitu 'bekerja' yang otomatis akan mendapatkan uang sehingga kebutuhan hidup dapat tercukupi.

Antonimi yang diidentifikasi dalam syair lagu "Mendem Wedokan" adalah antonimi majemuk antara *awan* >< *bengi*, seperti pada kalimat (21) dan antonimi hubungan antara *thole* >< *mboke* digambarkan pada kutipan (22) berikut ini.

(21) *Awan bengi pengin, pengin, pengin ketemu*

'Siang-malam saya selalu ingin bertemu'

(22) *Ya thole dongane mboke*

'Ya nak ibu hanya berdoa'

Ungkapan *awan bengi* 'siang malam' pada tuturan (21) disebut antonimi majemuk karena merupakan rangkaian perputaran waktu yang selalu silih berganti. Pada konteks lagu "Mendem Wedokan" ungkapan itu menunjukkan kontinuitas, yakni siang, sore, malam, pagi sampai siang lagi, dan seterusnya. Sementara itu, kata *thole* 'anak' dan *mboke* 'ibu (nya)' pada tuturan (22) merupakan contoh oposisi hubungan karena keduanya saling melengkapi dan keberadaan yang satu (ibu) menyebabkan (memungkinkan) keberadaan yang lain (anak).

Kata *mbok* 'ibu', *simkok* 'ibu', *mboke* 'ibu', *thole* 'nak', *wetengku luwe* 'perutku lapar', *ketan* 'nasi ketan', *ketane* 'nasi ketannya', *klapa parutan* 'parutan kelapa', dan *mbokpakani watu* 'kau beri makan batu' merupakan kolokasi yang terdapat dalam syair lagu "Mendem Wedokan". Bentuk-bentuk kolokasi tersebut digunakan untuk mencerminkan *setting* masyarakat pinggiran

(pedesaan) yang marjinal status ekonominya. Untuk menggambarkan tema pernikahan dimunculkan kata-kata *prawan* 'gadis', *rabine* 'menikahnya', *kawinan* 'menikah', *wedokan* 'perempuan', *jejodhoan* 'berumah tangga', *rabi* 'menikah', *bojo* 'istri/suami' dan *nikahan* 'menikah'. Kata-kata *gaweyan* 'pekerjaan', *sandang pangan* 'penghidupan', *dhuwit* 'uang' dan *nyambut gawe* 'bekerja' digunakan untuk mendukung tema sesuatu yang diperlukan seseorang dalam berumah tangga. Sementara itu, ilustrasi mengenai orang yang sedang jatuh cinta dilukiskan dengan kata-kata *wis gedhe* 'sudah besar', *mendem* 'tergila-gila/mabuk', *ra bisa turu* 'tidak bisa tidur' dan *pingin ketemu* 'ingin bertemu'.

Dalam syair lagu "Mendem Wedokan", keberadaan kata-kata yang berasal dari kata dasar yang sama, seperti *ketan* 'nasi ketan', *ketane* 'nasi ketannya' dari dasar *ketan* 'nasi ketan'; *rabine* 'menikahnya', *rabi* 'menikah' dari dasar *rabi* 'menikah'; *mendem* 'tergila-gila/mabuk', *mendemu* 'kenekatanmu' dari dasar *mendem* 'tergila-gila/mabuk'; *bojo* 'istri/suami', *bebojoan* 'berumah tangga' dari dasar *bojo* 'istri/suami', *gaweyan* 'pekerjaan', (*nyambut*) *gawe* 'bekerja' dari dasar *gawe* 'kerja' merupakan kohesi leksikal berupa ekuivalensi 'hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan lainnya dalam sebuah paradigma' dalam syair lagu "Mendem Wedokan".

Kajian kohesi leksikal terhadap lirik lagu "Stasiun Balapan" dan "Tirtonadi" yang dilakukan Wijono dalam Sumarlam, dkk. (2004:160–163) mencakup (i) repetisi (perulangan) yang mencakup repetisi epizeuksis (pengulangan kata yang dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut), repetisi epistrofa (pengulangan satuan lingual kata atau frasa pada akhir baris (dalam puisi) atau akhir kalimat (dalam prosa) secara berturut-turut), dan repetisi utuh (pengulangan satuan lingual yang berupa kalimat), (ii) sinonimi (padan kata), dan (iii) ekuivalensi (kesepadanan).

Dalam lagu "Stasiun Balapan", repetisi epizeuksis terdapat pada (1–4). Repetisi konstituen *kowe* 'kamu' mengacu pada mitra tutur (kekasih Didi Kempot) atau orang yang meninggalkan kekasihnya dan *aku* mengacu pada penutur (Didi Kempot) atau orang yang ditinggalkan kekasihnya.

- (1) **Kowe karo aku**
'Kamu dengan saya'

- (2) *Nalika ngeterke lungamu*
'Ketika mengantarkan kepergianmu'
- (3) *Kowe ninggal aku*
'Kamu meninggalkan saya'
- (4) *Ra krasa netes eluh neng pipiku*
'Tak terasa menetes air mata di pipiku'

Repetisi epistrofa dalam lirik lagu "Stasiun Balapan" ditunjukkan konstituen *lunga mung sedhela* 'pergi hanya sebentar' pada (5) dan (6) berikut.

- (5) *Janji lunga mung sedhela*
'Janji pergi hanya sebentar'
- (6) *Jare lunga mung sedhela*
'Katanya pergi hanya sebentar'

Konstruksi *Ing Stasiun Balapan* 'Di Stasiun Balapan' *Kutha Sala sing dadi kenangan* 'Kota Sala yang jadi kenangan' pada (7–10) merupakan repetisi utuh berupa kalimat.

- (7) *Ing Stasiun Balapan*
'Di Stasiun Balapan'
- (8) *Kutha Sala sing dadi kenangan*
'Kota Sala yang jadi kenangan'
- (9) *Ing Stasiun Balapan*
'Di Stasiun Balapan'
- (10) *Kutha Sala sing dadi kenangan*
'Kota Sala yang jadi kenangan'

Sinonimi yang terdapat dalam lagu "Stasiun Balapan" meliputi morfem bebas *kowe* 'kamu' pada (11) bersinonim dengan morfem terikat lekat kanan *-mu* pada (12) dan *aku* 'saya' pada (13) bersinonimi dengan morfem terikat pipi-ku pada (14).

- (11) *Kowe karo aku*
'Kamu dengan saya'
- (12) *Nalika ngeterke lungamu*
'Ketika mengantarkan kepergianmu'

- (13) *Kowe ninggal aku*
'Kamu meninggalkan saya'
- (14) *Ra krasa netes eluh neng pipiku*
'Tak terasa menetes air mata di pipiku'

Konstituen *jarene* 'katanya' yang dicontohkan pada (15) dan *jare* 'katanya' pada (16) yang berasal dari kata dasar *jare* dan *lali* 'lupa' dan *nglali* 'melupakan' pada (17) yang berasal dari kata dasar *lali* merupakan temuan ekuivalensi dalam lirik lagu "Stasiun Balapan". Konstituen kata *jarene* pada (15) mempunyai arti yang sama dengan kata *jare* pada (16), yakni katanya. Kedua kata tersebut selain artinya sama dan juga tidak mempengaruhi konteks.

- (15) *Jarene sewulan ra ana*
'Katanya sebulan tidak ada'
- (16) *Jare lunpa mung sedhela*
'Katanya pergi hanya sebentar'
- (17) *Lali apa pancen nglali*
'Lupa apa sengaja melupakan'

Hasil kajian kohesi leksikal dalam lirik lagu "Kocok-kocok" dan "Goyang Inul" yang dilakukan Mulyani dalam Sumarlam, dkk. (2004:188–190) mencakup (i) repetisi epizeuksis, (ii) sinonimi (sinonimi morfem bebas dengan morfem terikat dan sinonimi frasa dengan frasa), dan (iii) antonimi.

Konstituen *kocok* yang diulang beberapa kali secara berturut-turut untuk menekankan pentingnya kata tersebut dalam konteks tuturan ditetapkan sebagai repetisi epizeuksis, yaitu pengulangan satuan lingual (sebuah kata) yang dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut.

- (18) *di kocok-kocok*
- (19) *di kocok-kocok*
- (20) *di kocok-kocok*
- (21) *di kocok-kocok*
- (22) *di kocok-kocok*
- (23) *di kocok-kocok*
- (24) *di kocok-kocok*
- (25) *di kocok-kocok baru keluar*

Morfem bebas *-ku* bentuk singkat dari *aku* yang bersinonim dengan morfem terikat *-ku* pada (26) dalam lirik lagu "Kocok-Kocok" diidentifikasi sebagai sinonimi berupa morfem (bebas) dengan morfem (terikat) dan frasa pada (28) dengan frasa *dimanja-manja* pada (29). Kedua *disayang-sayang* ungkapan tersebut mempunyai makna yang sepadan. Frasa nominal *pacarmu* dengan frasa nominal *kasihmu* berpadanan makna. Begitu juga dengan frasa *ogah ah ogah* dengan *aku tak mau* memiliki makna yang sama.

- (26) *ku tak mau cintaku*
- (27) *ku tak ingin sayangku*
- (28) *Disayang-sayang*
- (29) *Dimanja-manja*
- (30) *jadi pacarmu, jadi kasihmu*
- (31) *Ogah ach ogah aku tak mau*

Dalam lirik Lagu "Goyang Inul", kohesi leksikal yang ditemukan hanya oposisi hubungan, yakni antara *bapak-bapak* yang berantonim dengan *ibu-ibu*, sedangkan frasa adjektiva *rada panas* pada (32) bersinonim dengan *agak seksi*, konstituen *enak* bersinonim dengan *sedap* pada (33), dan kata *bersedih* bersinonim dengan *berduka* pada (34).

- (32) *rada panas agak seksi*
- (33) *Kurang enak kurang sedap*
- (34) *jangan bersedih jangan berduka*

Lirik lagu "Bahasa Kasih" sebagai kajian kohesi leksikal Palupi dalam Sumarlam, dkk. (2004:205–207) terungkap hal-hal yang berkaitan dengan (i) repetisi (perulangan), seperti repetisi epizeuksis, repetisi anafora, dan repetisi utuh, (ii) antonimi (lawan kata), dan (iii) kolokasi.

Repetisi epizeuksis dalam lirik lagu "Bahasa Kasih" adalah konstituen *kasih*, seperti pada (1), *andaikata* pada (2) sebagai repetisi anafora, dan konstituen *'ajarilah kami bahasa kasih-Mu'* pada (3) diulang secara lengkap pada kalimat ketiga secara utuh.

- (1) *Tapi jika tanpa kasih hampa tak berguna*
Reff

- Ajarilah kami bahasa kasihMu*
Ajarilah kami bahasa kasihMu
Tapi kasih yang sejati, kunci dari semua
Namun hati tiada kasih, tak mungkin, bahagia
Kasih itu lemah lembut, serta sederhana
Kasih itu murah hati, tahan menderita
Arti kasih yang sejati, lembut sabar hati
- (2) *Andaikata kulakukan yang luhur dan mulia*
Tapi jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna
Andaikata kupahami bahasa seluruhnya
Tapi cinta yang sejah, kunci dari semua
Andaikata kudermakan, milikku semua
Namun hati tiada kasih, tak mungkin bahagia
- (3) *Ajarilah kami bahasa kasihMu*
Agar kami dekat padaMu yaTuhanku
Ajarilah kami bahasa kasihMu
Agar kami dekat padaMu

Selain repetisi, konstituen *congkak* dengan kata *rendah hati* pada (4) diidentifikasi sebagai dua konstituen yang berposisi.

- (4) *Arti cinta yang sejati, lembut sabar hati*
Tiada congkak, rendah hati, rela melayani

Konstituen *bahasa kasih, luhur, mulia, derma, sederhana, bahagia, lemah lembut, murah hati, sabar, dan rendah hati* ditetapkan sebagai kata-kata yang bersanding untuk mendukung tema lagu "Bahasa Kasih".

Terhadap syair lagu anak-anak karya A.T. Mahmud yang berjudul "Ambillah Bulan" dapat pula diaplikasikan kajian kohesi leksikal, seperti yang dilakukan oleh Herawati dalam Sumarlam, dkk. (2004:234–237). Cakupan kajiannya meliputi (i) perulangan (repetisi), (ii) padan kata (sinonimi), (iii) lawan kata (antonimi), (iv) sinding kata (kolokasi), dan (v) hubungan atas bawah (hiponimi).

Perulangan (repetisi) yang ditetapkan dalam lagu ini adalah repetisi utuh harena semua kata dalam kalimat diulang penuh, seperti pada (1) dan repetisi anadiplosis, yaitu perulangan kata

atau frasa terakhir menjadi kata atau frasa pertama pada baris berikutnya, seperti pada (2) berikut ini.

- (1) *Ambilkan bulan, Bu Ambilkan bulan, Bu*
- (2) *Yang slalu bersinar di langit*
Di langit bulan benderang)

Padan kata (sinonimi) terdapat padan konstituen *bersinar* pada (3) dengan *cahya* pada (4) dan *benderang* pada (5) dan *menerangi* pada (6) ditetapkan sebagai konstituen yang bersinonim, sedangkan konstituen antara *benderang* pada (7) dengan *gelap* pada (8) digolongkan sebagai oposisi kutub.

- (3) *Yang slalu bersinar di langit*
- (4) *Cahyanya sampai ke bintang*
- (5) *Di langit bulan benderang*
- (6) *Ambilkan bulan Bu untuk menerangi*
- (7) *Di langit bulan benderang*
- (8) *Tidurku yang lelap di malam gelap*

Sanding kata (kolokasi) yang diidentifikasi dalam lagu "Ambillah Bulan" ialah konstituen *bersinar*, *benderang*, *cahya*, *bulan*, *bintang* yang menunjukkan asosiasi malam bulan purnama. Sementara itu, ditemui juga hipernim benda-benda angkasa dengan kohiponim *bulan* dan *bintang*, seperti pada (9) dan (10).

- (9) *Di langit bulan benaerang*
- (10) *Cahyanya sampai ke bintang*

Selanjutnya, dalam lagu "Pelangi" hanya ditemukan tiga aspek leksikal sebagai penanda kohesi leksikal, yaitu perulangan, lawan kata, dan hubungan atas bawah. Konstituen *pelangi* pada (11) dan (12) digolongkan sebagai repetisi epizeuksis. Lawan kata (antonimi) dalam lagu ini adalah oposisi majemuk karena Konstituen *warna merah* diperlakukan sebagai oposisi majemuk konstituen *kuning*, *hijau*, dan *belum tampak* pada (13). Konstituen *pelangi*, yaitu warna yang menjadi hipernim dan memiliki kohiponim *merah*, *kuning*, *hijau*, dan *biru* ditetapkan sebagai hubungan atas-bawah (hiponimi).

- (11) *Pelangi, pelangi alangkah indahmu*
- (12) *Pelangi, pelangi ciptaan Tuhan*
- (13) *Merah, kuning, hijau di langit yang biru.*

Dalam lagu "Burung Bernyanyi" ditemukan lima alat kohesi leksikal, seperti perulangan, padan kata, lawan kata, sanding kata, dan hubungan atas-bawah. Pada (14) dan (15) dinyatakan sebagai perulangan kata pada awal baris, sedangkan pada (16) perulangan frasa. Konstituen *bernyanyi* dengan *berlagu* dan *berdendang*, *alun melodi* dengan *irama* pada (17–21) dan *riang* dengan *bersenang* pada (22) dan (23) diidentifikasi sebagai sinonim. Konstituen *turun* dan *naik* pada (24) ditetapkan sebagai oposisi kutub. Konstituen *bernyanyi*, *berlagu*, *berdendang*, *riang*, *bersenang*, *melodi*, dan *irama* ditetapkan sebagai konstituen yang berkolokasi. Konstituen *suara berirama* sebagai hipernim dengan *bernyanyi*, *berlagu*, dan *berdendang* sebagai kohiponimnya pada (25–27) ditetapkan sebagai konstituen hubungan atas-bawah (hiponimi)

- (14) *Kudengar burung **bernyanyi***
Kudengar swara nan mumi
- (15) *Kuingin turut **berlagu***
*kuingin turut **berdendang***
- (16) *Bersamamu burung yang **riang***
*Bersamamu **bersenang***
- (17) *Kudengar burung **bernyanyi***
- (18) *Kuingin turut **berlagu***
- (19) *Kuingin turut **berdendang***
- (20) *Jurun naik **alun melodi***
- (21) *Dalam **irama** yang satu*
- (22) *Bersamamu burung yang **riang***
- (23) *Bersamamu **bersenang***
- (24) ***Turun naik** alun melodi*
- (25) *Kudengar burung **bernyanyi***
- (26) *Kuingin turut **berlagu***
- (27) *Kuingin turut **berdendang***

Naily dalam Sumarlam, dkk. (2004:247–250) telah menetapkan berapa jenis alat kohesi leksikal dalam wacana puisi "Kembang

Sepadang” karya Joko Pinurbo, yaitu (i) repetisi (perulangan), seperti repetisi anafora, repetisi medodiplosis, dan repetisi utuh, (ii) antonimi (lawan kata), seperti oposisi kutub, oposisi hubungan, dan oposisi hierarkial, (iii) kolokasi (sanding kata), dan (iv) hiponimi (hubungan atas-bawah).

Pada data (1–3) ditetapkan sebagai repetisi anafora karena terjadi perulangan kata *hati* pada awal setiap baris puisi. Perulangan konstituen dan Pada (4–6) yang terletak di tengah-tengah kata *putra-bunda*, *do'a restu kasih sayang*, *lelaki-perempuan*, *tanda hidup-kesuburan*, *pahlawan-negri junjungan*, dan *bakti cinta-kesetiaan* ditetapkan sebagai konstituen yang berupa repetisi mesodiplosis. Sementara itu, konstruksi *kembang sepasang yang terletak di pojok halaman* pada (7) yang diulang secara penuh pada (8) digolongkan sebagai konstruksi repetisi penuh.

- (1) *hati putra dan bunda - doa restu dan kasih sayang*
- (2) *hati lelaki dan perempuan - tanda hidup dan kesuburan*
- (3) *hati pahlawan dan negeri junjungan - bakti cinta dan kesetiaan*
- (4) *hati putra dan bunda - do'a restu dan kasih sayang*
- (5) *hati lelaki dan perempuan - tanda hidup dan kesuburan*
- (6) *hati pahlawan dan negeri junjungan - bakti cinta dan kesetiaan*
- (7) *kembang sepasang di pojok halaman*
- (8) *kembang sepasang di pojok halaman*

Selain repetisi, konstituen *hayat* yang merupakan sinonimi (padan kata) *jiwa* pada (9) yang beroposisi kutub dengan konstituen *badan* begitu juga dengan konstituen *musim panas* pada data (10) yang beroposisi kutub dengan konstituen *musim hujan*. Konstituen *putra* pada data (11) beroposisi hubungan dengan *bunda*, yang mengandung, melahirkan dan membesarkannya dan konstituen *lelaki* pada (12) beroposisi hubungan dengan *perempuan* yang merupakan lawan jenisnya. Konstituen *dua* dan *satu* pada data (13) digolongkan sebagai tingkatan dengan dipersepsikan bahwa *dua* lebih besar dan lebih banyak daripada *satu*.

- (9) *selama hayat dikandung badan*
- (10) *sampai pun tiba musim panas, sampaipun musim hujan*

- (11) *hati putra dan bunda - doa restu dan kasih sayang*
- (12) *hati lelaki dan perempuan - tanda hidup dan kesuburan*
- (13) *dua hati satu cinta lebur didalam*

Konstituen *kembang* pada (14) yang menjadi objek dalam puisi ini berkolokai dengan kata *daun* pada (15) merupakan bagian dari *kembang* tersebut. Konstituen di *pojok halaman* pada (14) yang menjadi tempat peristiwa atau tempat tumbuhnya *kembang* sepasang tersebut, berkolokasi dengan kata *pagarnya* pada data (17), yang menjadi bagian dari *pojok halaman* karena pagar tersebut berada di halaman tersebut. Sementara itu, *tumbuhan* menjadi hipernim atau superordinatnya adalah bagian-bagian dari tumbuhan yang menjadi hiponiminya, seperti *kembang* dan *daun* pada (18) dan (19).

- (14) *kembang sepasang di pojok halaman*
- (15) *daunnya bersih tanpa kotoran*
- (16) *kembang sepasang di pojok halaman*
- (17) *pagarnya putih tanpa hiasan*
- (18) *kembang sepasang di pojok halaman*
- (19) *daunnya bersih tanpa kotoran*

Kohesi leksikal wacana cerita pendek “Angin Terjepit Bebatuan” dalam kumpulan cerita pendek *Selingkuh Itu Indah* karya Agus Noor disinggung tentang (i) repetisi (perulangan) yang mencakup repetisi epizeuksis (pengulangan kata yang dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut), repetisi anafora, dan repetisi anadiplosis, dan repetisi epistrofa, (ii) sinonimi, (iii) antonimi, dan (iv) kolokasi (Hartini dalam Sumarlam, dkk. (2004:269–272).

Konstituen *bahagia* pada (1) diidentifikasi sebagai repetisi epizeuksis, *tak pernah* pada (2) sebagai repetisi anafora, konstituen *dendam* pada (3) di mana konstituen ini pada akhir kalimat yang diulang menjadi kata pertama dan satuan lingual berupa kata *permusuhan* pada akhir kalimat menjadi satuan lingual pada awal kalimat berikutnya, dan konstituen *bergetar* sebagai repetisi epistrofa ‘perulangan satuan lingual berupa kata atau frasa yang letaknya di belakang’.

- (1) "Apakah kita tak berhak **bahagia**, Riri?" **Bahagia**.
Kenapa tidak setiap orang bisa bahagia? Akupun ingin bahagia, batin Rin.)
- (2) "**Tak pernah** papa sangka, Rin. **Tak pernah!**"
- (3) Kecurigaan yang membuat masing-masing terus memendam **dendam**. **Dendam** yang berbuah permusuhan yang membuat keluarga Rin dan keluarga Dery tak pernah mau bersentuhan untuk urusan apapun.
- (4) Alam **tergetar**. Angin **tergetar**.

Konstituen *kau* dengan *-mu* pada (1) dan *ia* dengan *-nya* pada (2) diidentifikasi sebagai sinonimi morfem, sedangkan *dekat* dan *akrab* pada (3) diidentifikasi sebagai sinonimi kata. Konstituen *benci* dan *cinta* pada (4) dikategorikan sebagai oposisi mutlak, sedangkan *papa* dan *mama* pada (5) dikategorikan sebagai oposisi hubungan. Kemarahan ayah Rin dikolokasikan dengan sebuah *pedang* yang *tajam* dan yang *siap dihujamkan* pada (6) dan kebahagiaan Rin dan kebebasan Rin pada (7) dikolokasikan dengan alam semesta, seperti *alam*, *angin*, *langit*, dan *cakrawala*.

- (1) *Kau* telah menghinakan *papamu*.
- (2) *Rasanya ia* terbenam dalam lumpur kesalahan, yang membuat tubuhnya perlahan-lahan amblas tenggelam.
- (3) *Rin pun tak tahu-entah bagaimana-ia tahu-tahu dekat* dengan Dery. Seperti juga Dery tak pernah bisa menjelaskan kenapa ia tiba-tiba **akrab** dengan Rin.
- (4) Ah, barangkali benar, *benci* hanyalah perasaan *cinta* yang tak mau diakui.
- (5) Rin ingat, ketika malam-malam setelah *papa* marah, *ibu* mendaratangi kamarnya.
- (6) "Kau, kau..." nafas *papa* tersengal, menuding *tajam* wajah Rin, seakan *pedang* yang *siap menghujamkan*, "Tak pernah! Ini tak cuma *melukai* keluarga kita Rin
- (7) Alam **tergetar**. Angin **tergetar**, Dan dari *langit* yang pucat, Rin bayangkan berpuluh-puluh malaikat turun, suaranya bergemerincing dengan *jubah-jubah menyala* cerah, membuat *cakrawala* jadi diluapi gairah.

Perulangan, sinonimi, antonimi, sanding kata (kolokasi), hubungan atas-bawah (hiponimi), dan kata-kata tidak baku merupakan aspek kajian kohesi leksikal yang berhasil diungkapkan Utami dalam Sumarlam, dkk. (2004:290–293), khususnya dalam wacana novel "Pintu" karya Fira Basuki.

Utami menyakatan bahwa perulangan pada (1) sangat berkaitan dengan konteks situasi yang melatarbelakangi tuturan-tuturan tersebut. Konstituen *polisi* pada (1) tergolong perulangan karena diucapkan tokoh *aku* dengan mengulang tiga fonem awal kata tersebut (konsonan-vokal-konsonan) sebanyak tiga kali. Perulangan jenis itu digolongkan sebagai perulangan tautotes karena konstituen *polisi* diulang dua kali dalam sebuah konstruksi percakapan, termasuk penggalan kata yang tidak lengkap yang diucapkan oleh tokoh *aku*. Sementara itu, perulangan pada (2) diidentifikasi sebagai perulangan dua kalimat yang berpasangan, yaitu *selamat ya* dan *terima kasih*. Dua kalimat ini menggambarkan situasi saat tokoh *aku* dan *Aida* saat melangsungkan pernikahan sebagai sesuatu yang khas ketika para tamu menyalami kedua mempelai. Perulangan konstituen pada (2) ini diklasifikasikan sebagai jenis perulangan anafora, yaitu perulangan satuan lingual berupa kata atau frasa pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya.

Berikut ini contoh perulangan jenis anafora yang lebih jelas, yaitu perulangan *aku tahu* yang ditempatkan di awal kalimat dan kalimat berikutnya. Sementara itu, kata *bahagia* dalam data ini termasuk sebagai perulangan epizeusis karena kata *bahagia* merupakan satuan lingual yang dipentingkan dan diulang beberapa kali secara berturut-turut.

- (1) "*Polisi telpon....*"
"*Pol.. pol.. pol...*"
Belum pernah aku gemetaran seperti itu seumur hidupku.
"*Iya, polisi,*" sahut Papa. (hlm. 51) ,
- (2) "*Selamat ya.*"
"*Terima kasih,*"
"*Selamat ya.*"
"*Terima kasih,*"
"*Selamat ya.*"

Terima kasih..." Dan seterusnya. Dan selanjutnya. (hlm. 151)

Temuan sinonimi dalam wacana novel "Pintu" karya Fira Basuki mencakup tingkat morfem (antara morfem bebas dengan morfem terikat dan sebaliknya), kata (antara kata dengan kata, kata dengan frasa), frasa (frasa dengan frasa), hingga klausa/kalimat. Morfem bebas *aku* dan morfem terikat *-ku* pada (3) dikategorikan sebagai sinonimi pada tingkat morfem. Morfem terikat *-mu* dan morfem bebas *-ku* pada (4) dikategorikan sebagai morfem terikat dengan morfem bebas. Konstituen *seterusnya* dan *selanjutnya* pada (2), khususnya pada dua kalimat terakhir dikategorikan pula sebagai sinonimi untuk tingkat kata. Sementara itu, konstituen *sebuah gigi dari tengkorak kepala anjing dan tulang tua* pada (5) diidentifikasi sebagai sinonimi tingkat frasa dan konstituen *pria tidak mau mengikuti kehendak wanita, pria maunya sendiri dan tidak mau selalu berada di sisi wanita* pada (6) diidentifikasi sebagai sinonimi tingkat klausa.

- (3) *Aku tahu. June akan bahagia melihatku bahagia. Aku tahu apa yang ada di benaknya.*
- (4) *"Adikmu takut kehilangan kamu," bisik Aida.*
- (5) *Ia mematahkan sebuah gigi dari tengkorak kepala anjing dan membersihkannya. Setelah bersih digosok, tulang tua tersebut ia bungkus dengan sutra.*
- (6) *"Mengapa pria tidak mau mengikuti kehendak wanita...", katanya lirih.*
"Maaf?"
"Ya, mengapa pria maunya sendiri. Tidak mau selalu berada di sisi wanita."

Identifikasi konstituen yang tergolong sebagai antonimi meliputi (i) oposisi mutlak seperti *pria-wanita*, *tidak sendiri-telah menikah*, dan *madu-racun*, (ii) oposisi kutub, seperti *takut-antusias*, *naik-turun*, *kanan-kiri*, dan *depan-belakang*, (iii) oposisi hierarkial, seperti *bayi-usiaku yang tiga tahun-beranjak remaja*, (iv) oposisi hubungan, seperti *murid-guru*, *jin-manusia*, *kakak-adik*, dan *mama-papa*, dan (v) oposisi majemuk 'oposisi makna yang terjadi pada

beberapa kata (lebih dari dua) pada (7)—dalam hal ini—konstituen *marah, senang, tertawa*.

(7) *June mudah sekali marah, senang, tertawa dalam beberapa saat.*

Selain itu, Indratmo dalam Sumarlam, dkk. (2004:329–334) mengungkapkan aspek-aspek kohesi leksikal yang terdapat dalam wacana drama *Mangir* karya Pramodya Ananta Toer yang meliputi (i) repetisi (perulangan) yang mencakup repetisi epizeuksis (pengulangan kata yang dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut), repetisis mesodiplosis (perulangan satuan lingual di tengah-tengah baris atau kalimat secara berturut-turut), repetisi anafora (perulangan satuan lingual berupa kata atau frasa pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya), repetisi tautotes (perulangan satuan lingual (sebuah kata) beberapa kali dalam sebuah konstruksi), dan repetisi anadiplosis (perulangan kata/frasa terakhir dari baris/kalimat itu menjadi kata/frasa pertama pada baris/kalimat berikutnya), (ii) sinonimi (oposisi kutub, oposisi hubungan, oposisi mutlak, oposisi hierarkial), (iii) kolokasi, (iv) majas atau gaya bahasa (simile atau perbandingan), metafora, personifikasi, *totum pro parte*, dan hiperbola).

Dalam wacana drama *Mangir* karya Pramodya Ananta Toer, ada beberapa konstituen yang diidentifikasi Indratmo sebagai bagian repetisi. Konstituen *dengar* pada (1) diidentifikasi sebagai repetisi epizeuksis, yakni perulangan satuan lingual (kata) yang dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut. Konstituen *ada* pada (2) diidentifikasi sebagai repetisi mesodiplosis, yakni perulangan satuan lingual di tengah-tengah baris atau kalimat secara berturut-turut. Konstituen *malu pada* pada (3) diidentifikasi sebagai repetisi anafora, yakni perulangan satuan lingual berupa kata atau frasa pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya. Konstituen *bertapa* pada (4) diidentifikasi sebagai repetisi tautotes, yakni perulangan satuan lingual (sebuah kata) beberapa kali dalam sebuah konstruksi. Konstituen *tak bakal jadi raja* pada (5) diidentifikasi sebagai repetisi anadiplosis, yakni perulangan kata/frasa terakhir dari baris/kalimat itu menjadi kata/frasa pertama pada baris/kalimat berikutnya.

- (1) *Syapa belum pernah dengar cerita lama tentang Perdikan Mangir sebelah barat daya Mataram? Dengar, dengar, dengar: aku punya cerita.*
- (2) *Tersebut Ki Ageng Mangir Tua, Tua Perdikan Wibawa ada dalam dadanya Bijaksana ada pada lidahnya.*
- (3) *Malu pada perdikannya
Malu pada sanak tetangga
Ki Ageng lari seorang diri
Jauh ke gunung Merapi.*
- (4) *Ki Ageng lari seorang diri
Jauh ke gunung Merapi
Mohon ampun pada Yang Maha Kuasa
Ki Ageng Mangir Tua bertapa. Dia bertapa.*
- (5) *Wanabaya, Ki Ageng Mangir Muda, tak bakal jadi raja.
Tak bakal jadi raja! Buat apa pula tombak tambahan?*

Dalam wacana drama *Mangir* karya Pramudya Ananta Toer diidentifikasi jenis-jenis sinonimi. Konstituen *takut - gentar - kecut, maut - mati, perpisahan - perceraian*, dan *bergerak-bergetar* ditetapkan sebagai sinonimi kata dengan kata. Konstituen *medan perang - garis depan, Yang Maha Kuasa - Sang Pembikin Nyawa, empat kali tiga puluh hari - seratus dua puluh kali matari telah tenggelam* ditetapkan sebagai sinonimi frasa dengan frasa, seperti yang dibuktikan pada (6).

- (6) *Tak lain dari cucunda sendiri mengetahui inilah hari akhir janji, empat kali tiga puluh hari, seratus dua puluh kali matari telah tenggelam. Masih ingatkah cucunda, kita dapat panggilan dari Ki Wanabaya Muda, untuk main di Balai Perdikan Mangir?*

Konstituen yang berupa antonim ditemukan juga dalam teks *Mangir*. Konstituen *jauh - dekat* dan *tua - muda* pada (7) diidentifikasi sebagai oposisi kutub. Konstituen *bujang - perawan, langit - bumi* pada (8) diidentifikasi sebagai oposisi hubungan. Konstituen *hidup - mati, luar - dalam* pada (9) diidentifikasi sebagai oposisi mutlak. Konstituen *anak - cucu - buyut* pada (10) diidentifikasi sebagai oposisi hierarkial.

- (7) *Datanglah, hari setelah setahun menanti Pesta awal Sura Ronggeng, wayang, persabungan, gelut, lomba tombak, Dekat-jauh, tua-muda, bujang-perawan, semua datang.*
- (8) *Demi langit dan bumi, demi leluhur keramat berbahagia - tak bakal, Adisaroh kekasih, tak bakal kau aku tinggalkan.*
- (9) *Cucunda pasti belum lupa: Panggilan dari Wanabaya Muda, tak lain dari pertanda, dia sudah bebas berbrahmacarya, akan segera jatuh dalam kekuasaanmu, untuk segera dipersembahkan, hidup atau mati ke hadapan baginda.*
- (10) *Ah, ah, ah, kata-kata kosong belaka. Semua yang ada bukankah hanya buah usaha? Sang maut bukan utusan kita. Kau akan lahirkan anak kita dengan selamat. Kau akan saksikan anakmu, Cucu dan buyutmu, Adisaroh! Leluhur, bumi dan langit bakal jaga keturunan kita, sampai dunia belah dua, dan burung-burung tak bisa bertengger lagi.*

Konstituen yang berkolokasi di dalam teks *Mangir* diidentifikasi berdasarkan domain atau jaringan kekuasaan raja, seperti konstituen *raja, Tua Perdikan, patih, panglima, ahli siasat, tahta, mahkota, bala tentara, nayaka, perang, tumpas, kepungan., kemenangan., kekalahan, takluk, pedang, tombak, dan benteng.* Konstituen yang berkolokasi itu diidentifikasi dari (11).

- (11) *Mataram bernafsu menganggang di atas Mangir! Ai-ai:-ai. Mengangkat diri jadi raja, kirimkan patihnya Singaranu - ke Mangir, Klinting menuntut takluk dan upeti, barang gubal dan barang jadi. Perdikan Mangir hendak dicoba! Pulang ta'ngan hampa, balik kembali dengan balatentara. Kau telah bikin panglima Mataram, Takih Susetya, berantakan dengan supit urangnya. Ai-ai-ai tak bisa lain, tak bisa lain. Klinting, kau benar-benar dewa turun ke bumi-tumpas mereka dengan ronggeng jaya manggilinganmu. Kemana panglima Mataram itu kini menghilang larikan malunya?*

Salah satu yang membedakan kajian kohesi leksikal yang dilakukan Indratmo terhadap wacana drama *Mangir* karya Pramudya Ananta Toer ialah kemampuannya untuk menetapkan majas atau gaya bahasa sebagai bagian analisis kohesi leksikal. Dalam analisis kohesi leksikal yang diinformasikan tadi, masalah itu tidak ada yang menyinggung.

Majas atau gaya bahasa menurut Pradopo (1987:93) adalah salah satu ciri penting di dalam teks sastra. Gaya bahasa banyak dipergunakan di dalam teks sastra karena bermanfaat untuk menghidupkan makna, memberi citraan yang khas, membuat gambaran menjadi jelas, serta membuat kalimat-kalimat lebih dinamis dan hidup. Dalam hubungannya dengan pengertian itu, Indratmo mengidentifikasi beberapa jenis majas yang dipergunakan pengarang dalam teks *Mangir*, seperti metafora, personifikasi, *totum pro parte*, dan hiperbola.

Konstituen *punggungi negara* pada (12) diidentifikasi sebagai metafora. Konstituen *pepohonan teranggukangguk mengantuk, dan angin tak juga jera berkelana* pada (13) diidentifikasi sebagai personifikasi yang membuat gambaran cerita menjadi lebih dinamis karena tergambar secara hidup. Konstituen *Mataram* pada (14) diidentifikasi sebagai *Totum pro parte* atau penyebutan wadah untuk isi karena penggunaan konstituen *Mataram* itu tidak mengacu wilayah kerajaan, tetapi mengacu kepada orang-orang yang tinggal di Mataram atau masyarakat Mataram. Konstituen *telanjang diri* pada (15) diidentifikasi sebagai hiperbola sebagai ungkapan yang membesar-besarkan atau melebih-lebihkan dan penggunaan majas ini untuk menekankan suatu pernyataan.

- (12) *Juga akan adukan Pambayun membangkang pada ayahanda baginda? Bergabung dan bersetia pada musuh, khianati bapa, punggungi negara?*
- (13) *(membawa Wanabaya meninggalkan tanah ketinggian) Setiap malam, Kakangku Wanabaya, bila semua sudah lelap, pepohonan teranggukangguk mengantuk, dan angin tak juga jera berkelana, Adisaroh istrimu bangun hati mengucap syukur dapatkan suami seperti Kakang .*
- (14) *Nenenda Tumenggung Mandaraka Juru Martani ini akan atur semua. Sekarang hari terakhir. Ditambah tidak*

bisa. Seminggu lagi cucunda, **Mataram** akan berpesta menunggu Putri Pambayun dengan putra dalam kandungan calon raja Mataram, raja seluruh bumi dan orang Jawa, dengan Ki Ageng Mangir Muda Wanabaya, putra menantu Twa Perdikan dalam pengukuhan.

- (15) Belum mampu pandangmu menembus hari dekat mendatang? Dia akan datang - penghinaan itu. Kan meruap hilang impian Panembahan, jadi raja tunggal menggagahi pulau Jawa. Bakal **telanjang diri** dia dalam kekalahan dan kehinaan.

BAB III

PENGUNAAN ALAT KOHESI LEKSIKAL DALAM EDITORIAL SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA

3.1 Pengantar

Seperti yang telah disinggung pada Bab II, kajian kohesi leksikal dapat diterapkan dalam berbagai jenis wacana. Pada Bab III ini akan dianalisis penanda kohesi leksikal dalam editorial surat kabar berbahasa Indonesia. Dari hasil temuan dan pengelompokan data, terdapat beberapa penggunaan konstituen (bentuk-bentuk) yang tergolong sebagai alat kohesi leksikal, seperti konstituen (bentuk-bentuk) yang masuk kelompok kesinoniman, keantoniman, kehiponiman, kemeroniman, paronimi, kolokasi, dan repetisi/pengulangan. Mengenai konstituen (bentuk-bentuk) dalam hubungannya dengan pemakaian penanda kohesi leksikal tersebut dapat dilihat pada (3.2–3.8).

3.2 Kesononiman

Kesononiman (senonimi) timbul disebabkan tiga hal, yaitu (i) dorongan kebahasaan, yaitu untuk memperkuat, memperlancar, atau memperlancar daya ungkap bahasa dalam arti yang luas, (ii) mengaburkan masalah pokok untuk mengganti istilah asing, dan (iii) memenuhi kolokasi (Subroto, 1988:14–15). Kesononiman itu tidak ada yang bersifat mutlak walaupun ada beberapa kata yang bersinonim; yang ada adalah sinonim dekat (*near synonymy*) (Zgusta, 1971:89). Ditambahkan pula, padanan kata atau sinonimi merupa-

kan salah satu aspek leksikal yang mendukung kepaduan wacana. Sinonimi berfungsi untuk menjalin hubungan makna yang sepadan antara satuan lingual yang satu dengan satuan lingual yang lain dalam wacana. Suryawinata dan Haryanto (2003:90) menambahkan pula bahwa sinonim adalah kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama di dalam suatu bahasa, seperti *berkata*, *berguman*, *berbisik*, *bertanya*, *berujar*, atau *bertutur*. Sementara itu, Saeed (2000) merumuskan bahwa sinonimi adalah kata-kata fonologis berbeda yang memiliki makna yang sama atau sangat mirip. Sebagai salah satu aspek leksikal yang mendukung kepaduan wacana, sinonim berfungsi untuk menjalin hubungan makna yang sepadan antara satuan lingual yang satu dengan satuan lingual yang lain dalam wacana. Penggunaan sinonim ini untuk mengelakkan kebosanan bagi pengulangan kata yang sama di dalam teks dan juga memberikan variasi pada sesuatu teks.

- (1) (a) *Persoalan itu semakin harus kita pahami dan kita pertimbangkan karena orientasi otonomi sebagai ekspresi kekuasaan dan wewenang lokal memberikan kesan merembet ke mana-mana.* (b) *Tampak kecenderungan kabupaten pun merasa harus membuat aturan sendiri bagi wilayahnya tentang ekses kehidupan seks.* (Kompas/Selasa, 7 maret 2006/hal. 6)
- (2) (a) *Sapu kotor tidak pernah bisa membersihkan lantai.* (b) *Bahkan, sebaliknya lantai yang kotor bila tersentuh dengan sapu kotor akan kotor dan najis.* (c) *Itu adalah perumpamaan bila kita masuk lingkungan para penegak hukum yang tidak berjiwa suci dan tidak mengemban panji-panji keadilan.* (d) *Alih-alih tangan kita semakin bersih, malahan tangan kita ikut berbau kotoran.* (Media Indonesia/Kamis, 9 Maret 2006)
- (3) (a) *Kecelakaan kereta api yang kedua itu semestinya tidak terjadi kalau petugas kereta api mengikuti instruksi Menteri Perhubungan Hatta Rajasa.* (b) *Menteri telah memerintahkan semua petugas stasiun agar tidak memberangkatkan kereta jika masih ada penumpang yang duduk di atap.* (c) *Para penumpang pun bisa menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan bila mau belajar dari pengalaman sehari sebelumnya, yang menimpa KRD 907.* (Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)

- (4) (a) Selain dari pembenahannya atas kinerja perusahaan, keberhasilan Direktur Utama Pertamina yang baru diangkat kemarin akan dinilai dari seberapa besar setorannya kepada kas negara. (b) Selama ini, **seluruh** hasil penjualan minyak yang ditambang diserahkan kepada kas negara untuk membiayai pembangunan. (c) Pola pemanfaatan minyak seperti yang terjadi sekarang sudah berlangsung sejak awal Indonesia merdeka. (Tempo/Kamis, 9 Maret 2006/Hal. A2)
- (5) (a) DPR sebenarnya memberi ruang yang luas bagi masyarakat untuk memberi masukan. (b) DPR juga cukup berlapang dada menerima reaksi—antara lain berupa suguhan senam erotis. (c) Mereka bukan cadas yang mementalkan **segala** hal. (d) Mereka paham, misalnya, tentang situasi khas di Papua dan Bali. (e) Mereka siap memperbaiki RUU. (Republika/8 Maret 2006)
- (6) (a) Jika jalan tol Cipularang bisa dikebut dalam setahun, tak ada alasan bagi pemerintah untuk memperlama penyelesaian pembangunan rel kereta api. (b) Jika rakyat kecil yang hendak dibela, pemerintah perlu mencurahkan **segenap** kekuatan untuk memperbaiki moda angkutan kereta api. (Tempo/Selasa, 7 Maret 2006/Hal. A2)
- (7) (a) Bahwa draf APP perlu diperbaiki dan diubah sana-sini. Kita jelas sepakat, terutama pasal-pasal yang mengundang multitafsir. (b) Juga yang terkait dengan budaya setempat dan lain-lain. (c) Namun, menolak mentah-mentah APP jelas membahayakan. (d) Itu sama dengan menolak dan **menentang** nilai-nilai moral dan agama, seperti halnya diperlihatkan para pendukung pemuatan karikatur pelecehan terhadap Nabi Muhammad saw. (Republika/Senin, 6 Maret 2006)
- (8) (a) Menurut hemat saya, tetap ada satu jalan untuk memangkas semua itu, hanya dengan sistem perundangan yang menjalankan asas pembuktian terbalik, semua akan tersapu (tentunya dengan sapu yang baru). (b) Dan setiap orang yang berupaya keras untuk **menolak** asas ini merupakan indikasi bahwa yang bersangkutan ketakutan untuk tersapu. (Media Indonesia/Kamis, 9 Maret 2006)
- (9) (a) Beberapa kali sudah DPR menggunakan hak interpelasi itu. (b) Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai masalah busung lapar dan polio. (c) **Perkara** ini menjadi hangat bukan menyangkut jawaban pemerintah atas

materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung. (Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)

- (10) (a) *Paket baru kebijakan iklim investasi boleh saja dijadikan harapan membaiknya investasi negeri ini. (b) Namun, jika kasus seperti Cemex tetap terus terjadi dan berkepanjangan pula, maka mudah ditebak apa yang ada di benak investor asing. (c) Pemerintah jelas tak ingin dibilang "pilin plan". (d) Tapi, pemerintah rasanya sulit pula mencegah jika anggapan itu melekat di benak investor asing. (e) Maka, ketegasan penyelesaian kasus Cemex-terlepas baik tidaknya paket kebijakan iklim investasi tak ubahnya pertarungan kredibilitas pemerintah di mata investor asing. (Republika/7 MARET 2006)*
- (11) (a) *Beberapa kali sudah DPR menggunakan hak interpelasi itu. Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai masalah busung lapar dan polio. (b) Perkara ini menjadi hangat bukan menyangkut jawaban pemerintah atas materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung. (Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)*
- (12) (a) *Perumahan memang menjadi salah satu **problem** bangsa. (b) Masih ada jutaan masyarakat yang belum memiliki rumah tinggal. (c) Sebagian menumpang, ada yang menempati rumah bedeng, ada yang terjubel di rumah karton, ada yang kleleran di pinggir jalan, ada yang menempati rumah gerobak, dll. (Republika/Jumat/10 Maret 2006)*

Perangkat sinonim aturan dalam konstruksi *Tampak* kecenderungan kabupaten pun merasa harus membuat **aturan** sendiri bagi wilayahnya tentang ekses kehidupan seks pada (1b) dan hukum dalam konstruksi *Itu* adalah perumpamaan bila kita masuk lingkungan para penegak **hukum** yang tidak berjiwa suci dan tidak mengemban panji-panji keadilan pada (2c) mengandung ciri semantik umum, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan yang harus diikuti. Nomina *aturan* lebih umum daripada nomina *hukum*. Nomina *hukum* berbeda dengan *aturan* karena nomina *hukum* mem-

punya ciri, yaitu jika dilanggar akan terkena hukuman, sedangkan aturan hanya berakibat efek negatif.

Perangkat sinonim adverbial *semua* dalam konstruksi Menteri telah memerintahkan **semua** petugas stasiun agar tidak mem-berangkatkan kereta jika masih ada penumpang yang duduk di atap pada (3b), Selama ini, **seluruh** hasil penjualan minyak yang di-tambang diserahkan kepada kas negara untuk membiayai pem-bangunan pada (4b), Mereka bukan cadas yang mementalkan **segala** hal pada (5d), dan Jika rakyat kecil yang hendak dibela, pemerintah perlu mencurahkan **segenap** kekuatan untuk memper-baiki moda angkutan kereta api pada (6b) mengandung ciri semantik umum.

Perangkat sinonim verba *menentang* dalam konstruksi Itu sama dengan menolak dan **menentang** nilai-nilai moral dan agama, seperti halnya diperlihatkan para pendukung pemuatan karikatur pelecehan terhadap Nabi Muhammad Saw pada (7d) dan verba menolak Dan setiap orang yang berupaya keras untuk **menolak** asas ini merupakan indikasi bahwa yang bersangkutan ketakutan untuk tersapu pada (8a) mengandung ciri semantik umum.

Perangkat sinonim nomina *perkara* dalam **Perkara** ini men-jadi hangat bukan menyangkut jawaban pemerintah atas materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung pada (9c) dan kasus dalam konstruksi Maka, ketegasan penyelesaian **kasus** Cemex-terlepas baik tidaknya paket kebijakan iklim investasi tak ubahnya pertarungan kredibili-tas pemerintah di mata investor asing pada (10e) mengandung ciri semantik khusus. Ciri semantik nomina *kasus* bertalian dengan keadaan atau kondisi yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, sedangkan *perkara* bertalian dengan urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.

Perangkat sinonim nomina *masalah* dalam konstruksi Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai **masalah** busung lapar dan polio (11b) dan nomina *problem* dalam konstruksi Perumahan memang menjadi salah satu **problem** bangsa pada (12a) mengandung ciri semantik khusus. Ciri semantik nomina *masalah* bertalian dengan sesuatu yang harus diselesaikan, sedang-kan *problem* bertalian dengan hal yang belum dapat dipecahkan.

3.3 Keantoniman

Keantoniman merupakan relasi semantik antara suatu konstituen dan konstituen yang lain bersifat kontras (Halliday dan Hasan, 1989:90). Sementara itu, Cruse (1986:197–262) mengelompokkan keantoniman menjadi empat, yaitu (1) oposisi mutlak, seperti *jantan* dan *betina*; (2) antonim, seperti *besar* dan *kecil*; (3) oposisi kebalikan, seperti *guru* dan *murid*; dan (4) oposisi hierarkis (berdaur), seperti *Senin*, *Selasa*, *Rabu*, *Kamis*, *Jumat*, *Sabtu*, dan *Minggu*. Lebih lanjut Cruse (1986:204) menyatakan bahwa relasi keantoniman mempunyai karakteristik berikut ini.

1. Anggota pasangan antonim sepenuhnya bertaraf dan pada umumnya berupa adjektiva dan dapat juga berupa verba.
2. Anggota pasangan menunjukkan derajat/tingkat dari beberapa ciri variabel, seperti panjang, kecepatan, berat, dan ketepatan.
3. Anggota pasangan bergerak dalam arah yang berlawanan sepanjang skala yang merepresentasikan derajat dari ciri variabel yang relevan jika diintensifkan. Jadi, *very heavy* ‘sangat berat’ dan *very light* ‘sangat ringan’, misalnya, lebih luas dipisahkan pada skala berat daripada *fairly heavy* dan *fairly light*.
4. Anggota pasangan tidak membagi dua suatu ranah secara tegas. Ada ranah nilai sifat variabel yang terletak di antara anggota yang bertentangan. Hasilnya, pernyataan yang berisi satu anggota pasangan antonim terletak dalam relasi kekonkretan dengan pernyataan paralel yang berisi anggota lain. Jadi, *It’s long* dan *It’s short* adalah pernyataan kontras (*contrary*) bukan pernyataan kontradiktif (*contradictory*). Oleh karena itu, *It’s neither long nor short* bukan paradoks karena ada wilayah pada skala panjang yang dengan tepat memenuhi deskripsi ini.

Mengenai jenis keantoniman tersebut dapat dilihat pada (3.3.1–3.3.4).

3.3.1 Oposisi Mutlak

Konstituen yang beroposisi mutlak dalam wacana (1–6) dapat berkategori nomina dan verba, seperti yang dicontohkan berikut ini.

- (1) *Beberapa kali sudah DPR menggunakan hak interpelasi itu. Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai masalah busung lapar dan polio. Perkara ini menjadi hangat bukan menyangkut jawaban **pemerintah** atas materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung. (Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)*
- (2) *Pemerintah bisa saja mengkonsolidasi BUMN lain membeli saham Cemex. Hanya saja, itu pun tak mungkin dilakukan jika BUMN atau **swasta** nasional yang membeli sama sekali tak memahami industri semen. Alhasil, posisi Cemex dan Semen Gresik terkatung-katung. (Republika/7 MARET 2006)*
- (3) *Begitulah, silang selimpat mengenai hak interpelasi DPR telah berpindah keluar gelanggang persoalan. Yang disorot bukan **kebenaran** jawaban pemerintah, bukan substansi mengenai perkara busung lapar dan folio, melainkan mikrofon dan surat Ketua DPR. (Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)*
- (4) *Bandingkan dengan kecerdikan dan kemandirian sikap Petronas. Perusahaan serupa Pertamina milik Malaysia ini sejak awal berdiri tahun 1974 sudah menyadari pentingnya mengelola sendiri. Mereka belajar dari Pertamina dan tak mau meniru **kesalahan** dan kelemahannya. Kini Petronas telah jauh berkembang sebagai perusahaan berskala dunia dan beroperasi di 31 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Mereka telah jauh meninggalkan gurunya. Tak hanya itu, para ahli di Pertamina pun mereka bajak dengan gaji yang jauh lebih besar. Sebagai bukti puncak prestasinya, Petronas mendirikan menara kembar di Jantung Kuala Lumpur. Menara tertinggi di dunia itu menjadi ikon Malaysia dan rakyat Indonesia senang berwisata belanja dan berfoto di sana. (Republika/9 Maret 2006)*
- (5) *Kenapa kok mereka ikut-ikutan mujur? Ya, karena mereka **hidup** di negeri nyiur melambai, Indonesia tercinta. Dihukum berat sekalipun paling cuma kena berapa tahun. Coba kalau mereka **hidup** di China. Pasti sudah wassalam. (Media Indonesia/Kamis, 9 Maret 2006)*

- (6) Beberapa kali sudah DPR menggunakan hak interpelasi itu. Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai masalah busung lapar dan polio. Perkara ini menjadi hangat bukan menyangkut jawaban pemerintah atas materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung. (Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)

Nomina dasar *pemerintah* pada wacana (1) berposisi mutlak dengan nomina dasar *swasta* pada wacana (2) dan nomina *kebenaran* pada wacana (3) berposisi mutlak dengan nomina turunan *kesalahan* pada wacana (4). Sementara itu, verba *hidup* pada wacana (3) berposisi mutlak dengan verba *mati* pada wacana (6). Penentuan nomina dasar *pemerintah* dengan nomina dasar *swasta*, nomina turunan *kebenaran* dengan nomina turunan *kesalahan*, dan verba *hidup* dengan verba *mati* berposisi mutlak karena konstituen yang berposisi mutlak tersebut tidak mempunyai nuansa makna. Hal itu dapat dibuktikan karena konstituen tersebut tidak berterima didahului konstituen *agak*, *amat*, *lebih*, *paling*, atau *kurang* dan mendahului konstituen *sekali*, seperti ditulis kembali berikut ini.



lebih + {
 *pemerintah
 *swasta
 *kebenaran
 *kesalahan
 *hidup
 *mati

paling + {
 *pemerintah
 *swasta
 *kebenaran
 *kesalahan
 *hidup
 *mati

kurang + {
 *pemerintah
 *swasta
 *kebenaran
 *kesalahan
 *hidup
 *mati

{
 *pemerintah
 *swasta
 *kebenaran
 *kesalahan
 *hidup
 *mati

+ sekali

3.3.2 Antonim

Dalam terminologi tradisional, antonim adalah kata-kata yang maknanya beroposisi (Saeed 2000:66). Lebih lanjut, Saeed menyebutkan lima jenis oposisi (66-68), yaitu:

Keantoniman pada wacana (1–18) tidak memiliki hubungan makna mutlak karena kata-kata yang berantonim tersebut tidak secara mutlak berlawanan.

- (1) *Beberapa kali sudah DPR menggunakan hak interpelasi itu. Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai*

masalah busung lapar dan polio. Perkara ini menjadi hangat bukan menyangkut jawaban pemerintah *atas* materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung. (Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)

- (2) Sangat mustahil kalau kongkalikong itu masih terus berlangsung, sedangkan 'ayam' di *bawah* kolong jembatan terus berteriak minta penegakan hukum yang mesti tidak seadil-adilnya seperti Tuhan, tetapi minimal dapat mendekati keadilan yang sebenarnya. (Media Indonesia/Kamis, 9 Maret 2006)
- (3) Data PT Kereta Api Indonesia menyebutkan ada 125 ribu penumpang gelap di kereta Jabotabek atau 20 persen dari total penumpang. Akibatnya, dihitung secara kasar saja, pemasukan PT Kereta Api yang hilang mencapai Rp 50 miliar per tahun. Hal itu *terang* mengurangi kemampuan PT Kereta Api berinvestasi-membeli loko atau gerbong baru-dan memelihara kereta yang ada. (Tempo/Selasa, 7 Maret 2006/Hal. A2)
- (4) Beberapa perusahaan milik negara, seperti Garuda Indonesia dan BNI, Pemerintah Provinsi DKI melalui program "Enjoy Jakarta", perusahaan swasta nasional dan internasional, telah membantu membuka tabir *gelap* Indonesia. Tentu pekerjaan itu akan lebih *afdol* jika pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, bisa berperan lebih aktif lagi dengan menjadikan JIJF sebagai agenda resmi tahunan pemerintah. Mari kita bawa dunia ke Indonesia! (Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)
- (5) Direksi *baru* Pertamina itu dilantik kemarin. Mereka adalah Komisaris Utama J Purwono, Direktur Utama Ari Soemarno, Wakil Direktur Utama Iin Arifin Takhyani, Direktur Pengolahan Suroso Atmomartoyo; Direktur Keuangan Fredrick ST Siahaan, Direktur Umum Sukusen Soernarinda, Direktur Pemasaran Achmad Faisal, serta Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Soni Sumarsono. (Media Indonesia/Kamis/9-3-2006)
- (6) Dengan sapu lama yang juga kotor, hasilnya pun pasti tetap kotor. Singkirkan sapu kotor itu dan ganti dengan yang baru sehingga kotoran-kotorannya tidak menular. (Media Indonesia/Kamis, 9 Maret 2006)

- (7) *Bandingkan dengan kecerdikan dan kemandirian sikap Petronas. Perusahaan serupa Pertamina milik Malaysia ini sejak awal berdiri tahun 1974 sudah menyadari pentingnya mengelola sendiri. Mereka belajar dari. Pertamina dan tak mau meniru kesalahan dan kelemahannya. Kini Petronas telah jauh berkembang sebagai perusahaan berskala dunia dan beroperasi di 31 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Mereka telah jauh meninggalkan gurunya. Tak hanya itu, para ahli di Pertamina pun mereka bajak dengan gaji yang jauh lebih besar. Sebagai bukti puncak prestasinya, Petronas mendirikan menara kembar di Jantung Kuala Lumpur. Menara tertinggi di dunia itu menjadi ikon Malaysia dan rakyat Indonesia senang berwisata belanja dan berfoto di sana. (Republika/9 Maret 2006)*
- (8) *Dua kecelakaan kereta api yang melayani angkutan umum di Jabodetabek terjadi dua hari berturut-turut akhir pekan lalu. Kejadian pertama, Jumat (3/3). Atap gerbong keempat KRD 907 jurusan Rangkasbitung–Tanah Abang runtuh. Puluhan penumpang di atas atap berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari atap. Akibatnya, puluhan penumpang cedera. (Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)*
- (9) *Tantangan besar yang dihadapi Pertamina adalah menjadi sebuah BUMN yang produktif dan efisien. Untuk itu, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan audit menyeluruh. Itu untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, atau sehat dan tidaknya perusahaan. (Media Indonesia/Kamis/9-3-2006)*
- (10) *Karena itu, daripada membangun 250 rumah di daerah Banten untuk warga DKI, lebih efisien jika Pemprov DKI membangun rusun buat warganya. Jika konsep horizonntal terus dipaksakan, maka semakin kecil pendapatan seseorang akan semakin tinggi ongkos transportasi karena semakin kecil pendapatan semakin jauh rumah yang ditinggali. (Republika/Jumat/10 Maret 2006)*
- (11) *Dengan sapu lama yang juga kotor, hasilnya pun pasti tetap kotor. Singkirkan sapu kotor itu dan ganti dengan yang baru sehingga kotoran-kotorannya tidak menular. (Media Indonesia/Kamis/9-3-2006)*
- (12) *Bayangkan, kalau tangan-tangan yang suci dan bersih ikut terkena imbas baunya kotoran. Maka kita tinggal menunggu*

- kehancuran republik Ini. Hancur karena keadilan telah musnah. Pencari keadilan hanya berharap pada pepesan kosong. (Media Indonesia/Kamis, 9 Maret 2006)
- (13) Target pembangunan satu juta rumah merupakan berita cukup menyenangkan. Setidaknya program tersebut akan mengurangi jumlah masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rumah. Hanya masalah harga dan cicilan mungkin yang nanti akan menjadi **sedikit** persoalan. (Republika/Jumat/10 Maret 2006)
- (14) Sebetulnya, di Jakarta sendiri sudah **banyak** bermunculan apartemen. Tetapi sebagian besar adalah untuk kelas menengah atas sehingga mereka yang membeli pun sifatnya lebih **banyak** spekulasi, bukan untuk dihuni. Terbukti bahwa **banyak** apartemen yang secara kepemilikan sudah terjual, tetapi tidak **banyak** penghuninya. (Republika/Jumat/10 Maret 2006)
- (15) Serahkan semua persoalan kepada ahlinya. Ini pelajaran penting yang harus diambil Tentara Nasional Indonesia dari kasus raibnya uang perumahan prajurit sejumlah Rp 129 miliar yang dua hari lalu terungkap di Dewan Perwakilan Rakyat. Kenyataan **pahit** yang diakui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Djoko Santoso di depan Komisi Pertahanan itu menunjukkan bahwa niat mulia menolong prajurit saja ternyata tak cukup. Niat itu perlu disertai keahlian yang memadai. (Tempo/Senin, 8 Maret 2006/Hal. A2)
- (16) Selama tiga hari, tak kurang 1.000 penyanyi dan musisi tampil. Mulai grup lokal yang sedang naik daun, Mocca dan White Shoes & The Couple Company, hingga yang sudah kondang seperti Patti Austin, James Brown, Dave Koz, Take 6, Incognito, Brand New Heavies, Kool & The Gang, dan Lee Ritenour. Tiket masuk harian Rp 350.000, belum termasuk pertunjukan khusus yang tiketnya Rp 150.000, laris **manis** terjual. (Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)

Nomina atas pada wacana (1) berantonim dengan bawah pada (2), terang pada wacana (3) dengan gelap pada wacana (4), baru pada wacana (5) dengan lama pada wacana (6), awal pada wacana (7) dengan akhir pada wacana (8), besar pada wacana (9) dengan kecil pada wacana (10), kotor pada wacana (11) dengan bersih pada

wacana (12), *sedikit* pada wacana (13) dengan *banyak* pada wacana (14), dan *pahit* pada wacana (15) dengan *manis* pada wacana (16).

Selain itu, kata-kata yang berantonim pada (1–16) memiliki nuansa makna karena dapat didahului konstituen pemeringkatan, seperti *agak*, *amat*, *lebih*, *paling*, atau *kurang* atau mendahului konstituen pemeringkatan *sekali*, seperti yang ditulis kembali pada (17).

(17) *agak* +

atas
bawah
terang
gelap
baru
lama
awal
akhir
besar
kecil
kotor
bersih
sedikit
banyak
pahit
manis

(17) *amat* +

atas
bawah
terang
gelap
baru
lama
awal
akhir
besar
kecil
kotor
bersih
sedikit
banyak
pahit
manis

(17) lebih +

atas
bawah
terang
gelap
baru
lama
awal
akhir
besar
kecil
kotor
bersih
sedikit
banyak
pahit
manis

(17) paling +

atas
bawah
terang
gelap
baru
lama
awal
akhir
besar
kecil
kotor
bersih
sedikit
banyak
pahit
manis

(17) kurang +

atas
bawah
terang
gelap
baru
lama
awal
akhir
besar
kecil
kotor
bersih
sedikit
banyak
pahit
manis

(18)

atas
bawah
terang
gelap
baru
lama
awal
akhir
besar
kecil
kotor
bersih
sedikit
banyak
pahit
manis

+ sekali

3.3.3 Oposisi Kebalikan

Oposisi kebalikan (*reverses*), menurut Saeed (2000:66), merupakan relasi yang menunjukkan gerakan arah yang berlawanan, seperti yang dicontohkan berikut ini.

- (1) Apapun, yang jelas, bagi pemerintah paket tersebut merupakan jawaban terhadap tuntutan dunia usaha untuk perbaikan iklim investasi. Paket ini diharapkan mampu meningkatkan kegiatan investasi guna **mendorong** percepatan pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. (Republika/7 MARET 2006)
- (2) Maka, Kementerian Koordinator Perekonomian pekan lalu mengumumkan diterbitkannya paket kebijakan iklim investasi. Di tengah persaingan **menarik** investasi antarnegara di Asia yang semakin ketat, paket ini sangat diharapkan mampu memperbaiki iklim investasi. Diharapkan juga paket ini bisa mengembalikan Indonesia menjadi tempat tujuan investasi yang menarik, terutama bagi investor asing. (Republika/7 MARET 2006)
- (3) Sementara itu, besok (11/3) pilkada yang lain digelar di Papua, yakni di Provinsi Irian Jaya **Barat** (Irjabar). Kita memberi perhatian serius untuk pilkada ini karena status Irjabar masih menjadi perdebatan di Papua sampai sekarang. Belum lama ini Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menolak pemekaran Irjabar. Pegangan mereka adalah UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Namun Jakarta tetap memaksakan kehendak agar Pilkada di Irjabar tetap diselenggarakan. (Suara Pembaharuan/Jumat, 10 Maret 2006)
- (4) Pada satu sisi perkembangan terakhir di **Timur Tengah** ini memang tidak menggembirakan. Israel melancarkan serangan udara sebagai aksi balasan terhadap Jihad Islam yang dianggap sebagai pelaku serangan bom bunuh diri di Israel dan pelaku serangan roket dari Gaza semenjak tentara dan pemukim Israel meninggalkan wilayah ini tahun lalu. (Kompas/Selasa, 9 Maret 2006/Hal. 6)
- (5) Apa yang terjadi? Penumpang tetap naik di **atas atap**. Barulah turun ketika pihak KA juga ngotot. Tidak berangkat, sebelum penumpang turun. Mungkin terdesak pilihan dilematis antara kerja tepat waktu atau terlambat, turunlah penumpang dari **atas atap**. Apakah atap kereta sejak itu bersih dari penumpang? (Kompas/Jumat, 10 Maret 2006/Hal. 6)

- (6) Sangat mustahil kalau kongkalikong itu masih terus berlangsung, sedangkan 'ayam' di **bawah** kolong jembatan terus berteriak minta penegakan hukum yang mesti tidak seadil-adilnya seperti Tuhan, tetapi minimal dapat mendekati keadilan yang sebenarnya. (Media Indonesia/Kamis, 9 Maret 2006)
- (7) Dengan segera kita menengok ke **belakang** dan ke samping. Pertamina yang berdiri tahun 1968 merger Pertamina dan Pertamina hingga kini cuma memiliki tujuh kilang. Ladang-ladang minyak kita lebih banyak dikelola secara konsesi dan production sharing contract dengan perusahaan-perusahaan asing. Hasilnya langsung diekspor dalam bentuk crude oil, sehingga untuk kebutuhan baban bakar minyak kita dipenuhi dengan cara impor. Ketika kebutuhan energi terus meningkat dan harga minyak dunia melambung, kita kelabakan. Kita hanya mendapatkan royalti dan:pajak belaka. Nilainya sangat kecil. Selain itu, kontrol Indonesia terhadap perusahaan asing itu pun sangat lemah. Lagi pula, tak ada alih teknologi dan keahlian. (Republika/9 Maret 2006)
- (8) Nasib kepala desa sejak Orde Lama hingga Era Reformasi hampir tidak pernah berubah. Mereka tidak pernah menjadi subjek, tetapi selalu menjadi objek pemerintahan. Padahal, mereka adalah ujung tombak pemerintahan di tataran paling bawah. Bagaimana rakyat bisa **maju** kalau kepala desa dan perangkat desanya saja tidak diperhatikan nasibnya. (Suara Pembaharuan/Kamis, 9 Maret 2006)
- (9) Beberapa kali sudah DPR menggunakan hak interpelasi itu. Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai masalah busung lapar dan polio. Perkara ini menjadi hangat bukan menyangkut jawaban pemerintah atas materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung. (Media Indonesia/Jumat/ 9-3-2006)
- (10) **Sapu kotor** tidak pernah bisa membersihkan lantai. Bahkan, sebaliknya lantai yang kotor bila tersentuh dengan sapu kotor akan kotor dan najis. Itu adalah perumpamaan bila kita masuk lingkungan para penegak hukum yang tidak ber-

jiwa suci dan tidak mengemban panji-panji keadilan. Alih-alih tangan kita semakin bersih, malahan tangan kita ikut berbau kotoran. (Media Indonesia/Kamis, 9 Maret 2006)

Konstituen *mendorong* pada wacana (1) menunjukkan gerakan arah yang berlawanan dengan konstituen *menarik* pada wacana (2). Konstituen *barat* pada wacana (3) menunjukkan gerakan arah yang berlawanan dengan konstituen *timur* pada wacana (4). Konstituen *atas* pada wacana (5) menunjukkan gerakan arah yang berlawanan dengan konstituen *bawah* pada wacana (6). Sementara itu, konstituen *belakang* pada wacana (7) menunjukkan gerakan arah yang berlawanan dengan konstituen *depan*. Konstituen *maju* pada wacana (8) menunjukkan gerakan arah yang berlawanan dengan konstituen *mundur*. Konstituen *ini* pada wacana (9) menunjukkan gerakan arah yang berlawanan dengan konstituen *itu* pada wacana (10).

Jika diamati, konstituen-konstituen yang beroposisi kebalikan pada (1–10) terlihat bahwa kategori kelas kata konstituen-konstituen tersebut berbeda. Konstituen *mendorong* pada wacana (1), *menarik* pada wacana (2), dan konstituen *maju* pada wacana (8) berkategori verba. Konstituen *barat* pada wacana (3), konstituen *timur* pada wacana (4), konstituen *atas* pada wacana (5), konstituen *bawah* pada wacana (6), dan konstituen *belakang* pada wacana (7) berkategori nomina. Sementara itu, konstituen *ini* pada wacana (9) dan konstituen *itu* pada wacana (10) berkategori pronomina penunjuk.

3.3.4 Oposisi Hierarkis (Berdaur)

Opisisi hierarkis (berdaur atau berjenjang) mengandung ciri adanya urutan tingkatan atau jenjang, baik keberjenjangan penamaan hari maupun bulan, seperti yang dicontohkan berikut ini.

- (1) *Ancaman terakhir disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Shaul Mofaz, Selasa (7/3), sehari setelah Israel melancarkan serangan terhadap truk es krim di Gaza City yang menewaskan dua anggota Jihad Islam, tiga warga yang ada di dekat sasaran, dua di antaranya anak-anak.* (Kompas/Selasa, 9 Maret 2006/Hal. 6)

- (2) *Ribuan kepala desa dari beberapa provinsi berunjuk rasa di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (5/3). Mereka menuntut agar nasib mereka diperbaiki. Jalan untuk perbaikan itu adalah segera merevisi pasal-pasal dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah NO 72 Tahun 2005. (Suara Pembaharuan/Kamis, 9 Maret 2006)*
- (3) *Dua kecelakaan kereta api yang melayani angkutan umum di Jabodetabek terjadi dua hari berturut-turut akhir pekan lalu. Kejadian pertama, Jumat (3/3). Atap gerbong keempat KRD 907 jurusan Rangkasbitung–Tanah Abang runtuh. Puluhan penumpang di atas atap berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari atap. Akibatnya, puluhan penumpang cedera. (Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)*
- (4) *Sehari kemudian, Sabtu (4/3), kecelakaan menimpa kereta api listrik (KRL) 531 jurusan Bogor–Jakarta. Saat memasuki Stasiun Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat, mendadak kabel aliran listrik atas KRL jatuh akibat tersangkut pantograf. Penumpang di atap panik. Mereka berusaha melompat untuk menyelamatkan diri pada saat kereta masih berjalan. Dua penumpang dipastikan tewas di tempat kejadian, yang satu akibat tersengat arus listrik, dan yang lain akibat pendarahan di kepalanya. (Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)*
- (5) *Isu kesenjangan kemakmuran dijadikan fokus utama pertemuan tahunan Kongres Rakyat Nasional China, yang dibuka hari Minggu 5 Maret lalu. (Kompas/Selasa, 7 Maret 2006/Hal. 6)*
- (6) *Kemenangan organisasi militan Hamas dalam pemilu parlemen Palestina bulan Januari lalu rupanya masih terus menggelisahkan Israel. (Kompas/Selasa, 9 Maret 2006/Hal. 6)*
- (7) *Perda yang dikeluarkan Gubernur Sutiyoso pada 4 Februari 2005 itu memang menuntut kedisiplinan semua pihak, terutama kedisiplinan para perokok. Adalah hak setiap orang untuk menikmati udara segar di Ibukota. Karena itulah, perokok tidak bisa sembarangan membakar tembakau di sembarang tempat. Mereka harus bisa mengendalikan diri dan menghargai orang lain yang tidak merokok. (Suara Pembaharuan/Kamis, 7 Maret 2006)*
- (8) *Seminggu terakhir ini, Jakarta benar-benar pesta jazz. Dimulai dari 19 konser di universitas, klub musik, kafe, mal,*

hotel, dan pusat hiburan dengan judul "Java jazz on the Move", berakhir dengan digelarnya "Jakarta International Java Jazz Festival" (JIJF) pada 3-5 Maret di Jakarta Convention Center (JCC). (Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)

- (9) Pada zaman Soeharto, izin diberikan hanya kepada kalangan dekat Istana. Setelah itu, izin prinsip penyiaran dan frekuensi dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan dan Departemen Penerangan. Proses seleksinya tidak banyak diketahui. Kondisi ini berlangsung sampai Departemen Penerangan dibubarkan pada Oktober 1999. (Tempo/Senin, 6 Maret 2006/Hal. A2)

Pada wacana (1–5) terdapat konstituen yang berposisi hierarkis (berdaur atau berjenjang), yaitu kehierarkisan nama hari, seperti nomina *Selasa* pada wacana (1) yang kemudian berjenjang ke nomina *Rabu* pada wacana (2), nomina *Jumat* pada wacana (3), nomina *Sabtu* pada wacana (4), dan nomina *Minggu* pada wacana (5).

Pada wacana (6–9) terdapat konstituen yang berposisi hierarkis (berdaur atau berjenjang), yaitu kehierarkisan nama bulan yang dimulai dengan nomina *Januari* pada wacana (5) yang kemudian berjenjang ke nomina *Februari* pada wacana (7), nomina *Maret* pada wacana (8), dan nomina *Oktober* pada wacana (9).

3.4 Kehiponiman (Hubungan Atas-Bawah)

Kehiponiman (hiponimi) adalah hubungan inklusi. Hiponimi mengacu pada hubungan vertikal dari taksonomi (Saeed, 2000). Saeed menyamakan istilah hiponimi dengan hipernimi (superordinasi). Pendapat ini berbeda dengan Cruse (1986) yang menjelaskan bahwa jika X adalah hiponim dari Y, Y adalah hipernim dari X. Seperti *dog* 'anjing' dan *cat* 'kucing' merupakan hiponim dari *animal* 'hewan'.

Kehiponiman ini merupakan hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Kehiponiman mempunyai hubungan makna leksikal yang bersifat hierarkis antara suatu konstituen dan konstituen yang lain. Halliday dan Hasan (1989:80) menyatakan bahwa relasi makna terlihat pada hubungan antara konstituen yang memiliki makna yang khusus.

- (1) (a) **Perumahan** memang menjadi salah satu problem bangsa. (b) Masih ada jutaan masyarakat yang belum memiliki rumah tinggal. (c) Sebagian menumpang, ada yang menempati **rumah bedeng**, ada yang terjubel di **rumah karton**, ada yang keteteran di pinggir jalan, ada yang menempati **rumah gerobak**, dll. (Republika/Jumat/ 10 Maret 2006)
- (2) (a) Pada 1998, Cemex membeli 25,5 persen saham **PT Semen Gresik**, perusahaan **BUMN** semen Indonesia, yang juga holding dan **PT Semen Tonasa** dan **PT Semen Padang**. (b) Dalam transaksi itu, Cemex memiliki pula hak untuk menjadi pemegang saham mayoritas pada 2001. (c) Namun, ketika Cemex ingin menggunakan hak itu, pemerintah sebagai pemilik 51 persen saham **Semen Gresik**, justru menolak menjual sahamnya. (d) Dua anak perusahaan **Semen Gresik** malah berniat melakukan memisahkan diri jika Cemex benar-benar menjadi pemegang saham mayoritas. (Republika/7 MARET 2006)
- (3) (a) Dua kecelakaan **kereta api** pekan lalu dan empat orang yang tewas membuktikan bahwa **alat transportasi massal** itu sudah tak mampu mengatasi membeludaknya penumpang. Ratusan orang harus berjejal setiap hari di **atap gerbong** kereta api **Jabotabek**. (b) Mereka yang menyabung nyawa di **atap kereta** adalah bagian dari 600 ribu orang yang menggunakan jasa kereta komuter **Jabotabek**. **PT Kereta Api Indonesia** sekarang ini hanya mampu menyediakan 480 **gerbong**. Untuk mencapai angka yang ideal, **PT Kereta Api Indonesia** perlu menambahkan 120 **gerbong** lagi. Tak mudah memecahkan masalah ini. (c) Tidak mungkin ada penambahan **gerbong** tanpa ada tambahan rel. Saat ini, hanya **Jakarta-Bogor** yang sudah menggunakan rel **ganda**. **Bekasi Jakarta** sudah memiliki jalur rel **ganda**, tapi frekuensi kereta **Jabotabek** yang lewat masih rendah karena harus bergantian dengan kereta jarak jauh. Sementara itu, **Jakarta-Serpong** masih **rel tunggal**. Dengan kapasitas rel yang ada, frekuensi perjalanan baru mencapai 20 menit sekali. (Tempo/Selasa, 7 Maret 2006/Hal. A2)
- (4) (a) Yang menjadi persoalan, keinginan untuk berjudi juga didorong fasilitas yang ada. (b) Saat ini masih cukup banyak arena untuk judi, baik untuk kelas bawah dengan **togel**,

hingga kelas atas seperti permainan *rollet* dengan berbagai versi, **blackjack**, hingga pertandingan olahraga pun menjadi ajang taruhan. (c) Di mata penjudi, sepertinya tidak ada permainan tanpa taruhan. (d) Itulah yang menyebabkan kehancuran kepribadian seseorang, juga masyarakat. (Suara Pembaharuan/Jumat, 10 Maret 2006)

- (5) (a) *Seminggu terakhir ini, Jakarta benar-benar pesta jazz.* (b) *Dimulai dari 19 konser di universitas, klub musik, kafe, mal, hotel, dan pusat hiburan dengan judul "Java jazz on the Move", berakhir dengan digelarnya "Jakarta International Java Jazz Festival" (JIJF) pada 3-5 Maret di Jakarta Convention Center (JCC).* (Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)

Konstituen *perumahan* pada (1a) tergolong sebagai hiponim atau kata yang mempunyai lingkungan dalam struktur makna konstituen *rumah bedeng*, *rumah karton*, dan *rumah gerobak* pada (1c). Jadi, konstituen *perumahan* merupakan superordinat yang memayungi hiponim-hiponimnya—dalam hal ini— *rumah bedeng*, *rumah karton*, dan *rumah gerobak*.

Konstituen *perusahaan BUMN semen Indonesia* pada (2a) tergolong sebagai hiponim atau kata yang mempunyai lingkungan dalam struktur makna dari konstituen *PT Semen Gresik*, *PT Semen Tonasa*, dan *PT Semen Padang* pada (2a). Jadi, konstituen *perusahaan BUMN semen Indonesia* merupakan superordinat yang memayungi hiponim-hiponimnya—dalam hal ini— konstituen *PT Semen Gresik*, *PT Semen Tonasa*, dan *PT Semen Padang*.

Konstituen *kereta api* pada (3a) tergolong sebagai hiponim dari konstituen *alat transportasi massal itu* pada (3a), *atap gerbong* pada (3a) dan (3b), *gerbong* pada (3b) dan (3c), *rel* pada (3c), *rel ganda* pada (3c), dan *rel tunggal* pada (3c). Jadi, konstituen *kereta api* merupakan superordinat yang memayungi hiponim-hiponimnya—dalam hal ini—konstituen *alat transportasi massal itu*, *atap gerbong*, *gerbong*, *rel*, *rel ganda*, dan *rel tunggal*.

Konstituen *judi* pada (4a) tergolong sebagai hiponim dari konstituen *togel*, *rollet*, dan *blackjack* pada (4b). Jadi, konstituen *judi* merupakan superordinat yang memayungi hiponim-hiponimnya—dalam hal ini—konstituen *togel*, *rollet*, dan *blackjack*.

Konstituen *pusat hiburan* pada (5b) tergolong sebagai hiponim dari konstituen *klub musik, kafe, mal, hotel* pada (5b). Jadi, konstituen *pusat hiburan* merupakan superordinat yang memayungi hiponim-hiponimnya—dalam hal ini—konstituen *klub musik, kafe, mal, hotel*.

3.5 Kameroniman

Kameroniman adalah konsep yang mengacu pada hubungan bagian-seluruh, seperti hubungan antara *rumah, ruang tamu, ruang tidur, dapur, dan gudang*. *Rumah* memiliki hubungan keseluruhan yang memayungi hubungan bagiannya, seperti *ruang tamu, ruang tidur, dapur, dan gudang* (Puryadi, 2006:187). Sejalan dengan pernyataan itu, Halliday dan Hasan (1989:81) menyatakan bahwa meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Sementara itu, Saeed (2000) menyatakan bahwa kameroniman atau meronimi tergolong istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan bagian-keseluruhan antarunsur leksikal. Pernyataan Saeed ini sesuai dengan asal kata *meronim* yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meros* 'bagian' dan *onima* 'nama'. Misalnya, *page* 'halaman' adalah meronim dari *book* 'buku'. Sementara itu, Cruse (1996) mengaitkan istilah *meronim* dengan *holonimi*. Jika X adalah meronim dari Y, Y adalah holonim dari X. Istilah ini juga berasal dari bahasa Yunani *holos* 'keseluruhan'. Misalnya, *book* 'buku' adalah holonim dari *page* 'halaman'. Dari ulasan itu, hubungan kameroniman dapat diklasifikasikan menjadi (1) holonim-meronim dan (2) meronim dan holonim. Holonim merupakan unsur yang menjadi bagian keseluruhan dan meronim merupakan unsur yang menjadi bagian. Berikut ini dicontohkan kameroniman yang berkonstruksi holonim-meronim, seperti pada wacana (1–7) berikut ini.

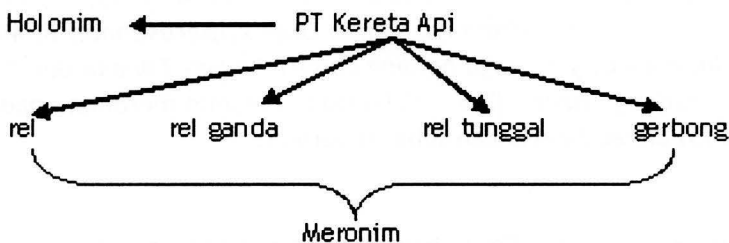
- (1) (a) Mereka yang menyabung nyawa di atap kereta adalah bagian dari 600 ribu orang yang menggunakan jasa kereta komputer Jabotabek. (b) PT Kereta Api Indonesia sekarang ini hanya mampu menyediakan 480 gerbong. (c) Untuk mencapai angka yang ideal, PT Kereta Api Indonesia perlu menambah 120 gerbong lagi. Tak mudah memecahkan masalah ini. (Tempo/Selasa, 7 Maret 2006/Hal. A2)

- (2) (a) Tidak mungkin ada penambahan gerbong tanpa ada tambahan rel. (b) Saat ini, hanya Jakarta-Bogor yang sudah menggunakan **rel ganda**. (c) Bekasi Jakarta sudah memiliki jalur **rel ganda**, tapi frekuensi kereta Jabotabek yang lewat masih rendah karena harus bergantian dengan kereta jarak jauh. (d) Sementara itu, Jakarta-Serpong masih **rel tunggal**. (e) Dengan kapasitas rel yang ada, frekuensi perjalanan baru mencapai 20 menit sekali. (Tempo/Selasa, 7 Maret 2006/Hal. A2)
- (3) (a) Mereka yang menyabung nyawa di atap kereta adalah bagian dari 600 ribu orang yang menggunakan jasa kereta komputer Jabotabek. (b) PT Kereta Api Indonesia sekarang ini hanya mampu menyediakan 480 gerbong. (c) Untuk mencapai angka yang ideal, PT Kereta Api Indonesia perlu menambah 120 **gerbong** lagi. Tak mudah memecahkan masalah ini. (Tempo/Selasa, 7 Maret 2006/Hal. A2)
- (4) (a) **Direksi baru Pertamina** itu dilantik kemarin. (b) Mereka adalah **Komisaris Utama J Purwono, Direktur Utama Ari Soemarno, Wakil Direktur Utama lin Arifin Takhyhan, Direktur Pengolahan Suroso Atmomartoyo; Direktur Keuangan Fredefick ST Siahaan, Direktur Umum Sukusen Soernarinda, Direktur Pemasaran Achmad Faisal, serta Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Soni Sumarsono**. (Media Indonesia/Kamis/9-3-2006)
- (5) (a) Pada 1998, Cemex membeli 25,5 persen saham **PT Semen Gresik, perusahaan BUMN semen Indonesia**, yang juga holding dan **PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang**. (b) Dalam transaksi itu, Cemex memiliki pula hak untuk menjadi pemegang saham mayoritas pada 2001. (c) Namun, ketika Cemex ingin menggunakan hak itu, pemerintah sebagai pemilik 51 persen saham Semen Gresik, justru menolak menjual sahamnya. (d) Dua anak perusahaan Semen Gresik malah berniat melakukan memisahkan diri jika Cemex benar-benar menjadi adi pemegang saham mayoritas. (Republika/7 MARET 2006)
- (6) (a) Dampak kekeringan panjang yang diperkirakan akan berlanjut sampai awal Februari 2007 memang luar biasa. (b) **Hewan ternak seperti domba, keledai, sapi, dan unta juga**

terancam, dan mulai mati dalam kecepatan yang memunculkan. (Kompas/Selasa, 8 Maret 2006/Hal. 6)

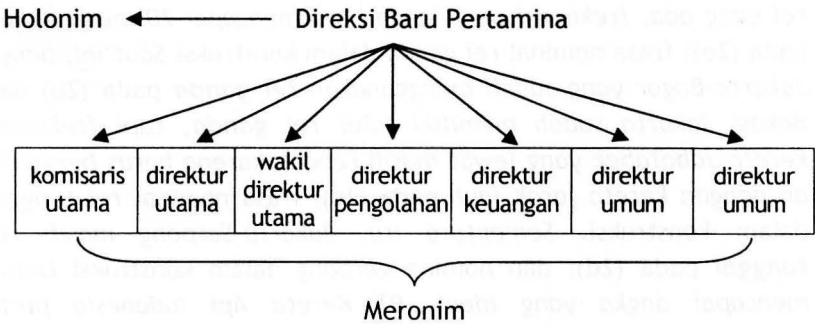
- (7) (a) **Bencana kekeringan dan kelaparan** di berbagai negara Afrika sering diperburuk oleh **bahaya kekerasan, konflik sosial, perang saudara, dan wabah penyakit**. (b) **Krisis ekologi juga luar biasa**. (Kompas/Selasa, 8 Maret 2006/Hal. 6)

Nomina *rel* dalam konstruksi *Tidak mungkin ada penambahan gerbong tanpa ada tambahan rel* pada (2a) dan *Dengan kapasitas rel yang ada, frekuensi perjalanan baru mencapai 20 menit sekali* pada (2e); frasa nominal *rel ganda* dalam konstruksi *Saat ini, hanya Jakarta-Bogor yang sudah menggunakan rel ganda* pada (2b) dan *Bekasi Jakarta sudah memiliki jalur rel ganda, tapi frekuensi kereta Jabotabek yang lewat masih rendah karena harus bergantian dengan kereta jarak jauh* pada (2c); frasa nominal *rel tunggal* dalam konstruksi. *Sementara itu, Jakarta-Serpong masih rel tunggal* pada (2d); dan nomina *gerbong* dalam konstruksi *Untuk mencapai angka yang ideal, PT Kereta Api Indonesia perlu menambah 120 gerbong lagi* pada (3c) merupakan meronim dari holonim yang berupa frasa nominal *PT Kereta Api* dalam konstruksi *PT Kereta Api Indonesia sekarang ini hanya mampu menyediakan 480 gerbong* pada (1b). Hubungan holonim-meronim pada wacana (1–3) dapat dibayangkan sebagai berikut.

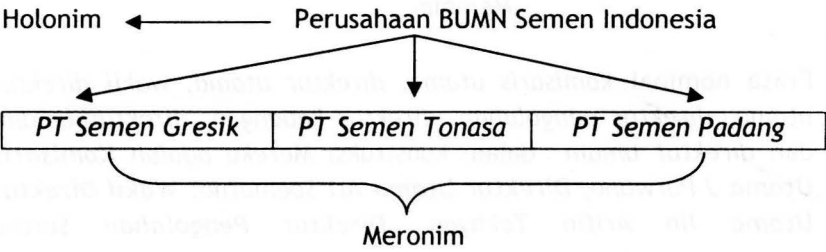


Frasa nominal *komisaris utama, direktur utama, wakil direktur utama, direktur pengolahan, direktur keuangan, direktur umum, dan direktur umum* dalam konstruksi *Mereka adalah Komisaris Utama J Purwono, Direktur Utama Ari Soemarno, Wakil Direktur Utama Iin Arifin Takhyhan, Direktur Pengolahan Suroso*

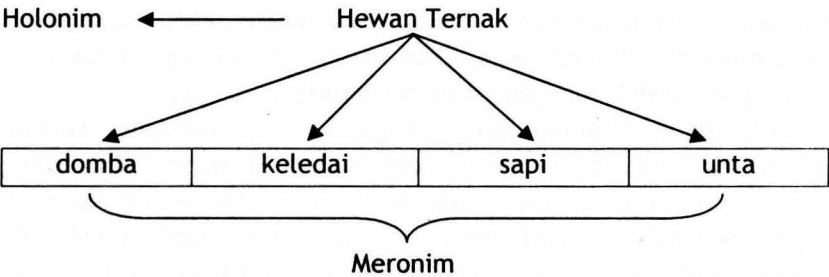
Atmomartoyo; *Direktur Keuangan* Fredefick ST Siahaan, *Direktur Umum* Sukusen Soernarinda, *Direktur Pemasaran* Achmad Faisal, serta *Direktur Umum* dan *Sumber Daya Manusia* Soni Sumarsono pada (4b) merupakan meronim dari holonim yang berupa frasa nominal *Direksi Baru Pertamina* dalam konstruksi *Direksi baru Pertamina* itu dilantik kemarin pada (4a). Hubungan holonim-meronim pada wacana (4) dapat dibayangkan sebagai berikut.



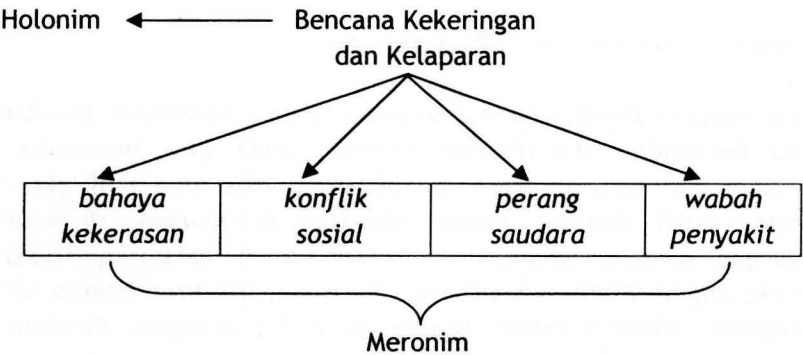
Frasa nominal *PT Semen Gresik*, *PT Semen Tonasa*, dan *PT Semen Padang* dalam konstruksi *Pada 1998, Cemex membeli 25,5 persen saham PT Semen Gresik, perusahaan BUMN semen Indonesia, yang juga holding dan PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang* pada (5a) merupakan meronim dari holonim frasa nominal *perusahaan BUMN semen Indonesia* dalam *Pada 1998, Cemex membeli 25,5 persen saham PT Semen Gresik, perusahaan BUMN semen Indonesia, yang juga holding dan PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang* pada (5a). Hubungan holonim-meronim pada wacana (5) dapat dibayangkan sebagai berikut.



Nomina *domba*, *keledai*, *sapi*, dan *unta* dalam konstruksi *Hewan ternak seperti domba, keledai, sapi, dan unta juga terancam, dan mulai mati dalam kecepatan yang mencemaskan* pada (6b) merupakan meronim dari holonim frasa nominal *hewan ternak* dalam konstruksi *Hewan ternak seperti domba, keledai, sapi, dan unta juga terancam, dan mulai mati dalam kecepatan yang mencemaskan* pada (6b). Hubungan holonim-meronim pada wacana (6) dapat dibagangkan sebagai berikut.

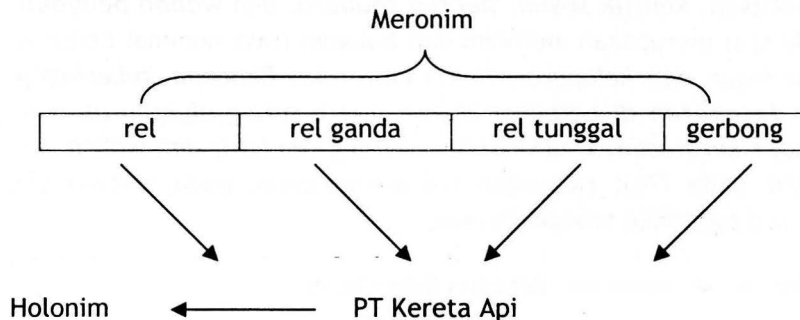


Frasa nominal *bahaya kekerasan, konflik sosial, perang saudara, dan wabah penyakit* dalam konstruksi *Bencana kekeringan dan kelaparan di berbagai negara Afrika sering diperburuk oleh bahaya kekerasan, konflik sosial, perang saudara, dan wabah penyakit* pada (7a) merupakan meronim dari holonim frasa nominal *Bencana kekeringan dan kelaparan* dalam konstruksi *Bencana kekeringan dan kelaparan di berbagai negara Afrika sering diperburuk oleh bahaya kekerasan, konflik sosial, perang saudara, dan wabah penyakit* pada (7a). Hubungan holonim-meronim pada wacana (7) dapat dibagangkan sebagai berikut.



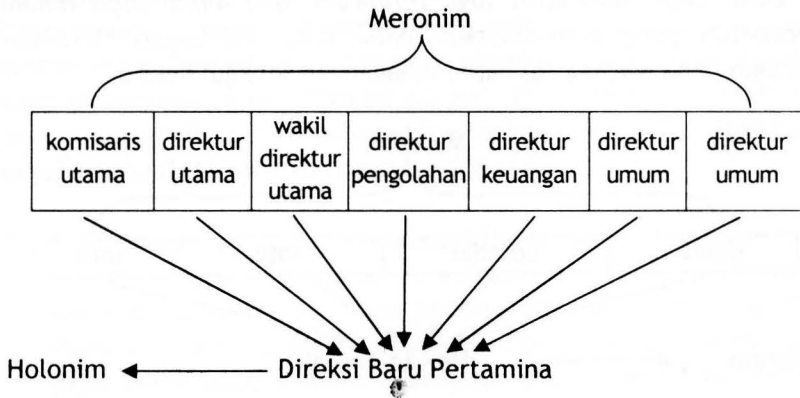
Sebaliknya, kemeroniman dapat pula berkonstruksi meronim-holonim. Artinya, hubungan bagian yang mendahului keseluruhan. Contoh bahasan untuk konstruksi kemeroniman seperti itu dapat diacu contoh wacana (1–7) pada 3.5.

Konstituen *PT Kereta Api* dalam konstruksi *PT Kereta Api Indonesia sekarang ini hanya mampu menyediakan 480 gerbong* pada (1b) merupakan meronim dari holonim nomina *rel* dalam konstruksi *Tidak mungkin ada penambahan gerbong tanpa ada tambahan rel* pada (2a) dan *Dengan kapasitas rel yang ada, frekuensi perjalanan baru mencapai 20 menit sekali* pada (2e); frasa nominal *rel ganda* dalam konstruksi *Saat ini, hanya Jakarta-Bogor yang sudah menggunakan rel ganda* pada (2b) dan *Bekasi Jakarta sudah memiliki jalur rel ganda, tapi frekuensi kereta Jabotabek yang lewat masih rendah karena harus bergantian dengan kereta jarak jauh* pada (2c); frasa nominal *rel tunggal* dalam konstruksi *Sementara itu, Jakarta-Serpong masih rel tunggal* pada (2d); dan nomina *gerbong* dalam konstruksi *Untuk mencapai angka yang ideal, PT Kereta Api Indonesia perlu menambah 120 gerbong lagi* pada (3c). Hubungan meronim-holonim pada wacana (1–3) dapat dibagikan sebagai berikut.

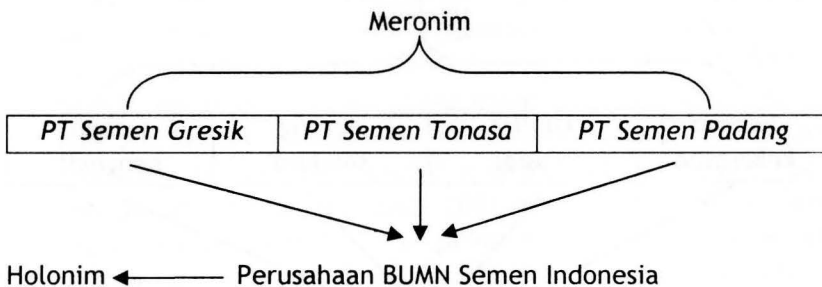


Frasa nominal *Direksi baru Pertamina* dalam konstruksi *Direksi baru Pertamina itu dilantik kemarin* pada (4a) merupakan meronim dari holonim frasa nominal *komisaris utama, direktur utama, wakil direktur utama, direktur pengolahan, direktur keuangan, direktur umum, dan direktur umum* dalam konstruksi *Mereka adalah Komisaris Utama J Purwono, Direktur Utama Ari Soemarno, Wakil Direktorat Utama Iin Arifin Takhyhan, Direktur*

Pengolahan Suroso Atmomartoyo; Direktur Keuangan Fredefick ST Siahaan, Direktur Umum Sukusen Soernarinda, Direktur Pemasaran Achmad Faisal, serta Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Soni Sumarsono pada (4b). Hubungan meronim-holonim pada wacana (4) dapat dibagikan sebagai berikut.

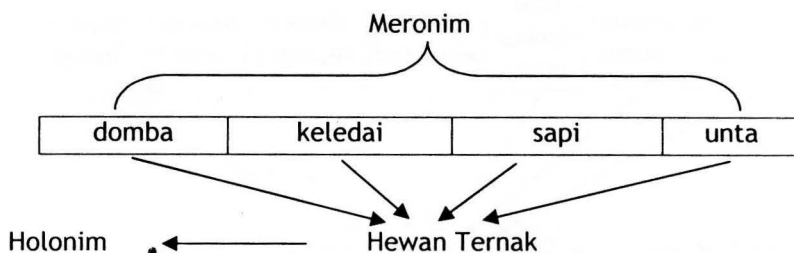


Frasa nominal perusahaan BUMN semen Indonesia dalam konstruksi Pada 1998, Cemex membeli 25,5 persen saham PT Semen Gresik, perusahaan BUMN semen Indonesia, yang juga holding dan PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang pada (5a) merupakan meronim dari holonim frasa nominal PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, dan PT Semen Padang dalam konstruksi Pada 1998, Cemex membeli 25,5 persen saham PT Semen Gresik, perusahaan BUMN semen Indonesia, yang juga holding dan PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang pada (5a). Hubungan meronim-holonim pada wacana (5) dapat dibagikan sebagai berikut.

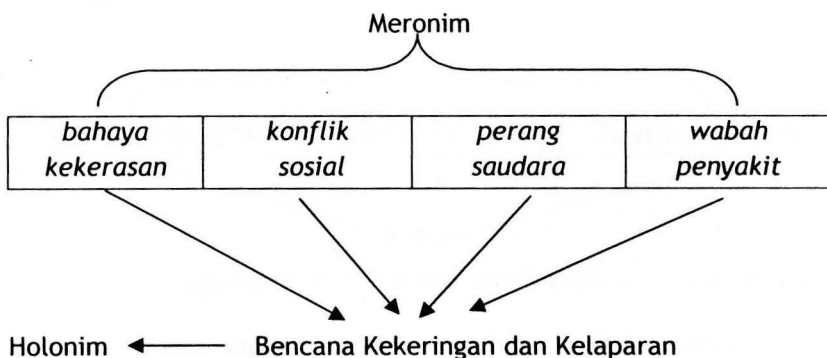


Frasa nominal dalam konstruksi **Hewan ternak** seperti domba, keledai, sapi, dan unta juga terancam, dan mulai mati dalam

kecepatan yang mencemaskan pada (6b) merupakan meronim dari holonim nomina *domba*, frasa nominal *keledai*, nomina *sapi*, dan nomina *unta juga terancam*, dan mulai mati dalam kecepatan yang mencemaskan dalam konstruksi *Hewan ternak seperti domba, keledai, sapi, dan unta juga terancam*, dan mulai mati dalam kecepatan yang mencemaskan pada (6b). Hubungan Meronim-holonim pada wacana (6) dapat dibagangkan sebagai berikut.



Frasa nominal *Bencana kekeringan dan kelaparan* dalam konstruksi *Bencana kekeringan dan kelaparan di berbagai negara Afrika sering diperburuk oleh bahaya kekerasan, konflik sosial, perang saudara, dan wabah penyakit* pada (7a) merupakan meronim dari holonim frasa nominal *bahaya kekerasan, konflik sosial, perang saudara, dan wabah penyakit* dalam konstruksi *Bencana kekeringan dan kelaparan di berbagai negara Afrika sering diperburuk oleh bahaya kekerasan, konflik sosial, perang saudara, dan wabah penyakit* pada (7a). Hubungan meronim pada wacana (7) dapat dibagangkan sebagai berikut.



3.6 Keparoniman

Keparoniman (paronimi) mengacu pada hubungan antara satu kata dengan kata lainnya dari kategori sintaktis yang berbeda dan dibentuk melalui proses derivasi (Cruse 1996). Misalnya, adjektiva *long* ‘panjang’ dengan verba *lengthen* ‘memanjangkan’. Pemakaian paronimi dapat dilihat pada contoh berikut ini.

- (1) (a) *Belajar dari pengalaman itu, kita berharap pemimpin TNI dan Polri terus melakukan koordinasi agar bentrok semacam ini bisa dihindari.* (b) *Sikap proaktif para pemimpin TNI dan Polri di Ambon telah mencegah meluasnya bentrokan itu.* (c) *juga telah memutuskan agar para pelaku diproses secara hukum sambil terus melakukan konsolidasi internal agar masalah itu tidak meluas.* (d) *Sebab, yang harus menanggung akibatnya justru masyarakat.* (e) *Kita menyesalkan penyelesaian persoalan pribadi dengan senjata yang seharusnya **digunakan** untuk menjaga keamanan negara itu.* (Republika/7 MARET 2006)
- (2) (a) *Apapun, yang jelas, bagi pemerintah paket tersebut merupakan jawaban terhadap tuntutan dunia usaha untuk perbaikan iklim investasi.* (b) *Paket ini diharapkan mampu meningkatkan kegiatan investasi **guna** mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.* (Republika/7 MARET 2006)
- (3) (a) *Pada 1998, Cemex membeli 25,5 persen saham PT Semen Gresik, perusahaan BUMN semen Indonesia, yang juga holding dan PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang.* (b) *Dalam transaksi itu, Cemex memiliki pula hak untuk menjadi pemegang saham mayoritas pada 2001.* (c) *Namun, ketika Cemex ingin **menggunakan** hak itu, pemerintah sebagai pemilik 51 persen saham Semen Gresik, justru menolak menjual sahamnya.* (d) *Dua anak perusahaan Semen Gresik malah berniat melakukan memisahkan diri jika Cemex benar-benar menjadi pemegang saham mayoritas.* (Republika/7 MARET 2006)
- (4) (a) *Namun, pemerintah dan parlemen China **cepat** bertindak untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.* (b) *Sudah terbayang betapa China benar-benar akan tampil perkasa jika telal memakmurkan seluruh lapisan rakyatnya.* (c) *Lebih-lebih lagi*

- kalau diperkuat oleh demokratisasi dalam bidang politik. (Kompas/Selasa, 7 Maret 2006/Hal. 6)
- (5) (a) Pemerintah juga harus **mempercepat** pembangunan rel ganda. (b) Ini memang tanggung jawab pemerintah. (c) Ketika Menteri Hatta mengatakan pembangunan rel ganda terlambat 10 tahun, itu hanya menegaskan bahwa pemerintah tak pernah serius membenahi angkutan umum. (e) Padahal kereta api yang memadai bisa menjadi solusi berbagai masalah Ibu Kota, termasuk kemacetan dan polusi. (Tempo/Selasa, 7 Maret 2006/Hal. A2)
- (6) Dampak kekeringan panjang yang diperkirakan akan berlanjut sampai awal Februari 2007 memang luar biasa Hewan ternak seperti domba, keledai, sapi, dan unta juga terancam, dan mulai mati dalam **kecepatan** yang mencemaskan. (Kompas/Selasa, 8 Maret 2006/Hal. 6)
- (7) (a) Kenapa kok mereka ikut-ikutan mujur? (b) Ya, karena mereka **hidup** di negeri nyiur melambai, Indonesia tercinta. (c) Dihukum berat sekalipun paling cuma kena berapa tahun. (d) Coba kalau mereka **hidup** di China. (7e) Pasti sudah wassalam. (Media Indonesia/Kamis, 9 Maret 2006)
- (8) (a) Berbeda dengan periode sebelumnya, DPR sekarang relatif tergolong gencar mengkritik pemerintah. (b) Ini perkara yang bagus bagi **kehidupan** demokrasi karena memang tugas DPR mengontrol pemerintah. (Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)
- (9) (a) Isi surat Agung Laksono ialah bahwa presiden dapat mewakili kepada menteri untuk menjawab hak interpelasi DPR. (b) Dan benar yang menjawab perihal busung lapar dan polio di DPR adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Bukan presiden sendiri. (c) **Kritik** anggota pun meluncur ke arah Ketua DPR. Untuk apa menggunakan hak interpelasi dan sidang paripurna jika yang menjawab menteri? (d) Bukankah interpelasi ditujukan kepada presiden? (e) Kalau urusannya ke menteri, cukup rapat kerja dengan komisi dan tidak perlu menggelar rapat paripurna. (Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)
- (10) (a) Berbeda dengan periode sebelumnya, DPR sekarang relatif tergolong gencar **mengkritik** pemerintah. (b) Ini perkara yang bagus bagi kehidupan demokrasi karena memang tugas DPR mengontrol pemerintah. (Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)

- (11) (a) *Di Indonesia, sarana judi masih banyak dijumpai.* (b) *Mulai dari tukang becak hingga permainan untuk kalangan atas.* (c) *Mengapa itu bisa berkembang?* (d) *Tentu saja karena hukum sepertinya tidak berdaya untuk merengkuhnya.* (e) *Ada tangan-tangan kuat tak terlihat yang terus mendorong praktik perjudian, sekaligus mengisi pundi-pundi uangnya menjadi berlimpah.* (f) *Siapa pun tahu, uang tidak berbicara tetapi sangat berkuasa.* (Suara Pembaharuan/Jumat, 10 Maret 2006)
- (12) (a) *Inti kecaman bahwa Ketua DPR telah merendahkan posisi parlemen.* (b) *Bahkan, dianggap telah bersekongkol dengan eksekutif untuk menggagalkan hak interpelasi.* (c) *Sebuah pernyataan yang memperkuat penilaian bahwa DPR cuma tukang stempel pemerintah.* (Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)
- (13) (a) *Yang kita perlukan saat ini adalah upaya mengisi RUU APP, bukan menggagalkannya.* (b) *Kalau ada materi yang dianggap mengganggu, mari kita bicarakan di DPR.* (c) *Jangan membakar rumah hanya untuk mencari tikus. Jadikan RUU ini sebagai produk inklusif.* (d) *Kita yakin tak ada agama, kekuatan moral apapun, yang membenarkan pornografi.* (Republika/8 Maret 2006)

Verba pasif digunakan dalam konstruksi *Kita menyesalkan penyelesaian persoalan pribadi dengan senjata yang seharusnya digunakan* untuk menjaga keamanan negara itu pada (2e) dan verba aktif menggunakan dalam konstruksi *Namun, ketika Cemex ingin menggunakan hak itu, pemerintah sebagai pemilik 51 persen saham Semen Gresik, justru menolak menjual sahamnya* pada (3c) merupakan derivasi dari nomina *guna* dalam konstruksi *Paket ini diharapkan mampu meningkatkan kegiatan investasi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan* pada (1b).

Verba aktif mempercepat dalam konstruksi *Pemerintah juga harus mempercepat pembangunan rel ganda* pada (5a) dan nomina *kecepatan* dalam konstruksi *Dampak kekeringan panjang yang diperkirakan akan berlanjut sampai awal Februari 2007 memang luar biasa Hewan ternak seperti domba, keledai, sapi, dan unta juga*

terancam, dan mulai mati dalam **kecepatan** yang mencemaskan pada (6) merupakan derivasi dari adjektiva *cepat* dalam konstruksi *Namun, pemerintah dan parlemen China **cepat** bertindak untuk mengurangi ketimpangan ekonomi* pada (4a).

Nomina *kehidupan* dalam konstruksi *Ini perkara yang bagus bagi **kehidupan** demokrasi karena memang tugas DPR mengontrol pemerintah* pada (8b) merupakan derivasi dari verba *hidup* dalam konstruksi *Ya, karena mereka **hidup** di negeri nyiur melambai, Indonesia tercinta* pada (7c) dan *Coba kalau mereka **hidup** di China* pada (7d).

Verba **mengkritik** dalam konstruksi *Berbeda dengan periode sebelumnya, DPR sekarang relatif tergolong gencar **mengkritik** pemerintah* pada (10a) merupakan derivasi dari nomina *kritik* dalam konstruksi ***Kritik** anggota pun meluncur ke arah Ketua DPR. Untuk apa menggunakan hak interpelasi dan sidang paripurna jika yang menjawab menteri?* pada (9c).

Verba aktif **memperkuat** dalam konstruksi *Sebuah pernyataan yang **memperkuat** penilaian bahwa DPR cuma tukang stempel pemerintah* pada (12c) dan nomina *kekuatan* dalam konstruksi (d) *Kita yakin tak ada agama, **kekuatan** moral apapun, yang membenarkan fornografi* pada (13c) merupakan derivasi dari ajektiva *kuat* dalam konstruksi *Ada tangan-tangan **kuat** tak terlihat yang terus mendorong praktik perjudian, sekaligus mengisi pundi-pundi uangnya menjadi berlimpah* pada (11e).

3.7 Kolokasi

Kolokasi merupakan fenomena universal yang ada dalam setiap bahasa dan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda antara satu bahasa dan lainnya. Istilah kolokasi dipopulerkan oleh linguis Inggris Firth dengan slogan yang terkenal *you shall judge a word by the company it keeps*. Dalam sebuah artikel yang bertajuk “Modes of meaning” (Firth 1957), dijelaskan bagaimana kajian *meaning by collocation* dapat memberikan kontribusi pada pendekatan makna kata, baik secara formal maupun secara kontekstual sebagai kebalikan dari pendekatan secara konseptual. Dengan demikian, Firth menyimpulkan bahwa kolokasi melibatkan hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Seperti yang dicontohkan, kata *manis* dalam *frasa wajahnya yang manis, janji manis, dan manis tutur*

katanya mempunyai makna yang berbeda akibat kehadiran konstituen lain di depan atau di belakang konstituen *manis*.

Selain Firth, Stensen (1993:98) menyatakan bahwa kolokasi merupakan sekumpulan perkataan yang mempunyai makna tertentu apabila perkataan-perkataan tersebut wujud secara bersama. Iswati (1993:183), mencontohkan kata-kata *layar*, *perahu*, *badai*, *nelayan*, dan *tenggelam* sebagai kata-kata yang berkolokasi karena semua kata-kata tersebut terletak dalam satu lingkungan, yaitu dalam pembicaraan mengenai laut. Kata-kata yang dicontohkan itu mengacu terhadap penggolongan kata-kata yang berada dalam satu medan makna, seperti (i) golongan kolokasi ‘menunjuk pada hubungan antara kata-kata yang berkolokasi’ dan (ii) golongan set ‘menunjuk pada hubungan paradigmatis karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan atau disubstitusikan’ (Chaer, 1990:116–117). Harimurti (1986) merumuskan bahwa kolokasi menggambarkan seluruh kemungkinan adanya beberapa kata dalam lingkungan yang sama, seperti *garam*, *gula*, *lada*, *bumbu*, *sayur*, *daging*, dan *ikan* yang berkolokasi dalam pembicaraan tentang dapur dan (2) asosiasi yang tetap antara kata dengan kata-kata tertentu lain. Dari rumusan-rumusan tadi dapat disimpulkan bahwa kolokasi merupakan hubungan sebuah kata atau lebih dengan unsur bahasa lainnya yang muncul secara bersamaan dalam sebuah teks yang jarak antara kata dan unsur bahasa lainnya itu tidak harus berdampingan, tetapi dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Makna kolokasi bersifat idiosinkretik dalam bahasa tertentu. Misalnya, *sesepuh reformasi* memiliki makna kolokasi ‘pelopor, penggerak, pejuang reformasi’. Pencarian makna kolokasi dikaitkan dengan situasi pemakaian kata yang bersangkutan. Ada gaya tarik yang berbeda dalam penggunaan kata yang berkolokasi. Kolokasi membuat berpikir lebih mudah. Kita dapat berpikir tentang hal-hal yang baru dan berbicara secepat kita berpikir karena kita tidak menggunakan bahasa baru selamanya. Kolokasi membuat kita mampu mengekspresikan gagasan kompleks secara cepat dengan demikian kita dapat terus memanipulasi gagasan-gagasan tersebut tanpa mempergunakan semua bagian otak kita guna memfokuskan ingatan pada bentuk kata-kata. Jadi, kolokasi adalah kemunculan beberapa kata dengan unsur bahasa lain dalam sebuah teks. Seperti sekarang ini, rangkaian kata, seperti *semangat reformasi*, *kabinet*

reformasi, kabinet proreformasi, komite reformasi, atau reformasi ekonomi tidak asing lagi bagi penutur bahasa Indonesia. Rangkaian kata tersebut tergolong kolokasi (*collocation*). Berikut ini akan dicontohkan pemakaian kolokasi.

- (1) (a) *Pertumbuhan demokrasi membawa tren baru. Banyak orang memilih **jalur politik** agar secepatnya berkuasa.* (b) *Dengan membentuk partai baru atau bergabung dengan partai yang sudah ada, orang berharap dapat terangkut gerbong kekuasaan.* (c) ***Orang masuk partai** lantaran ingin menjadi **presiden, gubernur, bupati, walikota, atau anggota parlemen.*** (d) *Di sisi lain, agar tetap berkuasa, bupati, dan walikota masuk **partai politik.*** (Tempo/Jumat, 10 Maret 2006/Hal. A2)
- (2) (a) *Beberapa kali sudah DPR menggunakan **hak interpelasi** itu.* (b) *Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai **masalah busung lapar dan polio.*** (c) ***Perkara ini** menjadi hangat bukan menyangkut jawaban pemerintah atas materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung.* (Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)
- (3) (a) ***Direksi baru Pertamina** itu dilantik kemarin.* (b) ***Mereka** adalah **Komisaris Utama J Purwono, Direktur Utama Ari Soemarno, Wakil Direktur Utama Iin Arifin Takhyhan, Direktur Pengolahan Suroso Atmomartoyo; Direktur Keuangan Fredefick ST Siahaan, Direktur Umum Sukusen Soernarinda, Direktur Pemasaran Achmad Faisal, serta Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Soni Sumarsono.*** (Media Indonesia/Kamis/9-3-2006)
- (4) (a) ***Ribuan guru di Tangerang** menunjukkan pendapat sejati masyarakat kita.* (b) ***Mereka** berunjuk rasa, kemarin, (7/3), mendukung peraturan daerah tentang larangan minuman keras dan pelacuran.* (c) ***Para guru** gerah karena kedua perda—yang bertujuan mempertahankan nilai kemanusiaan—itu belakangan mendapat serangan.* (Republika/8 Maret 2006)
- (5) (a) ***Sehari kemudian, Sabtu (4/3), kecelakaan menimpa kereta api listrik (KRL) 531 jurusan Bogor—Jakarta.*** (b) *Saat memasuki Stasiun Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat, mendadak*

kabel aliran listrik atas KRL jatuh akibat tersangkut pantograf. (c) Penumpang di atap panik. Mereka berusaha melompat untuk menyelamatkan diri pada saat kereta masih berjalan. (d) Dua penumpang dipastikan tewas di tempat kejadian, yang satu akibat tersengat arus listrik, dan yang lain akibat pendarahan di kepalanya. (Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)

Konstituen *jalur politik* pada (1a) berkolokasi dengan konstituen *orang masuk partai, presiden, gubernur, bupati, walikota, anggota parlemen* pada (1c), dan *partai politik* pada (1d). Konstituen *hak interpelasi* pada (2a) berkolokasi dengan konstituen *masalah busung lapar dan polio* pada (2b) dan *perkara ini* pada (2c). Konstituen *direksi baru Pertamina* pada (3a) berkolokasi dengan mereka, *Komisaris Utama J Purwono, Direktur Utama Ari Soemarno, Wakil Direktur Utama lin Arifin Takhyhan, Direktur Pengolahan Suroso Atmomartoyo; Direktur Keuangan Fredefick ST Siahaan, Direktur Umum Sukusen Soernarinda, Direktur Pemasaran Achmad Faisal, dan Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Soni Sumarsono* pada (3b). Konstituen *ribuan guru di Tangerang* pada (a) berkolokasi dengan *mereka* pada (4b) dan *para guru* pada (4c). Konstituen *kereta api listrik (KRL) 531 jurusan Bogor–Jakarta* pada (5a) berkolokasi dengan *kabel aliran listrik atas KRL* pada (5b), *kreta* pada (4c), dan *arus listrik* pada (4d).

Selain itu, contoh pemakaian kolokasi pada (1–5), berikut ini akan diperlihatkan pula kolokasi yang melibatkan hubungan antara satu kata dengan kata yang lain, yaitu khusus untuk konstituen *banyak*, seperti pada.

- (6) (a) *Kota-kota besar di zaman moderen ini, konsep pembangunan hunian bukan lagi horizontal yakni dengan menyediakan lahan untuk satu kepemilikan satu rumah, melainkan sudah vertikal (apartemen). Dengan konsep vertikal maka sekalipun lahan terbatas. tetap bisa menampung banyak keluarga.* (b) *Sebetulnya, di Jakarta sendiri sudah banyak bermunculan apartemen. Tetapi sebagian besar adalah untuk kelas menengah atas sehingga mereka yang membeli pun sifatnya lebih banyak spekulasi, bukan untuk dihuni. Terbukti bahwa*

banyak apartemen yang secara kepemilikan sudah terjual, tetapi tidak **banyak penghuninya**. (Republika/Jumat/10 Maret 2006)

- (7) Kedua, kita memang harus memulai langkah, sekurang apa pun langkah tersebut. Terlalu lama iklim investasi dibiarkan stagnan sehingga sejak krisis keuangan tahun 1998, lebih **banyak modal** yang keluar Indonesia daripada modal yang masuk dan ditanamkan di sini. (Kompas/Selasa, 8 Maret 2006/Hal. 6)
- (8) Jangan-jangan juga karena sikap peduli yang tidak lagi dirasakan rakyat banyak. Dari siapa sikap peduli, empati, serta setia kawan berkehidupan bersama itu diharapkan **banyak orang**? Dari pemerintah dan para pejabat berikut lembaga dan birokrasinya. (Kompas/Jumat, 10 Maret 2006/Hal. 6)
- (9) Apabila AS dan negara-negara Uni Eropa mendukung proposal Annan. Negara berkembang **banyak yang menentang**. Di Majelis Umum yang beranggotakan 191 negara, usulan Annan diperkirakan akan mendapat ulasan kritis. Sebagian negara berkembang mencurigai usulan perubahan sebagai upaya negara besar dan Dewan Keamanan untuk mendominasi kewenangan di PBB. (Kompas/Jumat, 10 Maret 2006/Hal. 6)
- (10) Pendapat dan pemahaman itu benar, tetapi tidak lengkap. Tugas pokok legislatif di parlemen maupun di depan publik akhirnya mempunyai tugas yang bermuara sama, yakni agar proses pemerintahan demokrasi itu menghasilkan perbaikan perikehidupan **rakyat banyak**. Bukan saja di bidang politik, tetapi sekaligus dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. (Kompas/Selasa, 9 Maret 2006/Hal. 6)
- (11) Pada zaman Soeharto, izin diberikan hanya kepada kalangan dekat Istana. Setelah itu, izin prinsip penyiaran dan frekuensi dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan dan Departemen Penerangan. Proses seleksinya **tidak banyak diketahui**. Kondisi ini berlangsung sampai Departemen Penerangan dibubarkan pada Oktober 1999. (Tempo/Senin, 6 Maret 2006/Hal. A2)
- (12) Tanpa keahlian yang cukup, jelas bahaya sekali mengelola uang yang tidak kecil itu. Padahal, yang dikelola adalah gaji prajurit yang dikumpulkan dari bilangan gaji yang tak bisa dibilang

besar. Impian prajurit untuk memiliki perumahan yang layak jelas terancam sirna. Padahal kita tahu masih banyak rumah prajurit yang tidak layak huni. (Tempo/Senin, 8 Maret 2006/Hal. A2)

Konstituen *banyak* berkolokasi dengan nomina *keluarga* pada paragraf (6a) dan nomina *spekulasi*, nomina *apartemen*, dan frasa nominal *penghuninya* pada paragraf (6b); nomina *modal* pada wacana (7), dan nomina *orang* pada wacana (8); dan frasa nominal *yang menentang* pada wacana (9). Dengan kata lain, konstituen *banyak* mendahului konstituen lain—dalam hal ini—*keluarga*, *spekulasi*, *apartemen*, *penghuninya*, *modal*, *orang*, dan *yang menentang*.

Konstituen *banyak* berkolokasi dengan nomina *rakyat* pada wacana (10), konstituen *tidak* pada wacana (11), dan konstituen *masih* pada wacana (12). Akan tetapi, posisi konstituen yang berkolokasi pada (10–12) berbeda dengan posisi konstituen yang berkolokasi pada (6–9). Pada (10–12) posisi konstituen *banyak* didahului konstituen *rakyat*, *tidak*, dan *masih*.

Contoh kolokasi yang diperlihatkan pada (1–12) agak berbeda dengan contoh kolokasi berikut ini.

(13)

EDITORIAL OBRAL HAK INTERPELASI

(a) *Berbeda dengan periode sebelumnya, DPR sekarang relatif tergolong gencar mengkritik pemerintah. Ini perkara yang bagus bagi kehidupan demokrasi karena memang tugas DPR mengontrol pemerintah.*

(b) *Salah satu hak DPR yang penting dalam urusan mengontrol pemerintah itu adalah hak interpelasi. Hak ini diatur dalam konstitusi.*

(c) *Beberapa kali sudah DPR menggunakan hak interpelasi itu. Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai masalah busung lapar dan polio. Perkara ini menjadi hangat bukan menyangkut jawaban pemerintah atas materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung.*

(d) Isi surat Agung Laksono ialah bahwa presiden dapat mewakilkan kepada menteri untuk menjawab **hak interpelasi DPR**. Dan benar yang menjawab perihal busung lapar dan polio di **DPR** adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Bukan presiden sendiri. Kritik anggota pun meluncur ke arah Ketua **DPR**. Untuk apa menggunakan **hak interpelasi** dan **sidang paripurna** jika yang menjawab menteri? Bukankah **interpelasi** ditujukan kepada presiden? Kalau urusannya ke menteri, cukup rapat kerja dengan komisi dan tidak perlu menggelar rapat paripurna.

(e) Inti kecaman bahwa Ketua **DPR** telah merendahkan posisi parlemen. Bahkan, dianggap telah bersekongkol dengan eksekutif untuk menggagalkan **hak interpelasi**. Sebuah pernyataan yang memperkuat penilaian bahwa **DPR** cuma tukang stempel pemerintah.

(f) Dalam **rapat paripurna** itu tiba-tiba mikrofon mati. Kematian mikrofon ini menyebabkan "kematian" lainnya yang sangat penting, yaitu anggota **DPR** tidak bisa melakukan interupsi. Maka, tudingan bersekongkol dengan eksekutif pun semakin menguat. Bahwa, matinya mikrofon pada sidang paripurna karena pemerintah tidak siap berdialog dan diproteksi dengan mikrofon dimatikan.

(g) Begituulah, silang selimpat mengenai **hak interpelasi DPR** telah berpindah keluar gelanggang persoalan. Yang disorot bukan kebenaran jawaban pemerintah, bukan substansi mengenai perkara busung lapar dan folio, melainkan mikrofon dan surat Ketua **DPR**.

(h) Pekerjaan **DPR** memang berpolitik. Main politik adalah urusannya. Politicking merupakan hidupnya sehari-hari. Namun, berpolitik dengan kehilangan substansi, bahkan memilih meributkan soal mati-hidupnya mikrofon, cuma menunjukkan buruknya kualitas berpolitik para wakil rakyat.

(i) Ekornya ialah menjadikan **hak interpelasi DPR** sebagai hak murahan yang telah dipakai dengan obral. Murahan, obral, karena akhirnya yang disorot bukan substansi jawaban pemerintah, tapi urusan "dalam negeri" **DPR** sendiri.

(Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)

EDITORIAL
PEKERJAAN RUMAH DIREKSI BARU PERTAMITA

(a) Teka-teki tentang pergantian direksi **Pertamina** akhirnya terjawab. Janji pemerintah melakukan overhaul kepada **BUMN perminyakan** itu pun terpenuhi.

(b) Rezim Widya Purnama kini Beralih ke gerbong Ari Soemarno. Tidak satu pun. direksi di masa Widya Purnama bergabung dalam pasukan Ari Soemarno. Gerbong Ari benar-benar baru.

(c) Direksi baru **Pertamina** itu dilantik kemarin. Mereka adalah Komisaris Utama J Purwono, Direktur Utama Ari Soemarno, Wakil Direktur Utama lin Arifin Takhyhan, Direktur Pengolahan Suroso Atmomartoyo; Direktur Keuangan Fredefick ST Siahaan, Direktur Umum Sukusen Soemarinda, Direktur Pemasaran Achmad Faisal, serta Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Soni Sumarsono.

(d) Pemimpin baru tentu menyertakan harapan baru pula. Harapan itu kian sempurna karena **Pertamina** selama ini mengesankan sebagai sebuah **BUMN** dengan nama besar, tapi hidupnya kembang kempis. Itu ironis.

(e) Sebagai perusahaan milik negara dan sebuah negara dengan kandungan **minyak** yang besar, seharusnya **Pertamina** menjadi **BUMN** yang kuat. Tapi yang terjadi sebaliknya. **Pertamina** sering kekurangan dana segar.

(f) Sering pula terjadi kelangkaan bahan bakar **minyak (BBM)** dan gas karena transportasi yang tidak lancar. Ketersediaan **minyak** sering tidak memenuhi ketentuan 26 hari. Semua itu terkait dengan manajemen **Pertamina** sendiri.

(g) Tantangan besar yang dihadapi **Pertamina** adalah menjadi sebuah **BUMN** yang produktif dan efisien. Untuk itu, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan audit menyeluruh. Itu untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, atau sehat dan tidaknya perusahaan.

(h) Dengan membedah. diri sendiri, **Pertamina** akan menyusun langkah-langkah ke depan yang lebih kompetitif **Pertamina** bisa tahan guncangan dan badai karena tidak digerogeti inefisiensi.

(i) Posisi **Pertamina** saat ini memang kian sulit, terutama setelah masuknya sejumlah operator asing dalam penjualan **BBM** di dalam negeri, sektor yang selama ini di-monopoli. Kini operator asing seperti Petronas dari Malaysia, Shell dari Belanda, dan Gulf dari Amerika Serikat mulai menyaingi **Pertamina** dengan membangun pompa bensin di Indonesia.

(j) Di sisi lain, masih ada sisa-sisa tabiat warisan masa lalu yang memandang **Pertamina** sebagai sapi perah. Sebagai **BUMN** yang dinilai berlimpah duit, **Pertamina** seolah menjadi sinterklas. Menjadi objek perasan dari pejabat eksekutif, anggota parlemen, partai politik hingga organisasi kemasyarakatan. Beban nonneraca menjadi menggunung.

(k) Kita percaya direksi baru **Pertamina** mempunyai cara jitu untuk mengakhiri semua itu. Direksi baru mempunyai pisau yang tajam untuk membedah dan memutuskan semua rantai inefisiensi tanpa ada yang perlu merasa sakit.

(l) Sekarang saatnya **Pertamina** tumbuh menjadi **BUMN** kuat. Dan, **Pertamina** memiliki potensi untuk itu. Kita mengharap direksi baru mampu merealisasikannya.

(Media Indonesia/Kamis/9-3-2006)

(15)

TAJUK CEMEX DAN IKLIM INVESTASI

(a) Demi mencapai *pertumbuhan ekonomi* yang layak, negeri ini jelas sangat membutuhkan *investasi langsung*. Setelah hanya tumbuh 5,6 persen tahun lalu, tahun ini pemerintah menargetkan *pertumbuhan ekonomi* mencapai 6,2 persen. Dan, untuk mencapai pertumbuhan tersebut, bahan bakar utamanya jelas, *investasi langsung*.

(b) Maka, Kementerian Koordinator Perekonomian pekan lalu mengumumkan diterbitkannya *paket kebijakan iklim investasi*. Di tengah persaingan menarik *investasi* antarnegara di Asia yang semakin ketat, paket ini sangat diharapkan mampu *memperbaiki iklim investasi*. Diharapkan juga paket ini bisa mengembalikan Indonesia menjadi tempat tujuan *investasi* yang menarik, terutama bagi *investor asing*.

(c) Bagi pemerintah, paket yang mencakup perbaikan dan penyederhanaan perizinan, undang-undang penanaman modal, sampai urusan kepabeanaan itu agaknya menjadi gantungan harapan **masuknya investasi**. Tapi, sebagian kalangan tetap saja menilai paket tersebut secara substansi tidak memuat hal-hal baru. Bahkan, ada pula yang melihat paket ini masih berbau pesanan lembaga internasional.

(d) Apapun, yang jelas, bagi pemerintah paket tersebut merupakan jawaban terhadap tuntutan dunia usaha untuk **perbaikan iklim investasi**. Paket ini diharapkan mampu meningkatkan **kegiatan investasi** guna mendorong percepatan **pertumbuhan ekonomi** yang dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.

(e) Semudah itukah? Benar, **perbaikan iklim investasi** terkait proses perizinan, juga kepabeanaan, bisa membuka peluang bagi **pertumbuhan investasi**. Lain kata, mampu membuka peluang besar bagi **masuknya investasi langsung asing**. Masalahnya, ada hal lain yang agak terabaikan sehingga **paket kebijakan investasi** sebaik apapun bisa jadi tak berarti; kepastian hukum dan ketegasan pemerintah.

(f) Contoh paling konkret kurang tegasnya pemerintah bisa terlihat pada kontroversi kehadiran perusahaan semen Meksiko, Cernex SA, lewat Cemex Asia Ltd. Kontroversi Cemex sudah menahun, dan tak kunjung selesai sampai sekarang.

(g) Pada 1998, Cemex membeli 25,5 persen **saham PT Semen Gresik**, perusahaan BUMN semen Indonesia, yang juga holding dan PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang. Dalam transaksi itu, Cemex memiliki pula hak untuk menjadi **pemegang saham mayoritas** pada 2001. Namun, ketika Cemex ingin menggunakan hak itu, pemerintah sebagai pemilik 51 persen **saham Semen Gresik**, justru menolak **menjual sahamnya**. Dua anak perusahaan Semen Gresik malah berniat melakukan memisahkan diri jika Cemex benar-benar menjadi **pemegang saham mayoritas**.

(h) Nasionalisme dalam berbisnis boleh jadi tetap perlu. Ironisnya ketika, Cemex akhirnya menulis surat ke

Kementerian BUMN untuk menjual kembali saham Semen Gresik yang 25,5 persen. Pemerintah juga secara tegas menyatakan tidak akan membeli kembali saham Cemex di Semen Gresik. Selain faktor kesulitan keuangan, pemerintah mengemukakan alasan lain terkait dengan dampak nonteknis ekonomi lainnya.

(i) Pemerintah bisa saja mengkonsolidasi BUMN lain membeli saham Cemex. Hanya saja, itu pun tak mungkin dilakukan jika BUMN atau swasta nasional yang membeli sama sekali tak memahami industri semen. Alhasil, posisi Cemex dan Semen Gresik terkatung-katung.

(j) Paket baru kebijakan iklim investasi boleh saja dijadikan harapan membaiknya investasi negeri ini. Namun, jika kasus seperti Cemex tetap terus terjadi dan berkepanjangan pula, maka mudah ditebak apa yang ada di benak investor asing. Pemerintah jelas tak ingin dibilang “plin plan”. Tapi, pemerintah rasanya sulit pula mencegah jika anggapan itu melekat di benak investor asing. Maka, ketegasan penyelesaian kasus Cemex-terlepas baik tidaknya paket kebijakan iklim investasi tak ubahnya pertaruhan kredibilitas pemerintah di mata investor asing.

(Republika/7 MARET 2006)

Frasa nominal *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* pada wacana (13)—dalam hal ini—paragraf (13a), (13b), (13c), (13d), (13e), (13f), (13g), (13h), dan (13i) memiliki kolokasi dengan (i) frasa nominal *hak interpelasi* pada paragraf (13b), (13c), (13d), (13e), (13g), dan (13i); (ii) frasa nominal *sidang paripurna* pada paragraf (13d), dan (iii) frasa nominal *rapat paripurna* pada paragraf (13f). Kolokasi frasa nominal *hak interpelasi*, *sidang paripurna*, dan *rapat paripurna* dalam wacana (13) karena berhubungan dengan eksistensi lembaga legislatif.

Nomina *Pertamina* pada wacana (14)—dalam hal ini—paragraf (14a), (14c), (14c), (14e), (14f), (14g), (14h), (14i), (14j), (14k), dan (14l) memiliki kolokasi dengan (i) frasa nominal *Badan Usaha Milik Negara (BUMN)* pada paragraf (14b), (14d), (14e), (14g), dan (14j), dan (14l); (ii) nomina *minyak* pada paragraf (14e) dan (14f); nomina *perminyakan* pada paragraf (14a); dan frasa nominal *Bahan*

Bakar Minyak (BBM) pada paragraf (14f). Kolokasi frasa nominal *Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, nomina *minyak*, nomina *perminyakan*, dan frasa nominal *Bahan Bakar Minyak (BBM)* dalam wacana (14) karena berhubungan dengan hasil tambang minyak.

Nomina *paket kebijakan iklim investasi* pada wacana (15)—dalam hal ini—paragraf (15b) dan (15j) memiliki kolokasi dengan (i) frasa nominal *investasi langsung* pada paragraf (15a), (ii) frasa nominal *investor asing* pada paragraf (15b) dan (15j), (iii) frasa nominal *kegiatan investasi* pada paragraf (15d), (iv) frasa nominal *masuknya investasi* pada paragraf (15c), (v) frasa nominal *masuknya investasi langsung asing* pada paragraf (15e), (vi) frasa nominal *membaihnya investasi* pada paragraf (15j), (vii) frasa nominal *membeli kembali saham Cemex* pada paragraf (15h), (viii) frasa nominal *membeli saham Cemex* pada paragraf (15i), (ix) frasa nominal *memperbaiki iklim investasi* pada paragraf (15b), (xi) frasa nominal *menarik investasi* pada paragraf (15b), (xii) frasa nominal *menjual kembali saham Semen Gresik* pada paragraf (15h), (xiii) frasa nominal *menjual sahamnya* pada paragraf (15g), (xiv) frasa nominal *Paket baru kebijakan iklim investasi* pada paragraf (15j), (xv) frasa nominal *paket kebijakan iklim investasi* pada paragraf (15b), (xvi) frasa nominal *paket kebijakan iklim investasi* pada paragraf (15j), (xvii) frasa nominal *paket kebijakan investasi* pada paragraf (15e), (xviii) frasa nominal *pemegang saham mayoritas* pada paragraf (15g), (xix) frasa nominal *perbaikan iklim investasi* pada paragraf (15e) dan (15d), (xx) frasa nominal *pertumbuhan ekonomi* pada paragraf pada paragraf (15a), (xxi) frasa nominal (15d), (xxii) frasa nominal *pertumbuhan investasi* pada paragraf (15e), dan (xxiii) frasa nominal *saham (PT) Semen Gresik* (15g). Kolokasi frasa nominal *Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, nomina *minyak*, nomina *perminyakan*, dan frasa nominal *Bahan Bakar Minyak (BBM)* dalam wacana (14) karena berhubungan dengan *investasi*.

3.8 Repetisi (Perulangan)

Perulangan disebut juga sebagai repetisi (*repetition*) atau usaha penyebutan kembali satu unit leksikal yang sama yang telah disebutkan sebelumnya. Kata yang sering kali diulang ini adalah dari 'kata isi' (*content word*). Ini bermakna bahwa kata itu ter-

golong kata yang amat penting dalam suatu kalimat yang dibentuk. Kata isi ini dapat dikenal melalui dua cara. Cara yang pertama ialah kata itu atau 'kata isi' tersebut akan dijadikan sebagai unsur yang tidak boleh ditinggalkan. Cara yang kedua ialah jika kata tersebut tidak diulang, berkemungkinan teks itu akan terganggu sifat kesatuannya. Sementara itu, Sumarlam (2003:34) menyatakan bahwa repetisi adalah perulangan suatu lingual (bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat) yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Sehubungan dengan hal itu, perulangan yang terdapat dalam sebuah wacana dapat dikelompokkan menjadi (1) perulangan seluruhnya (lihat 3.8.1) dan (2) perulangan sebagian (lihat 3.8.2).

3.8.1 Repetisi (Perulangan) Seluruhnya

Perulangan seluruhnya dalam sebuah wacana dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Dari hasil identifikasi data, perulangan seluruhnya dalam wacana dibatasi pada perulangan kata dan frasa, seperti pada contoh berikut ini.

(1)

OBRAL HAK INTERPELASI

(a) *Berbeda dengan periode sebelumnya, DPR sekarang relatif tergolong gencar mengkritik **pemerintah**. Ini perkara yang bagus bagi kehidupan demokrasi karena memang tugas DPR mengontrol **pemerintah**.*

(b) *Salah satu hak DPR yang penting dalam urusan mengontrol **pemerintah** itu adalah hak interpelasi. Hak ini diatur dalam konstitusi.*

(c) *Beberapa kali sudah DPR menggunakan hak interpelasi itu. Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai masalah busung lapar dan polio. Perkara ini menjadi hangat bukan menyangkut jawaban **pemerintah** atas materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung.*

(d) *Isi surat Agung Laksono ialah bahwa presiden dapat mewakilkan kepada menteri untuk menjawab hak interpelasi DPR. Dan benar yang menjawab perihal busung lapar dan polio*

di DPR adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Bukan presiden sendiri. Kritik anggota pun meluncur ke arah Ketua DPR. Untuk apa menggunakan hak interpelasi dan sidang paripurna jika yang menjawab menteri? Bukankah interpelasi ditujukan kepada presiden? Kalau urusannya ke menteri, cukup rapat kerja dengan komisi dan tidak perlu menggelar rapat paripurna.

(e) Inti kecaman bahwa Ketua DPR telah merendahkan posisi parlemen. Bahkan, dianggap telah bersekongkol dengan eksekutif untuk menggagalkan hak interpelasi. Sebuah pernyataan yang memperkuat penilaian bahwa DPR cuma tukang stempel **pemerintah**.

(f) Dalam rapat paripurna itu tiba-tiba mikrofon mati. Kematian mikrofon ini menyebabkan "kematian" lainnya yang sangat penting, yaitu anggota DPR tidak bisa melakukan interupsi. Maka, tudingan bersekongkol dengan eksekutif pun semakin menguat. Bahwa, matinya mikrofon pada sidang paripurna karena **pemerintah** tidak siap berdialog dan di-*proteksi* dengan mikrofon dimatikan.

(g) Begitulah, silang selimpat mengenai hak interpelasi DPR telah berpindah keluar gelanggang persoalan. Yang disorot bukan kebenaran jawaban **pemerintah**, bukan substansi mengenai perkara busung lapar dan folio, melainkan mikrofon dan surat Ketua DPR.

(h) Pekerjaan DPR memang berpolitik. Main politik adalah urusannya. Politicking merupakan hidupnya sehari-hari. Namun, berpolitik dengan kehilangan substansi, bahkan memilih meributkan soal mati-hidupnya mikrofon, cuma menunjukkan buruknya kualitas berpolitik para wakil rakyat.

(i) Ekornya ialah menjadikan hak interpelasi DPR sebagai hak murahan yang telah dipakai dengan obral. Murahan, obral, karena akhirnya yang disorot bukan substansi jawaban **pemerintah**, tapi urusan "dalam negeri" DPR sendiri.

(Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)

(2)

ANCAMAN ISRAEL TAK CIUTKAN HAMAS

(a) Kemenangan organisasi militan **Hamas** dalam pemilu parlemen Palestina bulan Januari lalu rupanya masih terus menggelisahkan Israel.

(b) Ketika **Hamas** sedang dalam proses membentuk pemerintahan sekarang ini pun, Israel ingin menerornya, yaitu dengan mengeluarkan ancaman, pihaknya bisa saja membunuh pemimpin **Hamas**, Ismail Haniya.

(c) Ancaman terakhir disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Shaul Mofaz, Selasa (7/3), sehari setelah Israel melancarkan serangan terhadap truk es krim di Gaza City yang menewaskan dua anggota Jihad Islam, tiga warga yang ada di dekat sasaran, dua di antaranya anak-anak.

(d) Pada satu sisi perkembangan terakhir di Timur Tengah ini memang tidak menggembirakan. Israel melancarkan serangan udara sebagai aksi balasan terhadap Jihad Islam yang dianggap sebagai pelaku serangan bom bunuh diri di Israel dan pelaku serangan roket dari Gaza semenjak tentara dan pemukim Israel meninggalkan wilayah ini tahun lalu.

(e) Selain dipicu oleh kejadian-kejadian tersebut, Israel juga terus merasa tidak nyaman dengan tampilnya **Hamas** di kekuasaan karena kelompok ini diketahui masih bersumpah untuk menghancurkan Israel. **Hamas** juga menolak seruan internasional untuk meninggalkan ideologi kekerasan dan anti-Israel. Di pihak lain **Hamas** sejauh ini bisa mempertahankan penghentian aksi peledakan bom bunuh diri selama satu tahun.

(f) Selanjutnya wartawan menanyakan, apakah Haniya juga akan disasar kalau **Hamas** memulai kembali serangan. Mofaz menjawab, kalau **Hamas** tidak mau mengakui persetujuan (yang sejauh ini ada antara Israel dan Palestina), juga tidak bersedia meninggalkan kekerasan, dan terus menantang Israel, tak seorang **Hamas**/Palestina) yang imun. Bukan hanya Ismail Haniya.

(g) Menanggapi ancaman ini, juru bicara **Hamas**, Sami Abu Zuhri, mengatakan, "Ancaman Israel tidak membuat takut **Hamas** atau rakyat Palestina, dan taktik pemerasan dan ancaman ini tidak akan membelenggu kami."

(h) **Hamas** memang tak menyurutkan perlawanan sejak aksi perlawanan merebak lagi tahun 2000. Sementara itu, Israel juga telah membalas dan membunuh sejumlah pemimpin mereka, termasuk yang senior, seperti salah satu pendirinya, Sheik Ahmad Yassin.

(i) *Memang, sejak ada penghentian tembak-menembak di antara keduanya diberlakukan, Israel tidak lagi menysar petinggi Hamas. Namun, dengan keluarnya komentar Mofaz, suasana permusuhan jelas semakin meningkat. Sikap Mofaz mencerminkan apa yang oleh Abu Zuhri sebagai "terorisme negara".*

(Kompas/Selasa, 9 Maret 2006/Hal. 6)

Wacana (1) dan (2) sama-sama terdiri atas 9 paragraf, yaitu paragraf (1a), (1b), (1c), (1d), (1e), (1f), (1g), (1h), dan (1i) serta (2a), (2b), (2c), (2d), (2e), (2f), (2g), (2h), dan (2i).

Pada wacana (1) terjadi repetisi kostituen antarpagraf, yaitu berupa repetisi seluruhnya yang berupa kata—dalam hal ini nomina *pemerintah* pada paragraf (1b), (1c), (1e), (1f), (1g), dan (1i) merupakan perulangan konstituen *pemerintah* pada (1a), seperti yang diperlihatkan berikut ini.

- (1) a. *Berbeda dengan periode sebelumnya, DPR sekarang relatif tergolong gencar mengkritik pemerintah. Ini perkara yang bagus bagi kehidupan demokrasi karena memang tugas DPR mengontrol pemerintah.*
- b. *Salah satu hak DPR yang penting dalam urusan mengontrol pemerintah itu adalah hak interpelasi. Hak ini diatur dalam konstitusi.*
- c. *Beberapa kali sudah DPR menggunakan hak interpelasi itu. Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai masalah busung lapar dan polio. Perkara ini menjadi hangat bukan menyangkut jawaban pemerintah atas materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung.*
- e. *Inti kecaman bahwa Ketua DPR telah merendahkan posisi parlemen. Bahkan, dianggap telah bersekongkol dengan eksekutif untuk menggagalkan hak interpelasi. Sebuah pernyataan yang memperkuat penilaian bahwa DPR cuma tukang stempel pemerintah.*
- f. *Dalam rapat paripurna itu tiba-tiba mikrofon mati. Kematian mikrofon ini menyebabkan "kematian" lainnya yang*

sangat penting, yaitu anggota DPR tidak bisa melakukan interupsi. Maka, tudingan bersekongkol dengan eksekutif pun semakin menguat. Bahwa, matinya mikrofon pada sidang paripurna karena **pemerintah** tidak siap berdialog dan diproteksi dengan mikrofon dimatikan.

- g. Begitulah, silang selimpat mengenai hak interpelasi DPR telah berpindah keluar gelanggang persoalan. Yang disorot bukan kebenaran jawaban **pemerintah**, bukan substansi mengenai perkara busung lapar dan folio, melainkan mikrofon dan surat Ketua DPR.
- i. Ekornya ialah menjadikan hak interpelasi DPR sebagai hak murahan yang telah dipakai dengan obral. Murahan, obral, karena akhirnya yang disorot bukan substansi jawaban **pemerintah**, tapi urusan “dalam negeri” DPR sendiri.

Pada wacana (2) terjadi repetisi konstituen antarparagraf, yaitu berupa repetisi seluruhnya yang berupa kata—dalam hal ini nomina nama diri *Hamis* pada paragraf (2b), (2e), (2f), (2g), (2h), dan (2i) merupakan perulangan nomina nama diri *Hamis* pada (2a), seperti yang diperlihatkan berikut ini.

- (2) a. Kemenangan organisasi militan **Hamis** dalam pemilu parlemen Palestina bulan Januari lalu rupanya masih terus menggelisahkan Israel.
- b. Ketika **Hamis** sedang dalam proses membentuk pemerintahan sekarang ini pun, Israel ingin menerornya, yaitu dengan mengeluarkan ancaman, pihaknya bisa saja membunuh pemimpin **Hamis**, Ismail Haniya.
- e. Selain dipicu oleh kejadian-kejadian tersebut, Israel juga terus merasa tidak nyaman dengan tampilnya **Hamis** di kekuasaan karena kelompok ini diketahui masih bersumpah untuk menghancurkan Israel. **Hamis** juga menolak seruan internasional untuk meninggalkan ideologi kekerasan dan anti-Israel. Di pihak lain **Hamis** sejauh ini bisa mempertahankan penghentian aksi peledakan bom bunuh diri selama satu tahun.
- f. Selanjutnya wartawan menanyakan, apakah Haniya juga akan disasar kalau **Hamis** memulai kembali serangan.

Mofaz menjawab, kalau **Hamis** tidak mau mengakui persetujuan (yang sejauh ini ada antara Israel dan Palestina), juga tidak bersedia meninggalkan kekerasan, dan terus menantang Israel, tak seorang **Hamis**/Palestina) yang imun. Bukan hanya Ismail Haniya.

- g. Menanggapi ancaman ini, juru bicara **Hamis**, Sami Abu Zuhri, mengatakan, "Ancaman Israel tidak membuat takut **Hamis** atau rakyat Palestina, dan taktik pemerasan dan ancaman ini tidak akan membelenggu kami."
- h. **Hamis** memang tak menyurutkan perlawanan sejak aksi perlawanan merebak lagi tahun 2000. Sementara itu, Israel juga telah membalas dan membunuh sejumlah pemimpin mereka, termasuk yang senior, seperti salah satu pendirinya, Sheik Ahmad Yassin.
- i. Memang, sejak ada penghentian tembak-menembak di antara keduanya diberlakukan, Israel tidak lagi menysar petinggi **Hamis**. Namun, dengan keluarnya komentar Mofaz, suasana permusuhan jelas semakin meningkat. Sikap Mofaz mencerminkan apa yang oleh Abu Zuhri sebagai "terorisme negara".

Jika pada wacana (1) dan (2) terjadi perulangan seluruhnya yang berupa kata, pada wacana berikut ini terjadi perulangan seluruhnya yang berupa frasa.

(3)

MENDAMBAKAN KA YANG AMAN

(a) Dua kecelakaan kereta api yang melayani angkutan umum di Jabodetabek terjadi dua hari berturut-turut akhir pekan lalu. Kejadian pertama, Jumat (3/3). Atap gerbong keempat KRD 907 jurusan Rangkasbitung–Tanah Abang runtuh. Puluhan penumpang di atas atap berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari atap. Akibatnya, puluhan penumpang cedera.

(b) Sehari kemudian, Sabtu (4/3), kecelakaan menimpa kereta api listrik (KRL) 531 jurusan Bogor–Jakarta. Saat memasuki Stasiun Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat, mendadak kabel aliran listrik atas KRL jatuh akibat tersangkut

pantograf. Penumpang di atap panik. Mereka berusaha melompat untuk menyelamatkan diri pada saat kereta masih berjalan. Dua penumpang dipastikan tewas di tempat kejadian, yang satu akibat tersengat arus listrik, dan yang lain akibat pendarahan di kepalanya.

(c) Kecelakaan kereta api yang kedua itu semestinya tidak terjadi kalau petugas kereta api mengikuti instruksi Menteri Perhubungan Hatta Rajasa. Menteri telah memerintahkan semua petugas stasiun agar tidak memberangkatkan kereta jika masih ada penumpang yang duduk di atap. Para penumpang pun bisa menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan bila mau belajar dari pengalaman sehari sebelumnya, yang menimpa KRD 907.

(d) Dua kejadian tersebut kembali menegaskan betapa ceroboh dan rendahnya disiplin kita dalam berkereta. Tidak perlu diperdebatkan lagi, penumpang di atap kereta jelas sangat berbahaya. Sudah banyak kejadian penumpang tewas akibat jatuh dari atap kereta. Namun, kejadian-kejadian itu tidak pernah menjadi pembelajaran.

(e) Dalam peristiwa itu, PT KA tidak bisa menimpakan kesalahan hanya kepada penumpang yang nekat dan ceroboh. Orang nekat naik ke atap gerbong karena kapasitas gerbong memang tidak memadai lagi untuk menampung penumpang yang ada. Padahal mereka ingin tepat waktu tiba di tujuan. Frekuensi keberangkatan kereta masih terbatas. Belum lagi jalur tertentu, seperti dari Rangkasbitung–Tanah Abang masih satu trek, belum dua trek seperti Jakarta–Bogor atau Jakarta–Bekasi.

(f) Pemerintah, dalam hal ini PT KA, dituntut harus disiplin. Instruksi Menteri Hatta Rajasa untuk tidak memberangkatkan kereta bila masih ada penumpang di atap sudah jelas. PT KA harus menegakkan disiplin karena hal ini berkaitan dengan angkutan massal. Bila ceroboh, risikonya besar. Karena itu, tidak ada jalan lain, PT KA harus terus membenahi manajemennya agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang.

(g) Bila PT KA tegas dalam menegakkan disiplin, masyarakat pasti tak akan menolak. Kita berharap kecelakaan

itu bisa menjadi pelajaran untuk membenahan ke dalam. Jika tidak dibenahi, kita pantas bertanya: kapan naik kereta bisa aman?

(Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)

(4)

TINJAU ULANG IZIN GLOBAL TV

(a) Setiap orang berhak menerima informasi. Semestinya hak menyebarkan informasi juga dimiliki oleh setiap warga negara. Prinsip ini sudah berjalan dalam penerbitan media cetak. Mereka yang berminat menyebarkan informasi melalui barang cetakan kini tidak perlu lagi meminta surat izin usaha penerbitan.

(b) Kasus **Global TV**, yang terjadi ketika B.J. Habibie berkuasa, menjelaskan kepada kita bahwa prinsip kesetaraan hak warga negara itu belum terwujud di dunia elektronik televisi. Hak menyebarkan informasi melalui televisi masih memerlukan izin prinsip dan frekuensi dari pemerintah (yang mewakili negara).

(c) Pada zaman Soeharto, izin diberikan hanya kepada kalangan dekat Istana. Setelah itu, izin prinsip penyiaran dan frekuensi dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan dan Departemen Penerangan. Proses seleksinya tidak banyak diketahui. Kondisi ini berlangsung sampai Departemen Penerangan dibubarkan pada Oktober 1999.

(d) Izin untuk **Global TV** mewakili masa pemberian izin televisi secara tertutup itu-proses yang seharusnya dikoreksi. Selain itu, ada dua hal yang patut dipersoalkan sekitar **Global TV**. Yang pertama masalah peralihan kepemilikan izin dari PT Global Informasi Bermutu, yang didirikan oleh mereka yang bisa digolongkan sebagai "kelompok Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia", kepada kelompok Bimantara. Ini menyangkut soal frekuensi yang merupakan domain publik yang dikuasai negara. Izin diberikan khusus kepada pengusaha tertentu melalui berbagai pertimbangan. Dengan begitu, jual-beli izin harus dilarang karena transaksi itu "melewati" kewenangan negara untuk menguji kelayakan kelompok pembeli izin.

(e) Yang kedua adalah soal misi yang diberikan negara kepada **Global TV**. Awalnya, pada Juli 1999, pemberian frekuensi **Global TV** dilakukan bukan untuk tujuan komersial. Kelompok *The International Islamic Forum for Science Technology and Human Resource Development* merancang stasiun yang mengedepankan pendidikan, budaya, serta tayangan kemanusiaan.

(f) Izin pun keluar. Namun, **Global TV** tidak mampu melakukan siaran hingga jatuh tempo izin. Ketika diambil alih oleh Grup Bimantara pada 2000, stasiun itu menyiarkan program milik stasiun MTV-program hiburan khusus untuk remaja dan orang dewasa dari luar negeri. Pelanggaran misi siaran pun terjadi-sesuatu yang dilarang: Undang-Undang Penyiaran Tahun 1997. Tapi ketika itu terjadi kekosongan regulator siaran televisi. Departemen Perhubungan tidak mengurus materi siaran, sedangkan Departemen Penerangan sudah dibubarkan. Komisi Penyiaran Indonesia, yang kini mengawasi siaran, belum lagi terbentuk.

(g) Maka meninjau kembali izin **Global TV** adalah langkah koreksi yang perlu. Selanjutnya, setiap izin frekuensi perlu ditenderkan secara terbuka. Pemberian izin televisi secara tertutup, yang membuat sebagian stasiun nasional berada di kalangan dekat bekas presiden Soeharto, harus segera diakhiri.

(Tempo/Senin, 6 Maret 2006/Hal. A2)

(5)

UJUNG TOMBAK YANG TERABAIKAN

(a) Ribuan kepala desa dari beberapa provinsi berunjuk rasa di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (5/3). Mereka menuntut agar nasib mereka diperbaiki. Jalan untuk perbaikan itu adalah segera merevisi pasal-pasal dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah NO 72 Tahun 2005.

(b) Bila mencermati UU tersebut, tampak bahwa masalah-masalah yang mengatur pemerintahan desa kurang sekali mendapat perhatian. Juga terdapat banyak pembatasan hak desa, seperti hak politik perangkat desa, masa jabatan kepala desa yang sebelumnya diatur dalam UU No 5

Tahun 1979 selama delapan tahun dan bisa dipilih kembali, yang kemudian berubah menjadi enam tahun.

(c) Nasib kepala desa sejak Orde Lama hingga Era Reformasi hampir tidak pernah berubah. Mereka tidak pernah menjadi subjek, tetapi selalu menjadi objek pemerintahan. Padahal, mereka adalah ujung tombak pemerintahan di tataran paling bawah. Bagaimana rakyat bisa maju kalau kepala desa dan perangkat desanya saja tidak diperhatikan nasibnya.

(d) Kehidupan para kepala desa kerap memprihatinkan. Banyak kepala desa dan perangkat desa yang tidak mendapat honor. Bahkan untuk memilih kepala desa mereka menggunakan uang dari saku sendiri. Terkait dengan itu, mereka meminta supaya pemilihan kepala desa menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

(e) Selain itu, hingga kini belum ada satu pun UU yang mengatur tentang kepala desa. Selama ini, seperti UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diubah dengan UU Pemerintahan Daerah bukanlah UU tentang kepala desa. Meskipun di dalam UU tersebut ada pasal yang mengatur tentang kepala desa, tetapi jumlahnya sangat sedikit.

(f) Pengaturan soal kepala desa dalam UU Pemerintahan Daerah itu pun banyak yang rancu. Karena itu, para kepala desa yang datang ke Jakarta menuntut supaya sejumlah pasal yang mengatur tentang kepala desa dalam UU tersebut direvisi. Misalnya, biaya pemilihan kepala desa juga perlu dibebankan ke APBD.

(g) Selain itu, UU tersebut juga mengebiri hak berpolitik kepala desa dengan melarang mereka menjadi pengurus partai politik. Para kepala desa menghendaki ketentuan itu dihapus. Tuntutan ini wajar karena pada level lebih tinggi seperti bupati, gubernur, menteri, bahkan wakil presiden dan presiden, bisa menjadi pengurus partai. Kepala desa menuntut pasal-pasal yang dinilai kontraproduktif dan merupakan kemunduran bagi penyelenggaraan pemerintah desa agar diubah. Kita berharap

kepala desa makin diberdayakan untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri. Mereka adalah ujung tombak pemerintah di lapangan.

(Suara Pembaharuan/Kamis, 9 Maret 2006)

Wacana (3–5) sama-sama terdiri atas tujuh paragraf. Wacana (3) terdiri atas 7 paragraf, yaitu paragraf (3a), (3b), (3c), (3d), (3e), (3f), dan (3g); wacana (4) terdiri atas 7 paragraf, yaitu paragraf (4a), (4b), (4c), (4d), (4e), (4f), (4g), (4h), dan (4i); dan wacana (5) terdiri dari 7 paragraf, yaitu paragraf (5a), (5b), (5c), (5d), (5e), (5f), dan (5g).

Pada wacana (3) terjadi repetisi konstituen antarpagraf, yaitu berupa repetisi seluruhnya yang berupa frasa—dalam hal ini frasa nominal *PT KA* pada paragraf (3f) dan (3g) merupakan perulangan frasa nominal *PT KA* pada (3e), seperti yang diperlihatkan berikut ini.

- (3) e. *Dalam peristiwa itu, PT KA tidak bisa menimpakan kesalahan hanya kepada penumpang yang nekat dan ceroboh. Orang nekat naik ke atap gerbong karena kapasitas gerbong memang tidak memadai lagi untuk menampung penumpang yang ada. Padahal mereka ingin tepat waktu tiba di tujuan. Frekuensi keberangkatan kereta masih terbatas. Belum lagi jalur tertentu, seperti dari Rongkasbitung–Tanah Abang masih satu trek, belum dua trek seperti Jakarta–Bogor atau Jakarta–Bekasi.*
- f. *Pemerintah, dalam hal ini PT KA, dituntut harus disiplin. Instruksi Menteri Hatta Rajasa untuk tidak keberangkatan kereta bila masih ada penumpang di atap sudah jelas. PT KA harus menegakkan disiplin karena hal ini berkaitan dengan angkutan massal. Bila ceroboh, risikonya besar. Karena itu, tidak ada jalan lain, PT KA harus terus membenahi manajemennya agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang.*
- g. *Bila PT KA tegas dalam menegakkan disiplin, masyarakat pasti tak akan menolak. Kita berharap kecelakaan itu bisa menjadi pelajaran untuk pembenahan ke dalam. Jika tidak dibenahi, kita pantas bertanya: kapan naik kereta bisa aman?*

Pada wacana (4) terjadi repetisi konstituen antarpagraf, yaitu berupa repetisi seluruhnya yang berupa frasa—dalam hal ini frasa nominal *Global TV* pada paragraf (4d), (4e), (4f), dan (4g) merupakan perulangan konstituen *Global TV* pada (4b), seperti yang diperlihatkan berikut ini.

- (4) b. *Kasus Global TV, yang terjadi ketika B.J. Habibie berkuasa, menjelaskan kepada kita bahwa prinsip kesetaraan hak warga negara itu belum terwujud di dunia elektronik televisi. Hak menyebarkan informasi melalui televisi masih memerlukan izin prinsip dan frekuensi dari pemerintah (yang mewakili negara).*
- d. *Izin untuk Global TV mewakili masa pemberian izin televisi secara tertutup itu-proses yang seharusnya dikoreksi. Selain itu, ada dua hal yang patut dipersoalkan sekitar Global TV. Yang pertama masalah peralihan kepemilikan izin dari PT Global Informasi Bermutu, yang didirikan oleh mereka yang bisa digolongkan sebagai "kelompok Ikatan Cendekia-wan Muslim se-Indonesia", kepada kelompok Bimantara. Ini menyangkut soal frekuensi yang merupakan domain publik yang dikuasai negara. Izin diberikan khusus kepada pengusaha tertentu melalui berbagai pertimbangan. Dengan begitu, jual-beli izin harus dilarang karena transaksi itu "melewati" kewenangan negara untuk menguji kelayakan kelompok pembeli izin.*
- e. *Yang kedua adalah soal misi yang diberikan negara kepada Global TV Awalnya, pada Juli 1999, pemberian frekuensi Global TV dilakukan bukan untuk tujuan komersial. Kelompok The International Islamic Forum for Science Technology and Human Resource Development merancang stasiun yang mengedepankan pendidikan, budaya, serta tayangan kemanusiaan.*
- f. *Izin pun keluar. Namun, Global TV tidak mampu melakukan siaran hingga jatuh tempo izin. Ketika diambil alih oleh Grup Bimantara pada 2000, stasiun itu menyiarkan program milik stasiun MTV-program hiburan khusus untuk remaja dan orang dewasa dari luar negeri. Pelanggaran misi siaran pun terjadi-sesuatu yang dilarang Undang-Undang Penyiaran*

Tahun 1997. Tapi ketika itu terjadi kekosongan regulator siaran televisi. Departemen Perhubungan tidak mengurus materi siaran, sedangkan Departemen Penerangan sudah dibubarkan. -Komisi Penyiaran Indonesia, yang kini mengawasi siaran, belum lagi terbentuk.

- g. Maka meninjau kembali izin Global TV adalah langkah koreksi yang perlu. Selanjutnya, setiap izin frekuensi perlu ditenderkan secara terbuka. Pemberian izin televisi secara tertutup, yang membuat sebagian stasiun nasional berada di kalangan dekat bekas presiden Soeharto, harus segera diakhiri*

Pada wacana (5) terjadi repetisi konstituen antarpagraf, yaitu berupa repetisi seluruhnya yang berupa frasa—dalam hal ini frasa nominal **UU** pada paragraf (5b), (5e), (5f), dan (5g) merupakan perulangan konstituen **UU** pada (5a), seperti yang diperlihatkan berikut ini.

- (5) a. Ribuan kepala desa dari beberapa provinsi berunjuk rasa di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (5/3). Mereka menuntut agar nasib mereka diperbaiki. Jalan untuk perbaikan itu adalah segera merevisi pasal-pasal dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah NO 72 Tahun 2005.*
- (b) Bila mencermati UU tersebut, tampak bahwa masalah-masalah yang mengatur pemerintahan desa kurang sekali mendapat perhatian. Juga terdapat banyak pembatasan hak desa, seperti hak politik perangkat desa, masa jabatan kepala desa yang sebelumnya diatur dalam UU No 5 Tahun 1979 selama delapan tahun dan bisa dipilih kembali, yang kemudian berubah menjadi enam tahun.*
- (e) Selain itu, hingga kini belum ada satu pun UU yang mengatur tentang kepala desa. Selama ini, seperti UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diubah dengan UU Pemerintahan Daerah bukanlah UU tentang kepala desa. Meskipun di dalam UU*

tersebut ada pasal yang mengatur tentang kepala desa, tetapi jumlahnya sangat sedikit.

- (f) *Pengaturan soal kepala desa dalam UU Pemerintahan Daerah itu pun banyak yang rancu. Karena itu, para kepala desa yang datang ke Jakarta menuntut supaya sejumlah pasal yang mengatur tentang kepala desa dalam UU tersebut direvisi. Misalnya, biaya pemilihan kepala desa juga perlu dibebankan ke APBD.*
- (g) *Selain itu, UU tersebut juga mengebiri hak berpolitik kepala desa dengan melarang mereka menjadi pengurus partai politik. Para kepala desa menghendaki ketentuan itu dihapus. Tuntutan ini wajar karena pada level lebih tinggi seperti bupati, gubernur, menteri, bahkan wakil presiden dan presiden, bisa menjadi pengurus partai. Kepala desa menuntut pasal-pasal yang dinilai kontraproduktif dan merupakan kemunduran bagi penyelenggaraan pemerintah desa agar diubah. Kita berharap kepala desa makin diberdayakan untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri. Mereka adalah ujung tombak pemerintah di lapangan.*

Selain repetisi antarparagraf, repetisi konstituen seluruhnya dalam lingkungan paragraf terjadi juga pada wacana (1–5), seperti pada paragraf (1a), (2f), (3d), (3e), (4b), (4e), (4f), (4g), (5a), (5f), dan (5g) berikut ini.

- (1) a. *Berbeda dengan periode sebelumnya, DPR sekarang relatif tergolong gencar mengkritik **pemerintah**. Ini perkara yang bagus bagi kehidupan demokrasi karena memang tugas DPR mengontrol **pemerintah**.*
- (2) b. *Ketika **Hamis** sedang dalam proses membentuk pemerintahan sekarang ini pun, Israel ingin menerornya, yaitu dengan mengeluarkan ancaman, pihaknya bisa saja membunuh pemimpin **Hamis**, Ismail Haniya.*
- e. *Selain dipicu oleh kejadian-kejadian tersebut, Israel juga terus merasa tidak nyaman dengan tampilnya **Hamis** di kekuasaan karena kelompok ini diketahui masih bersumpah untuk menghancurkan Israel. **Hamis** juga menolak seruan*

internasional untuk meninggalkan ideologi kekerasan dan anti-Israel. Di pihak lain **Hamas** sejauh ini bisa mempertahankan penghentian aksi peledakan bom bunuh diri selama satu tahun.

- f. Selanjutnya wartawan menanyakan, apakah Haniya juga akan disasar kalau **Hamas** memulai kembali serangan. Mofaz menjawab, kalau **Hamas** tidak mau mengakui persetujuan (yang sejauh ini ada antara Israel dan Palestina), juga tidak bersedia meninggalkan kekerasan, dan terus menantang Israel, tak seorang **Hamas/Palestina** yang imun. Bukan hanya Ismail Haniya.
 - g. Menanggapi ancaman ini, juru bicara **Hamas**, Sami Abu Zuhri, mengatakan, "Ancaman Israel tidak membuat takut **Hamas** atau rakyat Palestina, dan taktik pemerasan dan ancaman ini tidak akan membelenggu kami."
- (3) f. Pemerintah, dalam hal ini **PT KA**, dituntut harus disiplin. Instruksi Menteri Hatta Rajasa untuk tidak memberangkatkan kereta bila masih ada penumpang di atap sudah jelas. **PT KA** harus menegakkan disiplin karena hal ini berkaitan dengan angkutan massal. Bila ceroboh, risikonya besar. Karena itu, tidak ada jalan lain, **PT KA** harus terus membenahi manajemennya agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang.
- (4) d. Izin untuk **Global TV** mewakili masa pemberian izin televisi secara tertutup itu-proses yang seharusnya dikoreksi. Selain itu, ada dua hal yang patut dipersoalkan sekitar **Global TV**.
- e. Yang kedua adalah soal misi yang diberikan negara kepada **Global TV** Awalnya, pada Juli 1999, pemberian frekuensi **Global TV** dilakukan bukan untuk tujuan komersial. Kelompok The International Islamic Forum for Science Technology and Human Resource Development merancang stasiun yang mengedepankan pendidikan, budaya, serta tayangan kemanusiaan.
- (5) a. Bila mencermati **UU** tersebut, tampak bahwa masalah-masalah yang mengatur pemerintahan desa kurang sekali mendapat perhatian. Juga terdapat banyak pembatasan hak desa, seperti hak politik perangkat desa,

masa jabatan kepala desa yang sebelumnya diatur dalam UU No 5 Tahun 1979 selama delapan tahun dan bisa dipilih kembali, yang kemudian berubah menjadi enam tahun.

- b. Selain itu, hingga kini belum ada satu pun UU yang mengatur tentang kepala desa. Selama ini, seperti UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diubah dengan UU Pemerintahan Daerah bukanlah UU tentang kepala desa. Meskipun di dalam UU tersebut ada pasal yang mengatur tentang kepala desa, tetapi jumlahnya sangat sedikit.*
- f. Pengaturan soal kepala desa dalam UU Pemerintahan Daerah itu pun banyak yang rancu. Karena itu, para kepala desa yang datang ke Jakarta menuntut supaya sejumlah pasal yang mengatur tentang kepala desa dalam UU tersebut direvisi. Misalnya, biaya pemilihan kepala desa juga perlu dibebankan ke APBD.*

Pada wacana (1), khususnya paragraf (1a) terdapat nomina *pemerintah* yang direpetisikan secara keseluruhan, yaitu pada kalimat (i) *Berbeda dengan periode sebelumnya, DPR sekarang relatif tergolong gencar mengkritik pemerintah* dan (ii) *Ini perkara yang bagus bagi kehidupan demokrasi karena memang tugas DPR mengontrol pemerintah.*

Pada wacana (2)—dalam hal ini—paragraf (2b) dan (2g) terjadi repetisi secara keseluruhan sebanyak empat kali, yaitu nomina *diri Hamas* dalam konstruksi *Ketika Hamas sedang dalam proses membentuk pemerintahan sekarang ini pun, Israel ingin menerornya, yaitu dengan mengeluarkan ancaman, pihaknya bisa saja membunuh pemimpin Hamas, Ismail Haniya dan Menanggapi ancaman ini, juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan, "Ancaman Israel tidak membuat takut Hamas atau rakyat Palestina, dan taktik pemerasan dan ancaman ini tidak akan membelenggu kami. Sementara itu, pada paragraf (2e) terjadi repetisi Hamas sebanyak tiga kali, yaitu pada (i) Selain dipicu oleh kejadian-kejadian tersebut, Israel juga terus merasa tidak nyaman dengan tampilnya Hamas di kekuasaan karena kelompok ini diketahui masih bersumpah untuk menghancurkan Israel, (ii) Hamas juga menolak*

seruan internasional untuk meninggalkan ideologi kekerasan dan anti-Israel, dan (iii) Di pihak lain Hamas sejauh ini bisa mempertahankan penghentian aksi peledakan bom bunuh diri selama satu tahun. Hal yang sama terjadi juga pada (4f), yaitu pada (i) Selanjutnya wartawan menanyakan, apakah Haniya juga akan disasar kalau Hamas memulai kembali serangan dan (ii) Mofaz menjawab, kalau Hamas tidak mau mengakui persetujuan (yang sejauh ini ada antara Israel dan Palestina), juga tidak bersedia meninggalkan kekerasan, dan terus menantang Israel, tak seorang Hamas/Palestina) yang imun. Bukan hanya Ismail Haniya.

Pada wacana (3), khususnya paragraf (3f) terjadi repetisi frasa nominal *PT KA* secara keseluruhan sebanyak tiga kali, yaitu pada (i) *Pemerintah, dalam hal ini PT KA, dituntut harus disiplin,* (ii) *PT KA harus menegakkan disiplin karena hal ini berkaitan dengan angkutan massal, dan (iii) Karena itu, tidak ada jalan lain, PT KA harus terus membenahi manajemennya agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang.*

Pada wacana (4)—dalam hal ini—paragraf (4d) terjadi repetisi frasa nominal *Global TV* secara keseluruhan sebanyak dua kali, yaitu pada (i) *Izin untuk Global TV mewakili masa pemberian izin televisi secara tertutup itu-proses yang seharusnya dikoreksi dan pada (ii) Selain itu, ada dua hal yang patut dipersoalkan sekitar Global TV.* Hal yang sama terdapat juga pada paragraf (4e), yaitu pada rangkaian kalimat *Yang kedua adalah soal misi yang diberikan negara kepada Global TV Awalnya, pada Juli 1999, pemberian frekuensi Global TV dilakukan bukan untuk tujuan komersial.*

Pada wacana (5),—dalam hal ini—paragraf (5a) terjadi repetisi frasa nominal *UU* secara keseluruhan sebanyak dua kali, yaitu pada (i) *Bila mencermati UU tersebut, tampak bahwa masalah-masalah yang mengatur pemerintahan desa kurang sekali mendapat perhatian dan (ii) Juga terdapat banyak pembatasan hak desa, seperti hak politik perangkat desa, masa jabatan kepala desa yang sebelumnya diatur dalam UU No 5 Tahun 1979 selama delapan tahun dan bisa dipilih kembali, yang kemudian berubah menjadi enam tahun. Sama halnya dengan paragraf (5a), pada (5f) terjadi juga repetisi konstituen UU, sebanyak dua kali, yaitu pada (i) Pengaturan soal kepala desa*

dalam **UU Pemerintahan Daerah** itu pun banyak yang rancu dan (ii) Karena itu, para kepala desa yang datang ke Jakarta menuntut supaya sejumlah pasal yang mengatur tentang kepala desa dalam **UU** tersebut direvisi. Misalnya, biaya pemilihan kepala desa juga perlu dibebankan ke APBD. Sementara itu, Pada paragraf (5b) lima kali repetisi konstituen **UU**, yaitu pada (i) Selain itu, hingga kini belum ada satu pun **UU** yang mengatur tentang kepala desa, (ii) Selama ini, seperti **UU No 22 Tahun 1999** tentang Otonomi Daerah yang kemudian diubah dengan **UU Pemerintahan Daerah** bukanlah **UU** tentang kepala desa, dan (iii) Meskipun di dalam **UU** tersebut ada pasal yang mengatur tentang kepala desa, tetapi jumlahnya sangat sedikit.

3.8.2 Repetisi (Perulangan) Sebagian

Perulangan sebagian dapat diartikan bahwa perulangan pada bagian selanjutnya tidak sepenuhnya terjadi sebagaimana konstruksi konstituen yang menjadi acuan perulangan. Oleh karena itu, repetisi (perulangan) sebagian yang akan dibahas di sini terbatas pada perulangan frasa nominal, seperti pada contoh berikut ini.

- (1) (a) *Beberapa kali sudah DPR menggunakan hak interpelasi itu. Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai masalah busung lapar dan polio. Perkara ini menjadi hangat bukan menyangkut jawaban pemerintah atas materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung.*
- (b) *Isi surat Agung Laksono ialah bahwa presiden dapat mewakilkan kepada menteri untuk menjawab hak interpelasi DPR. Dan benar yang menjawab perihal busung lapar dan polio di DPR adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Bukan presiden sendiri. Kritik anggota pun meluncur ke arah Ketua DPR. Untuk apa menggunakan hak interpelasi dan sidang paripurna jika yang menjawab menteri? Bukankah interpelasi ditujukan kepada presiden? Kalau urusannya ke menteri, cukup rapat kerja dengan komisi*

dan tidak perlu menggelar rapat paripurna. (Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)

- (2) (a) Rezim Widya Purnama kini Beralih ke gerbong Ari Soemarno. (b) Tidak satu pun. direksi di masa Widya Purnama bergabung dalam pasukan Ari Soemarno. (c) Gerbong Ari benar-benar baru. (Media Indonesia/Kamis/9-3-2006)
- (3) (a) Maka, Kementerian Koordinator Perekonomian pekan lalu mengumumkan diterbitkannya **paket kebijakan iklim investasi**. (b) Di tengah persaingan menarik investasi antarnegara di Asia yang semakin ketat, **paket** ini sangat diharapkan mampu memperbaiki iklim investasi. (c) Diharapkan juga **paket** ini bisa mengembalikan Indonesia menjadi tempat tujuan investasi yang menarik, terutama bagi investor asing. (Republika/7 MARET 2006)
- (4) (a) Bagi pemerintah, **paket yang mencakup perbaikan dan penyederhanaan perizinan, undang-undang penanaman modal, sampai urusan kepabeanan itu** agaknya menjadi gantungan harapan masuknya investasi. (b) Tapi, sebagian kalangan tetap saja menilai **paket** tersebut secara substansi tidak memuat hal-hal baru. (c) Bahkan, ada pula yang melihat **paket** ini masih berbau pesanan lembaga internasional. (Republika/7 MARET 2006)
- (5) (a) Pada 1998, Cemex membeli 25,5 persen saham PT Semen Gresik, perusahaan BUMN semen Indonesia, yang juga holding dan PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang. (b) Dalam transaksi itu, Cemex memiliki pula **hak untuk menjadi pemegang saham mayoritas pada 2001**. (c) Namun, ketika Cemex ingin menggunakan **hak** itu, pemerintah sebagai pemilik 51 persen saham Semen Gresik, justru menolak menjual sahamnya. (d) Dua anak perusahaan Semen Gresik malah berniat melakukan memisahkan diri jika Cemex benar-benar menjadi pemegang saham mayoritas. (Republika/7 MARET 2006)
- (6) (a) Dua kecelakaan kereta api yang melayani angkutan umum di Jabodetabek terjadi dua hari berturut-turut akhir pekan lalu. (b) Kejadian pertama, Jumat (3/3). (c) **Atap gerbong keempat KRD 907 jurusan Rangkasbitung—**

- Tanah Abang runtuh.** (d) Puluhan penumpang di atas atap berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari atap. (e) Akibatnya, puluhan penumpang cedera. (Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)
- (7) (a) Oleh karena itulah, penegasan **Kepala Polri Jenderal Pol Sutanto** bahwa segala bentuk perjudian di Indonesia tetap menjadi target utama untuk diberantas oleh jajaran kepolisian. Bahkan, dia memerintahkan agar judi diberantas sampai ke akar-akarnya dengan menangkap siapa pun yang terlibat, termasuk aktor intelektual atau bandar perjudian tersebut (Pembaruan, 9/3).
- (b) Kita sangat mendukung langkah tegas **Kapolri** untuk secara konsisten memberantas segala bentuk perjudian. Kita berharap sikap tersebut benar-benar menjadi sikap Polri sebagai lembaga yang juga menjadi sikap anggota kepolisian RI. Itu berarti, polisi juga harus bersikap profesional dalam menangani segala bentuk perjudian. (Suara Pembaharuan/Jumat, 10 Maret 2006)
- (8) (a) Ribuan kepala desa dari beberapa provinsi berunjuk rasa di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (5/3). Mereka menuntut agar nasib mereka diperbaiki. Jalan untuk perbaikan itu adalah segera merevisi pasal-pasal dalam **UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah NO 72 Tahun 2005**.
- (b) Bila mencermati **UU** tersebut, tampak bahwa masalah-masalah yang mengatur pemerintahan desa kurang sekali mendapat perhatian. Juga terdapat banyak pembatasan hak desa, seperti hak politik perangkat desa, masa jabatan kepala desa yang sebelumnya diatur dalam **UU No 5 Tahun 1979** selama delapan tahun dan bisa dipilih kembali, yang kemudian berubah menjadi enam tahun. (Suara Pembaharuan/Kamis, 9 Maret 2006)
- (9) (a) **Berita bentrokan antara anggota TNI dan polisi di Ambon** akhir pekan lalu membuat kita pilu. (b) **Bentrokan** itu dipicu oleh masalah sepele dan sifatnya personal. (c) Akibatnya, terjadi serang menyerang antara aparat Kodam XVI Pattimura dan aparat Polda Maluku. (Suara Pembaharuan/Kamis, 7 Maret 2006)

- (10) (a) *Berita yang kemarin kita baca adalah usulan perombakan PBB seperti disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan hari Rabu, 8 Maret, lalu.*
- (b) *Sekjen PBB mengusulkan perubahan besar-besaran yang hasilnya bisa merampingkan prosedur yang kaotik, membuat perekrutan dan pelatihan lebih profesional, dan bisa menyubkontrakkan layanan di luar negeri karena mahal kalau dikerjakan di New York.*
(Kompas/Jumat, 10 Maret 2006/Hal. 6)

Pada wacana (1) paragraf (1b) terdapat frasa nominal *Ketua DPR*. Frasa nominal *Ketua DPR* tergolong perulangan sebagian karena frasa nominal itu merupakan perulangan sebagian dari frasa nominal *Ketua DPR Agung Laksono* yang terdapat pada wacana (1) paragraf (1a). Perulangan sebagian frasa nominal *Ketua DPR* hanya berupa nama jabatan dan tidak mengulang kembali nama diri *Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI)*—dalam hal ini—frasa nominal *Agung Laksono*.

Pada wacana (2) paragraf (2c) terdapat frasa nominal *gerbong Ari*. Frasa nominal *gerbong Ari* tergolong perulangan sebagian karena frasa nominal itu merupakan perulangan sebagian dari frasa nominal *gerbong Ari Soemarno* yang terdapat pada wacana paragraf (2a). Perulangan sebagian frasa nominal *gerbong Ari* ditandai dengan ketidaklengkapan nama diri—dalam hal ini—*Soemarno* dalam konstruksi nama diri *Ari Soemarno*.

Pada wacana (3) paragraf (3b) dan (3c) terdapat nomina *paket*. Nomina *paket* ini tergolong perulangan sebagian karena nomina itu merupakan perulangan dari frasa nominal *paket kebijakan iklim investasi* yang terdapat pada wacana paragraf (3a). Perulangan sebagian nomina *paket* ditandai dengan ketidaklengkapan konstruksi frasa nominal *paket kebijakan iklim investasi*.

Pada wacana (4b) terdapat nomina *paket*. Nomina *paket* ini tergolong perulangan sebagian karena nomina itu merupakan perulangan sebagian dari frasa nominal *paket yang mencakup perbaikan dan penyederhanaan perizinan, undang-undang penanaman modal, sampai urusan kepabeaan itu* yang terdapat pada wacana paragraf (4a). Perulangan sebagian nomina *paket* ditandai dengan ketidaklengkapan konstruksi frasa nominal *paket yang mencakup*

perbaikan dan penyederhanaan perizinan, undang-undang penanaman modal, sampai urusan kepabeanan itu.

Pada wacana (5c) terdapat nomina *hak*. Nomina *hak* ini tergolong perulangan sebagian karena nomina itu merupakan perulangan sebagian dari frasa nominal *hak untuk menjadi pemegang saham mayoritas pada 2001* yang terdapat pada wacana paragraf (5b). Perulangan sebagian nomina *hak* ditandai dengan ketidaklengkapan konstruksi frasa nominal *hak untuk menjadi pemegang saham mayoritas pada 2001*.

Pada wacana (6d) terdapat nomina *atap*. Nomina *atap* ini tergolong perulangan sebagian karena nomina itu merupakan perulangan sebagian dari frasa nominal *atap gerbong keempat KRD 907 jurusan Rangkasbitung–Tanah Abang* yang terdapat pada wacana paragraf (6c). Perulangan sebagian nomina *hak* ditandai dengan ketidaklengkapan konstruksi frasa nominal *atap gerbong keempat KRD 907 jurusan Rangkasbitung–Tanah Abang*.

Pada wacana (7) paragraf (7b) terdapat akronim *Kapolri*. Akronim *Kapolri* ini tergolong perulangan sebagian karena akronim itu merupakan perulangan sebagian dari frasa nominal *Kepala Polri Jenderal Pol Sutanto* yang terdapat pada wacana paragraf (7a). Perulangan sebagian nomina *hak* ditandai dengan ketidaklengkapan konstruksi frasa nominal *Kepala Polri Jenderal Pol Sutanto*.

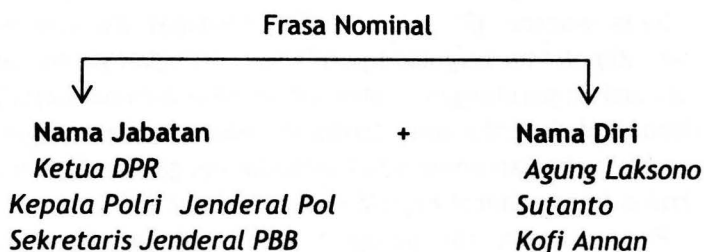
Pada wacana (8) paragraf (8b) terdapat frasa nominal *undang-undang*. Frasa nominal *undang-undang* ini tergolong perulangan sebagian karena feasa nominal itu merupakan perulangan sebagian dari frasa nominal yang berupa nama undang-undang—dalam hal ini—*UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah NO 72 Tahun 2005* yang terdapat pada wacana paragraf (8a). Perulangan sebagian frasa nominal *undang-undang* ditandai dengan ketidaklengkapan konstruksi frasa nominal *UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah NO 72 Tahun 2005*.

Pada wacana (9b) terdapat nomina *bentrokan*. Nomina *bentrokan* ini tergolong perulangan sebagian karena nomina itu merupakan perulangan sebagian dari frasa nominal *bentrokan antara anggota TNI dan polisi di Ambon* yang terdapat pada wacana paragraf (9a). Perulangan sebagian nomina *bentrokan* ditandai

dengan ketidaklengkapan konstruksi frasa nominal *bentrok* antara anggota TNI dan polisi di Ambon.

Pada wacana (10) paragraf (10b) terdapat frasa nominal *Sekjen PBB*. Frasa nominal *Sekjen PBB* ini tergolong perulangan sebagian karena frasa nominal itu merupakan perulangan sebagian dari frasa nominal *Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan* yang terdapat pada wacana paragraf (10a). Perulangan sebagian frasa nominal *Sekjen PBB* ditandai dengan ketidaklengkapan konstruksi frasa nominal *Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan*.

Perlu ditambahkan bahwa konstruksi frasa nominal pada wacana (1)—dalam hal ini— *Ketua DPR Agung Laksono*, (7)—dalam hal ini— *Kepala Polri Jenderal Pol Sutanto*, dan (10) —dalam hal ini— *Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan* mempunyai pola yang unik karena berpola nama jabatan + nama diri, seperti ditulis kembali berikut ini.



Frasa nominal *Ketua DPR* tergolong sebagai perulangan sebagian dapat dibuktikan dengan keberterimaan penempatan (i) frasa nominal *Agung Laksono* mengikuti frasa nominal *Ketua DPR* pada wacana (1b); (ii) nomina *Soemarno* mengikuti frasa nominal *gerbong Ari* pada paragraf (2c); (iii) frasa nominal *kebijakan iklim investasi* mengikuti nomina *paket* pada wacana (3) paragraf (3b) dan (3c); (iv) frasa nominal *yang mencakup perbaikan dan penyederhanaan perizinan, undang-undang penanaman modal, sampai urusan kepabeanan itu* mengikuti nomina *paket* pada wacana (4b); (v) frasa nominal *untuk menjadi pemegang saham mayoritas pada 2001* mengikuti nomina *hak* pada wacana (5c); (vi) frasa nominal *gerbong keempat KRD 907 jurusan Rangkasbitung—Tanah Abang* mengikuti nominal *atap* pada wacana (6d); (vii) frasa nominal *Jenderal Pol Sutanto* mengikuti nomina (aktonim)

Kapolri pada wacana (7) paragraf (7b); (viii) frasa nominal No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah NO 72 Tahun 2005 mengikuti frasa nominal undang-undang pada wacana (8) paragraf (8b); (ix) frasa nominal antara anggota TNI dan polisi di Ambon mengikuti nomina bentrokan pada wacana (9b); dan (x) frasa nominal (nama diri) Kofi Annan mengikuti frasa nominal (nama jabatan) Sekjen PBB pada wacana (10) paragraf (10b). Untuk mendukung pembuktian ini, contoh (1–10) dapat ditulis kembali menjadi (1a–10a) berikut ini.

- (1a) (a) *Beberapa kali sudah DPR menggunakan hak interpelasi itu. Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai masalah busung lapar dan polio. Perkara ini menjadi hangat bukan menyangkut jawaban pemerintah atas materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung.*
- (b) *Isi surat Agung Laksono ialah bahwa presiden dapat mewakili kepada menteri untuk menjawab hak interpelasi DPR. Dan benar yang menjawab perihal busung lapar dan polio di DPR adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Bukan presiden sendiri. Kritik anggota pun meluncur ke arah Ketua DPR Agung Laksono. Untuk apa menggunakan hak interpelasi dan sidang paripurna jika yang menjawab menteri? Bukankah interpelasi ditujukan kepada presiden? Kalau urusannya ke menteri, cukup rapat kerja dengan komisi dan tidak perlu menggelar rapat paripurna. (Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)*
- (2a) (a) *Rezim Widya Purnama kini Beralih ke gerbong Ari Soemarno. (b) Tidak satu pun. direksi di masa Widya Purnama bergabung dalam pasukan Ari Soernarno. (c) Gerbong Ari Soemarno benar-benar baru. (Media Indonesia/Kamis/9-3-2006)*
- (3) (a) *Maka, Kementerian Koordinator Perekonomian pekan lalu mengumumkan diterbitkannya paket kebijakan iklim investasi. (b) Di tengah persaingan menarik investasi antarnegara di Asia yang semakin ketat, paket*

kebijakan iklim investasi ini sangat diharapkan mampu memperbaiki iklim investasi. (c) Diharapkan juga paket kebijakan iklim investasi ini bisa mengembalikan Indonesia menjadi tempat tujuan investasi yang menarik, terutama bagi investor asing. (Republika/7 MARET 2006)

- (4a) (a) **Bagi pemerintah, paket yang mencakup perbaikan dan penyederhanaan perizinan, undang-undang penanaman modal, sampai urusan kepabeaian itu agaknya menjadi gantungan harapan masuknya investasi. (b) Tapi, sebagian kalangan tetap saja menilai paket yang mencakup perbaikan dan penyederhanaan perizinan, undang-undang penanaman modal, sampai urusan kepabeaian itu secara substansi tidak memuat hal-hal baru. (c) Bahkan, ada pula yang melihat paket ini masih berbau pesanan lembaga internasional. (Republika/7 MARET 2006)**
- (5a) (a) **Pada 1998, Cemex membeli 25,5 persen saham PT Semen Gresik, perusahaan BUMN semen Indonesia, yang juga holding dan PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang. (b) Dalam transaksi itu, Cemex memiliki pula hak untuk menjadi pemegang saham mayoritas pada 2001. (c) Namun, ketika Cemex ingin menggunakan hak untuk menjadi pemegang saham mayoritas pada 2001 itu, pemerintah sebagai pemilik 51 persen saham Semen Gresik, justru menolak menjual sahamnya. (d) Dua anak perusahaan Semen Gresik malah berniat melakukan memisahkan diri jika Cemex benar-benar menjadi pemegang saham mayoritas. (Republika/7 MARET 2006)**
- (6a) (a) **Dua kecelakaan kereta api yang melayani angkutan umum di Jabodetabek terjadi dua hari berturut-turut akhir pekan lalu. (b) Kejadian pertama, Jumat (3/3). (c) Atap gerbong keempat KRD 907 jurusan Rangkasbitung–Tanah Abang runtuh. (d) Puluhan penumpang di atas atap gerbong keempat KRD 907 jurusan Rangkasbitung–Tanah Abang berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari atap. (e) Akibatnya, puluhan penumpang cedera. (Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)**

- (7a) (a) Oleh karena itulah, penegasan **Kepala Polri Jenderal Pol Sutanto** bahwa segala bentuk perjudian di Indonesia tetap menjadi target utama untuk diberantas oleh jajaran kepolisian. Bahkan, dia memerintahkan agar judi diberantas sampai ke akar-akarnya dengan menangkap siapa pun yang terlibat, termasuk aktor intelektual atau bandar perjudian tersebut (Pembaruan, 9/3).
- (b) Kita sangat mendukung langkah tegas **Kapolri Jenderal Pol Sutanto** untuk secara konsisten memberantas segala bentuk perjudian. Kita berharap sikap tersebut benar-benar menjadi sikap Polri sebagai lembaga yang juga menjadi sikap anggota kepolisian RI. Itu berarti, polisi juga harus bersikap profesional dalam menangani segala bentuk perjudian. (Suara Pembaharuan/Jumat, 10 Maret 2006)
- (8a) (a) Ribuan kepala desa dari beberapa provinsi berunjuk rasa di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (5/3). Mereka menuntut agar nasib mereka diperbaiki. Jalan untuk perbaikan itu adalah segera merevisi pasal-pasal dalam **UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah NO 72 Tahun 2005**.
- (b) Bila mencermati **UU UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah NO 72 Tahun 2005** tersebut, tampak bahwa masalah-masalah yang mengatur pemerintahan desa kurang sekali mendapat perhatian. Juga terdapat banyak pembatasan hak desa, seperti hak politik perangkat desa, masa jabatan kepala desa yang sebelumnya diatur dalam UU No 5 Tahun 1979 selama delapan tahun dan bisa dipilih kembali, yang kemudian berubah menjadi enam tahun. (Suara Pembaharuan/Kamis, 9 Maret 2006)
- (9a) (a) **Berita bentrokan antara anggota TNI dan polisi di Ambon** akhir pekan lalu membuat kita pilu. (b) **Bentrokan antara anggota TNI dan polisi di Ambon** itu dipicu oleh masalah sepele dan sifatnya personal. (c) Akibat-

nya, terjadi serang menyerang antara aparat Kodam XVI Pattimura dan aparat Polda Maluku. (Suara Pembaharuan/Kamis, 7 Maret 2006)

- (10a) (a) **Berita yang kemarin kita baca adalah usulan perombakan PBB seperti disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan hari Rabu, 8 Maret, lalu.**
- (b) **Sekjen PBB Kofi Annan mengusulkan perubahan besar-besaran yang hasilnya bisa merampingkan prosedur yang kaotik, membuat perekrutan dan pelatihan lebih profesional, dan bisa menyubkontrakkan layanan di luar negeri karena mahal kalau dikerjakan di New York.** (Kompas/Jumat, 10 Maret 2006/Hal. 6)

BAB IV

SIMPULAN

Perkembangan analisis wacana (*discourse analysis*) di Indonesia baru berkembang pada tahun 1970-an. Linguis Indonesia yang pertama memperkenalkan analisis itu adalah Oetomo (1992:6).

Salah satu buku yang khusus memuat kajian kohesi leksikal dalam berbagai jenis wacana adalah *Analisis Wacana Iklan, Lagu, Puisi, Cerpen, Novel, dan Drama Penanda* (Sumarlam, dkk., 2004). Dalam buku ini terdapat kajian kohesi leksikal dalam berbagai jenis wacana, seperti (i) wacana iklan, (ii) wacana lirik lagu, dan (iii) wacana karya sastra. Adapun kajian kohesi leksikal yang berhasil diungkapkan meliputi (i) repetisi (perulangan) yang berupa mesodiplosis (pengulangan satuan lingual di tengah-tengah baris atau kalimat secara berturut-turut, (ii) sinonimi (padanan kata), (iii) kolokasi (*sanding kata*), dan majas.

Dalam Editorial Surat Kabar Berbahasa Indonesia alat kohesi leksikal yang digunakan terbatas pada kesinoniman, keantoniman (opisisi mutlak, antonim, oposisi kebalikan, dan oposisi hierarkis/berdaur), kehiponiman, kemeroniman, keparoniman, kolokasi, dan repetisi/pengulangan. Penggunaan alat-alat kohesi tersebut tentu dipengaruhi keberagaman konstituen (bentuk-bentuk/kelas kata) yang digunakan dalam editorial surat kabar berbahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Badid, Abbas. 1988. "Jenis-jenis Informasi dalam Kalimat: Konsep Dasar dan Permasalahannya" dalam Lapoliwa dan Sitanggang. 1988. *Seminar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Arifin, E. Zaenal. 1993. "Alat Kohesi Gramatikal dan Leksikal dalam Wacana Cerita Pendek Bahasa Sunda." Tesis PPS UI.
- Alwi, Hasan, dkk. 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Alwi, Hasan, dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chaer, Abdul. 1990. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cruse, D. Alan. 1986. *Lexical Semantics*. New York: Cambridge University Press.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: IKIS.
- Gumperz, John J. 1982. *Discourse Strategies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Halliday, M.A.K dan Roqaiya Hasan. 1976. *Cohesion in English*. London: Longman.
- _____. 1989. *Language, Context, and Text: Aspect of Language in A Social-Semiotic Perspective*. Oxford: Oxford University Press.

<http://www.kwary.net/linguistics/>).

Iswati, Ellya. 1993. "Relasi Semantik Sinonimik Perangkat Kata Bahasa Indonesia". *Penyelidikan Bahasa dan Perkembangan Wawasannya 1*. Jakarta: Masyarakat Linguistik Indonesia.

Johnstone, Barbara. 2002. *Discourse Analysis*. Massachusetts: Blackwell Publishers.

Kridalaksana, Harimurti. 1986. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Oetomo, Dede. 1992. "Pelahiran dan Perkembangan Analisis Wacana (*Discourse Analysis*).". Jakarta: Pellba 6.

Puryadi, Dedi. 2006. "Kohesi Leksikal dalam Wacana Olahraga". Dalam *Rampak Serantau Bilangan 13, 2006*. Brunai Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Renkema, Jan. 1993. *Discourse Studies an Introductory Textbook*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Saeed, John. I. 2000. *Semantics*. Oxford: Blackwell.

Subroto, Edi. 1988. "Relasi Semantik Sinonimik dan Hiponimik Kata-Kata Bahasa Indonesia. Makalah dalam *Kongres Bahasa Indonesia V, Jakarta, 28 Oktober–2 November 1988*.

Suhaebah, Ebah. 1998. "Kohesi dalam Bahasa Indonesia: Kajian atas Teks Tajuk Rencana Lima Surat Kabar Harian di Jakarta". Tesis Program Studi Linguistik, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Suladi, dkk. 2000. *Kohesi dalam Media Massa Cetak Bahasa Indonesia: Studi Kasus tentang Berita Utama dan Tajuk*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Sumarlam, dkk. 2003. *Teori dan Praktik Analisis Wacana*. Surakarta: Pustaka Cakra.

Suryawinata, Zuchridin dan Sugeng Haryanto. 2003. *Translation: Bahasan Teori dan Penuntun Praktis Menerjemahkan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Zgusta, L. 1971. *Manual of Lexicography*. The Hague: Mouton.

Lampiran:

(A) MEDIA INDONESIA

EDITORIAL
OBRAL HAK INTERPELASI
(Media Indonesia/Jumat/9-3-2006)

Berbeda dengan periode sebelumnya, DPR sekarang relatif tergolong gencar mengkritik pemerintah. Ini perkara yang bagus bagi kehidupan demokrasi karena memang tugas DPR mengontrol pemerintah.

Salah satu hak DPR yang penting dalam urusan mengontrol pemerintah itu adalah hak interpelasi. Hak ini diatur dalam konstitusi.

Beberapa kali sudah DPR menggunakan hak interpelasi itu. Di antaranya yang sekarang hangat ialah hak interpelasi mengenai masalah busung lapar dan polio. Perkara ini menjadi hangat bukan menyangkut jawaban pemerintah atas materi atau substansi yang ditanyakan, tapi perihal surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY dan mikrofon yang mati ketika rapat paripurna berlangsung.

Isi surat Agung Laksono ialah bahwa presiden dapat mewakili kepada menteri untuk menjawab hak interpelasi DPR. Dan benar yang menjawab perihal busung lapar dan polio di DPR adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Bukan presiden sendiri. Kritik anggota pun meluncur ke arah Ketua DPR. Untuk apa menggunakan hak interpelasi dan sidang paripurna jika yang menjawab menteri? Bukankah interpelasi ditujukan kepada presiden? Kalau urusannya ke menteri, cukup rapat kerja dengan komisi dan tidak perlu menggelar rapat paripurna.

Inti kecaman bahwa Ketua DPR telah merendahkan posisi parlemen. Bahkan, dianggap telah bersekongkol dengan eksekutif untuk menggagalkan hak interpelasi. Sebuah pernyataan yang memperkuat penilaian bahwa DPR cuma tukang stempel pemerintah.

Dalam rapat paripurna itu tiba-tiba mikrofon mati. Kematian mikrofon ini menyebabkan "kematian" lainnya yang sangat penting,

yaitu anggota DPR tidak bisa melakukan interupsi. Maka, tudingan bersekongkol dengan eksekutif pun semakin menguat. Bahwa, matinya mikrofon pada sidang paripurna karena pemerintah tidak siap berdialog dan diproteksi dengan mikrofon dimatikan.

Begitulah, silang selimpat mengenai hak interpelasi DPR telah berpindah keluar gelanggang persoalan. Yang disorot bukan kebenaran jawaban pemerintah, bukan substansi mengenai perkara busung lapar dan *folio*, melainkan mikrofon dan surat Ketua DPR.

Pekerjaan DPR memang berpolitik. Main politik adalah urusannya. *Politicking* merupakan hidupnya sehari-hari. Namun, berpolitik dengan kehilangan substansi, bahkan memilih meributkan soal mati-hidupnya mikrofon, cuma menunjukkan buruknya kualitas berpolitik para wakil rakyat.

Ekornya ialah menjadikan hak interpelasi DPR sebagai hak murahan yang telah dipakai dengan obral. Murahan, obral, karena akhirnya yang disorot bukan substansi jawaban pemerintah, tapi urusan “dalam negeri” DPR sendiri.

EDITORIAL
PEKERJAAN RUMAH DIREKSI BARU PERTAMINA
(Media Indonesia/Kamis/9-3-2006)

Teka-teki tentang pergantian direksi Pertamina akhirnya terjawab. Janji pemerintah melakukan *overhaul* kepada BUMN perminyakan itu pun terpenuhi.

Rezim Widya Purnama kini Beralih ke gerbong Ari Soemarno. Tidak satu pun. direksi di masa Widya Purnama bergabung dalam pasukan Ari Soemarno. Gerbong Ari benar-benar baru.

Direksi baru Pertamina itu dilantik kemarin. Mereka adalah Komisariss Utama J Purwono, Direktur Utama Ari Soemarno, Wakil Direktur Utama Iin Arifin Takhyani, Direktur Pengolahan Suroso Atmomartoyo; Direktur Keuangan Fredefick ST Siahaan, Direktur Umum Sukusen Soernarinda, Direktur Pemasaran Achmad Faisal, serta Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Soni Sumarsono.

Pemimpin baru tentu menyertakan harapan baru pula. Harapan itu kian sempurna karena Pertamina selama ini mengesankan sebagai sebuah BUMN dengan nama besar, tapi hidupnya kembang kempis. Itu ironis.

Sebagai perusahaan milik negara dan sebuah negara dengan kandungan minyak yang besar, seharusnya Pertamina menjadi BUMN yang kuat. Tapi yang terjadi sebaliknya. Pertamina sering kekurangan dana segar.

Sering pula terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas karena transportasi yang tidak lancar. Ketersediaan minyak sering tidak memenuhi ketentuan 26 hari. Semua itu terkait dengan manajemen Pertamina sendiri.

Tantangan besar yang dihadapi Pertamina adalah menjadi sebuah BUMN yang produktif dan efisien. Untuk itu, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan audit menyeluruh. Itu untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, atau sehat dan tidaknya perusahaan.

Dengan membedah diri sendiri, Pertamina akan menyusun langkah-langkah ke depan yang lebih kompetitif. Pertamina bisa tahan guncangan dan badai karena tidak digerogoti inefisiensi.

Posisi Pertamina saat ini memang kian sulit, terutama setelah masuknya sejumlah operator asing dalam penjualan BBM di dalam

negeri, sektor yang selarna ini dimonopoli. Kini operator asing seperti Pettonas dari Malaysia, Shell dari Belanda, dan Gulf dari Amerika Serikat mulai menyaingi Pertamina dengan membangun pompa bensin di Indonesia.

Di sisi lain, masih ada sisa-sisa tabiat warisan masa lalu yang memandang Pertamina sebagai sapi perah. Sebagai BUMN yang dinilai berlimpah duit, Pertamina seolah menjadi sinterklas. Menjadi objek perasan dari pejabat eksekutif, anggota parlemen, partai politik hingga organisasi kemasyarakatan. Beban nonneraca menjadi menggunung.

Kita percaya direksi baru Pertamina mempunyai cara jitu untuk mengakhiri semua itu. Direksi baru mempunyai pisau yang tajam untuk membedah dan memutus semua rantai inefisiensi tanpa ada yang perlu merasa sakit.

Sekarang saatnya Pertamina tumbuh menjadi BUMN kuat. Dan, Pertamina memiliki potensi untuk itu. Kita mengharap direksi baru mampu merealisasikannya.

EDITORIAL
GANTI SAPUNYA DENGAN YANG BARU
(Media Indonesia/Kamis, 9 Maret 2006)

Dengan sapu lama yang juga kotor, hasilnya pun pasti tetap kotor. Singkirkan sapu kotor itu dan ganti dengan yang baru sehingga kotoran-kotorannya tidak menular.

Dan sapu lamanya sebaiknya dibersihkan dengan sebersih-bersihnya sebagai pelajaran untuk sapu baru. Inilah sebuah gambaran praktik upeti dan mafia kotor peradilan yang harus diberangus.

Agusjn

URUSANNYA SIAL ATAU MUJUR

Yang sial yang divonis mati. *Good luck* saja ya. *May be this is better for you. Most of us just don't understand how come.*

Yang mujur, selain yang divonis tiga tahun, ya aparat yang menerima sogokan.

Kenapa kok mereka ikut-ikutan mujur? Ya, karena mereka hidup di negeri nyiur melambai, Indonesia tercinta. Dihukum berat sekalipun paling cuma kena berapa tahun. Coba kalau mereka hidup di China. Pasti sudah wassalam.

Indonesia juga bukan Malaysia (maaf Pak Wapres, saya jadi membanding-bandingkan lagi) Di sana aturannya jelas dan simpel, ketangkap basah membawa dadah lebih dari sekian gram, tanpa bisa membuktikan kalau dirinya tak bersalah, wassalam.

Bungswas

SAPU KOTOR, SUDAH JAMAK

Tidak ada yang aneh dengan sistem peradilan di negeri tercinta ini. Mafia peradilan, sistem yang korup, sapu yang kotor itu sudah ribuan kali menjadi topik bahasan, dari pengamat,

petinggi politik sampai tukang sapunya sendiri (tukang sapu jalanan dan tukang sapunya).

Tetapi, faktanya, semua diam saja tidak ada tindakan apa pun.

Jadi dengan penuh kesadaran semua sistem yang korup, sapu yang kotor tetap dipertahankan. Tidak ada yang aneh.

Menurut hemat saya, tetap ada satu jalan untuk memangkas semua itu, hanya dengan sistem perundangan yang menjalankan asas pembuktian terbalik, semua akan tersapu (tentunya dengan sapu yang baru). Dan setiap orang yang berupaya keras untuk menolak asas ini merupakan indikasi bahwa yang bersangkutan ketakutan untuk tersapu.

Semoga upaya untuk mengegolkan asas itu dihidupkan kembali.

Patkun

SAPU KOTOR DIBUANG

Waktu lalu sering dikatakan, membersihkan lantai kotor tidak boleh dengan sapu kotor. Pernyataan itu dimaksudkan dengan sapu kotor yang mana? Lantai kotor ternyata sapunya kotor juga kan?

Sapu terbang ala Harry Potter saja yang hebat. Bisa mengalahkan sapu sakti tukang sihir mana pun. Begini saja, bersihkan sapu nantinya tangan kita yang kotor. Gimana kalau ganti sapu baru saja. Sapu kotor dibuang saja.

Pacific

PENYAPU INGIN DISAPU

Sudah, kalau penyapu mau disapu karena yang memelihara dan memberikan peradilan hukum adalah juga mereka yang terlibat sebagai penyapu. Lantas apa yang bisa membersihkan sapu yang memang sudah kotor.

Sangat mustahil kalau kongkalikong itu masih terus berlangsung, sedangkan 'ayam' di bawah kolong jembatan terus berteriak minta penegakan hukum yang mesti tidak seadil-

adilnya seperti Tuhan, tetapi minimal dapat mendekati keadilan yang sebenarnya.

Indrad

NEGERI DI AMBANG KEHANCURAN

Apa yang diharapkan dari republik ini bila sapu kotor mudah ditemukan di pengadilan? Di pengadilan, sebagai tempat untuk menemukan kebenaran dan keadilan, malah tersedia penegak hukum yang tidak benar dan berlumuran dosa.

Sapu kotor tidak pernah bisa membersihkan lantai. Bahkan, sebaliknya lantai yang kotor bila tersentuh dengan sapu kotor akan kotor dan najis. Itu adalah perumpamaan bila kita masuk lingkungan para penegak hukum yang tidak berjiwa suci dan tidak mengemban panji-panji keadilan. Alih-alih tangan kita semakin bersih, malahan tangan kita ikut berbau kotoran.

Bayangkan, kalau tangan-tangan yang suci dan bersih ikut terkena imbas baunya kotoran. Maka kita tinggal menunggu kehancuran republik ini. Hancur karena keadilan telah musnah. Pencari keadilan hanya berharap pada pepesan kosong.

Cenk

(B) REPUBLIKA

TAJUK CEMEX DAN IKLIM INVESTASI (Republika/7 MARET 2006)

Demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang layak, negeri ini jelas sangat membutuhkan investasi langsung. Setelah hanya tumbuh 5,6 persen tahun lalu, tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen. Dan, untuk mencapai pertumbuhan tersebut, bahan bakar utamanya jelas, investasi langsung.

Maka, Kementerian Koordinator Perekonomian pekan lalu mengumumkan diterbitkannya paket kebijakan iklim investasi. Di tengah persaingan menarik investasi antarnegara di Asia yang semakin ketat, paket ini sangat diharapkan mampu memperbaiki iklim investasi. Diharapkan juga paket ini bisa mengembalikan Indonesia menjadi tempat tujuan investasi yang menarik, terutama bagi investor asing.

Bagi pemerintah, paket yang mencakup perbaikan dan penyederhanaan perizinan, undang-undang penanaman modal, sampai urusan kepabeanan itu agaknya menjadi gantungan harapan masuknya investasi. Tapi, sebagian kalangan tetap saja menilai paket tersebut secara substansi tidak memuat hal-hal baru. Bahkan, ada pula yang melihat paket ini masih berbau pesanan lembaga internasional.

Apapun, yang jelas, bagi pemerintah paket tersebut merupakan jawaban terhadap tuntutan dunia usaha untuk perbaikan iklim investasi. Paket ini diharapkan mampu meningkatkan kegiatan investasi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.

Semudah itukah? Benar, perbaikan iklim investasi terkait proses perizinan, juga kepabeanan, bisa membuka peluang bagi pertumbuhan investasi. Lain kata, mampu membuka peluang besar bagi masuknya investasi langsung asing. Masalahnya, ada hal lain yang agak terabaikan sehingga paket kebijakan investasi sebaik apapun bisa jadi tak berarti; kepastian hukum dan ketegasan pemerintah.

Contoh paling konkret kurang tegasnya pemerintah bisa terlihat pada kontroversi kehadiran perusahaan semen Meksiko, Cemex SA, lewat Cemex Asia Ltd. Kontroversi Cemex sudah menahun, dan tak kunjung selesai sampai sekarang.

Pada 1998, Cemex membeli 25,5 persen saham PT Semen Gresik, perusahaan BUMN semen Indonesia, yang juga holding dan PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang. Dalam transaksi itu, Cemex memiliki pula hak untuk menjadi pemegang saham mayoritas pada 2001. Namun, ketika Cemex ingin menggunakan hak itu, pemerintah sebagai pemilik 51 persen saham Semen Gresik, justru menolak menjual sahamnya. Dua anak perusahaan Semen Gresik malah berniat melakukan memisahkan diri jika Cemex benar-benar menjadi pemegang saham mayoritas.

Nasionalisme dalam berbisnis boleh jadi tetap perlu. Ironisnya ketika, Cemex akhirnya menulis surat ke Kementerian BUMN untuk menjual kembali saham Semen Gresik yang 25,5 persen. Pemerintah juga secara tegas menyatakan tidak akan membeli kembali saham Cemex di Semen Gresik. Selain faktor kesulitan keuangan, pemerintah mengemukakan alasan lain terkait dengan dampak nonteknis ekonomi lainnya.

Pemerintah bisa saja mengkonsolidasi BUMN lain membeli saham Cemex. Hanya saja, itu pun tak mungkin dilakukan jika BUMN atau swasta nasional yang membeli sama sekali tak memahami industri semen. Alhasil, posisi Cemex dan Semen Gresik terkatung-katung.

Paket baru kebijakan iklim investasi boleh saja dijadikan harapan membaiknya investasi negeri ini. Namun, jika kasus seperti Cemex tetap terus terjadi dan berkepanjangan pula, maka mudah ditebak apa yang ada di benak investor asing. Pemerintah jelas tak ingin dibilang "pilin plan". Tapi, pemerintah rasanya sulit pula mencegah jika anggapan itu melekat di benak investor asing. Maka, ketegasan penyelesaian kasus Cemex-terlepas baik tidaknya paket kebijakan iklim investasi tak ubahnya pertaruhan kredibilitas pemerintah di mata investor asing.

TAJUK
KEBIJAKAN PERUMAHAN
(Republika/Jumat/10 Maret 2006)

Dalam serangkaian kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jawa tengah, salah satu agendanya adalah peresmian pembangunan 100 ribu unit rumah sederhana se-Indonesia. Proyek tersebut dibangun oleh Real Estate Indonesia untuk menyukseskan Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah.

Perumahan memang menjadi salah satu problem bangsa. Masih ada jutaan masyarakat yang belurn memiliki rumah tinggal. Sebagian menumpang, ada yang menempati rumah bedeng, ada yang terjubel di rumah karton, ada yang *kleleran* di pinggir jalan, ada yang menempati rumah gerobak, dll.

Target pembangunan satu juta rumah merupakan berita cukup menyejukkan. Setidaknya program tersebut akan mengurangi jumlah masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rumah. Hanya masalah harga dan cicilan mungkin yang nanti akan menjadi sedikit persoalan.

Tetapi, lepas dari itu, kebijakan perumahan perlu dilihat lebih progresif lagi. Apakah penyediaan hunian yang berkonsep horizontal seperti yang ada sekarang ini sudah rnemadai, atau perlu beralih ke konsep vertikal. Hal ini terutama untuk kota-kota besar semacam Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dll.

Kota-kota besar di zaman moderen ini, konsep pembangunan hunian bukan lagi horizontal yakni dengan menyediakan lahan untuk satu kepemilikan satu rumah, melainkan sudah vertikal (apartemen). Dengan konsep vertikal maka sekalipun lahan terbatas. tetap bisa menampung banyak keluarga.

Jika konsep horizontal, maka secara otomatis akan terjadi pengalihan secara terus-menerus dan sistemik. Lahan yang semula sawah menjadi rumah, perkebunan menjadi rumah, bahkan situ yang mestinya dilindungi juga menjadi rumah. Kebutuhan akan lahan ini tiada habis-habisnya.

Sebetulnya, di Jakarta sendiri sudah banyak bermunculan apartemen. Tetapi sebagian besar adalah untuk kelas menengah atas sehingga mereka yang membeli pun sifatnya lebih banyak

spekulasi, bukan untuk dihuni. Terbukti bahwa banyak apartemen yang secara kepemilikan sudah terjual, tetapi tidak banyak penghuninya.

Kota Jakarta sudah perlu membangun apartemen atau rumah susun (rusun). Kelemahan rusun selama ini, seperti di Tanah Abang atau di Tebet adalah sifatnya yang kepemilikan. Awalnya memang masyarakat bawah yang membeli dengan harga sangat murah, tetapi lama-kelamaan hak itu dijual dan jatuhnya ke kelas menengah.

Kondisi tersebut bisa dihindari jika yang dilakukan adalah sistem sewa. Dengan harga sewa yang dibikin murah, otomatis kelas bawah yang tinggal di situ. Kelas menengah pun perlu dibikin sesuai dengan strata pendapatan mereka sehingga nantinya ada rusun untuk kelas bawah, rusun kelas menengah, dan apartemen kelas atas.

Karena itu, daripada membangun 250 rumah di daerah Banten untuk warga DKI, lebih efisien jika Pemprov DKI membangun rusun buat warganya. Jika konsep horizontal terus dipaksakan, maka semakin kecil pendapatan seseorang akan semakin tinggi ongkos transportasi karena semakin kecil pendapatan semakin jauh rumah yang ditinggali.

Bahwa perubahan konsep itu akan mengubah budaya yang tadinya merasa tenteram jika sudah memiliki rumah, itu betul. Tetapi budaya itu juga bisa diubah. Orang Malaysia yang sesama Melayu bisa berubah mestinya kita pun bisa berubah.

Program sejuta rumah tetap layak didukung. Tetapi perlu juga dipikirkan mengenai konsep hunian vertikal untuk kota-kota besar yang memiliki lahan terbatas.

TAJUK
KEBEBASAN YANG KEBABLASAN
(Republika/Senin, 6 Maret 2006)

Beberapa hari lalu, sejumlah penulis di Eropa membuat pernyataan di media massa Prancis *Charlie Hebdo*. Isinya: memperingatkan kepada masyarakat internasional tentang sebuah bahaya yang mereka sebut “totaliterianisme Islam”. Mereka juga menegaskan reaksi massal yang diperlihatkan masyarakat Islam di berbagai negara terkait dengan penerbitan karikatur yang melecehkan Nabi Muhammad SAW, menunjukkan perlunya berjuang untuk menegakkan nilai-nilai sekuler dan kebebasan.

Koran *Charlie Hebdo* merupakan salah satu media di Eropa yang memuat ulang sejumlah karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW. Sedangkan penandatanganan pernyataan yang dimuat di tabloid itu, sebagaimana ditulis *bbcindonesia.com*, kebanyakan adalah mereka yang pernah “bermasalah” dengan umat Islam. Mereka, antara lain, penulis *Satanic Verses*, Salman Rushdie. Salman berasal dari India dan bermukim di Inggris. Ia pernah dikecam umat Islam karena dinilai telah menghina Nabi Muhammad SAW melalui novelnya, *Satanic Verses*.

Penandatanganan lainnya adalah pembuat film yang juga anggota parlemen Belanda Ayaa Hirsi Ali, penulis Bangladesh yang kini mengasingkan diri di Eropa Taslima Nasreen, penulis Prancis Bernard-Henry Levy, penulis Iran yang mengasingkan diri di Prancis Chahla Chafiq, pengungsi Uganda yang jadi penulis di Kanada Irshad Manji, penulis Iran di Denmark Mehdi Mozaffari, penulis Iran di Inggris Maryam Namazie, penulis Prancis Caroline Fourest, dan direktur koran *Charlie Hebdo*.

Yang juga patut disimak dan pernyataan mereka adalah penyamaan Islam dengan fasisme, Nazi, dan Stalinisme. “Setelah mengatasi fasisme, Nazi, dan Stalinisme, dunia sekarang menghadapi ancaman: yaitu Islamisme,” kata pernyataan itu.

Kita tidak tahu apakah yang mereka maksud dengan bahaya Islamisme itu. Bila yang dimaksud adalah reaksi serempak yang diperlihatkan masyarakat Islam di berbagai dunia terkait dengan pelecehan Nabi Muhammad SAW maka jelas hal itu sangat membahayakan. Sebab bila demikian, kebebasan yang mereka agung-

agungkan adalah kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan yang boleh menghina apa dan siapa pun, termasuk agama dan keyakinan yang merupakan hak asasi paling dasar manusia.

Gerakan-gerakan semacam ini sedikit banyak dalam bentuknya yang berbeda, kini juga sudah mulai menjalar di Indonesia. Sebutlah kelompok-kelompok yang secara tegas menolak rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP). Mereka menilai APP akan membelenggu kebebasan berekspresi dan berkreasi.

Padahal, APP jelas dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama masyarakat. Nilai-nilai agama itu, agama apa pun adalah tidak dibolehkannya mengumbar aurat, mengumbar pornografi dan pornoaksi.

Kita selama ini telah melihat bahwa kebebasan pornografi dan pornoaksi di berbagai media akibatnya sangat fatal: rusaknya perilaku dan akhlak masyarakat.

Bahwa draf APP perlu diperbaiki dan diubah sana-sini. Kita jelas sepakat, terutama pasal-pasal yang mengundang multitafsir. Juga yang terkait dengan budaya setempat dan lain-lain. Namun, menolak mentah-mentah APP jelas membahayakan. Itu sama dengan menolak dan menentang nilai-nilai moral dan agama, seperti halnya diperlihatkan para pendukung pemuatan karikatur pelecehan terhadap Nabi Muhammad Saw.

Kebebasan adalah perlu. Namun, kebebasan yang tanpa batas adalah kebablasan. Kebebasan harus untuk pencerahan dan menciptakan kehidupan yang lebih harmoni. Dan itu antara lain dengan penghormatan terhadap nilai-nilai dan ajaran agama yang harus diatur dalam undang-undang.

TAJUK
PENDAPAT SEJATI
(Republika/8 Maret 2006)

Ribuan guru di Tangerang menunjukkan pendapat sejati masyarakat kita: Mereka berunjuk rasa, kemarin. (7/3), mendukung peraturan daerah tentang larangan minuman keras dan pelacuran. Para guru gerah karena kedua perda yang bertujuan mempertahankan nilai kemanusiaan itu belakangan mendapat serangan.

Kita menyebutnya pendapat sejati karena demikianlah sesungguhnya akal sehat (*common sense*) masyarakat kita. Minuman keras dan pelacuran bukanlah bagian dari *nature* kita. Keduanya adalah benda asing yang tak pernah mendapat tempat dalam kepatutan kehidupan kita.

Namun, memang, tak selalu pendapat sejati terartikulasikan dengan baik. Dalam sosiologi komunikasi, kita mengenal adanya sebagian besar masyarakat yang tak bersuara. Mungkin karena enggan, tapi bisa jadi pula karena tak punya akses untuk bersuara. Mereka adalah mayoritas yang diam.

Syukurlah para guru itu berani menembus keterbatasan Mereka tidak diam. Mereka memang memiliki akses yang memadai untuk mewarnai opini media massa, tapi mereka bisa bergerak di keramaian masyarakat sesungguhnya yang berakal sehat.

Kita melihat, situasi itu pula yang terjadi di tingkat nasional. Seolah-olah penolakan terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) memenuhi dunia kita. Padahal, sebagian besar masyarakat justru mengidamkan RUU itu sejak lama.

Sebagian besar masyarakat kita sedang cemas menghadapi keganasan pornografi. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Ada Sutopo, bapak dua putri. Ada Elly Risman dan Seto Mulyadi, psikolog. Ada Kiai Abdullah Gymnastiar dan Pendeta Nathan Setiabudi, tokoh agama. Ada Erna, kakak yang peduli pada perkembangan adik perempuannya.

Banyak lagi yang lain. Mungkin mereka tidak bersuara, tapi jelas mereka cemas menghadapi pornografi.

Belakangan, kecemasan itu melebar karena ada segelintir orang yang gencar menolak RUU APP. Ketua Komisi Fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan mereka berupaya menggagalkan, membelokkan, dan memperlambat RUU tersebut. "Mereka penganut kebebasan tanpa batas. Itu cara berpikir jahiliyah," katanya.

Kita tentu prihatin dengan kenyataan tersebut. Telah muncul kelompok yang bersikap "asal tidak keluar RUU APP". Mereka menafikan masalah utama pemberantasan pornografi dan sibuk mengusung berbagai teori untuk mengaborsi RUU tersebut.

DPR sebenarnya memberi ruang yang luas bagi masyarakat untuk memberi masukan. DPR juga cukup berlapang dada menerima reaksi antara lain berupa suguhan senam erotis. Mereka bukan cadas yang mementalkan segala hal. Mereka paham, misalnya, tentang situasi khas di Papua dan Bali. Mereka siap memperbaiki RUU.

Yang kita perlukan saat ini adalah upaya mengisi RUU APP, bukan menggagalkannya. Kalau ada materi yang dianggap mengganggu, mari kita bicarakan di DPR. Jangan membakar rumah hanya untuk mencari tikus. Jadikan RUU ini sebagai produk inklusif. Kita yakin tak ada agama, kekuatan moral apapun, yang membenarkan pornografi.

Kita membutuhkan regulasi karena kita punya kecenderungan untuk tidak terkendali. Kita, misalnya, tiba-tiba hendak menerbitkan *Playboy* yang bercitra porno, padahal puluhan negara Asia lainnya yang lebih liberal sekalipun menolak.

TAJUK
PERTAMINA
(Republika/9 Maret 2006)

Kemarin, direksi baru Pertamina dilantik Menteri Negara BUMN Sugiharto. Pergantian direksi di perusahaan ini termasuk yang paling alot dan paling memakan waktu. Tidak semudah pergantian di BUMN lain, seperti di Bank Mandiri, misalnya, yang merupakan bank beraset terbesar di Indonesia. Ada perlawanan dan dalam, ada banyak kepentingan di dalamnya, ada banyak pihak dan aktor yang terlibat.

Pertamina adalah perusahaan besar. Di masa bonanza minyak tahun 1970-an, Pertamina merupakan tambang uang. Pemerintah mengandalkan perusahaan ini untuk membangun Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, harga minyak terus merosot, bahkan pernah hingga belasan dolar. Hal itu berdampak buruk bagi Pertamina. Salah kelola, pemborosan, dan korupsi yang di masa sebelumnya bisa tertutupi oleh berlimpahnya pendapatan menjadi menyembul. Ibarat air danau yang tiba-tiba surut. Kita bisa melihat dengan jelas ada apa saja di bawah danau.

Dengan segera kita menengok ke belakang dan ke samping. Pertamina yang berdiri tahun 1968 merger Pertamina dan Pertamina hingga kini cuma memiliki tujuh kilang. Ladang-ladang minyak kita lebih banyak dikelola secara konsesi dan *production sharing contract* dengan perusahaan-perusahaan asing. Hasilnya langsung diekspor dalam bentuk *crude oil*, sehingga untuk kebutuhan baban bakar minyak kita dipenuhi dengan cara impor. Ketika kebutuhan energi terus meningkat dan harga minyak dunia melambung, kita kelabakan. Kita hanya mendapatkan royalti dan pajak belaka. Nilainya sangat kecil. Selain itu, kontrol Indonesia terhadap perusahaan asing itu pun sangat lemah. Lagi pula, tak ada alih teknologi dan keahlian.

Bandingkan dengan kecerdikan dan kemandirian sikap Petronas. Perusahaan serupa Pertamina milik Malaysia ini sejak awal berdiri tahun 1974 sudah menyadari pentingnya mengelola sendiri. Mereka belajar dari Pertamina dan tak mau meniru kesalahan dan kelemahannya. Kini Petronas telah jauh berkembang

sebagai perusahaan berskala dunia dan beroperasi di 31 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Mereka telah jauh meninggalkan gurunya. Tak hanya itu, para ahli di Pertamina pun mereka bajak dengan gaji yang jauh lebih besar. Sebagai bukti puncak prestasinya, Petronas mendirikan menara kembar di Jantung Kuala Lumpur. Menara tertinggi di dunia itu menjadi ikon Malaysia dan rakyat Indonesia senang berwisata belanja dan berfoto di sana.

Kita berharap direksi baru Pertamina mampu memperbaiki perusahaan kebanggaan nasional ini. Menteri Sugiharto mengatakan bahwa direksi baru berasal dari dalam Pertamina karena perusahaan ini merupakan perusahaan besar sehingga jika diambil dan luar bisa timbul perlawanan. Satu sisi kita sedih mendengarnya; sisi lain kita bahagia. Sedih karena soal dari luar atau dalam kok menjadi ukuran. Dalam dunia bisnis segalanya begitu jelas untuk mengukur keberhasilan seseorang. Lihat kinerja keuangannya, lihat kegairahan karyawannya, lihat produktivitasnya, lihat visi jangka panjangnya, lihat praktik *good corporate governance*-nya, dan seterusnya. Percuma kita berasal dari dalam tapi cuma membawa perusahaan pada keterpurukan.

Kita bahagia direksi Pertamina berasal dari dalam karena ini bentuk kepercayaan dan pembuktian bahwa perusahaan ini tak kekurangan kader berkualitas. Kita berasumsi bahwa dia terpilih setelah melalui seleksi yang ketat dan benar. Kini tinggal kemampuan direksi yang baru ini untuk membuktikannya. Tantangan yang menganga adalah menghentikan korupsi, menunjukkan efisiensi, dan perampingan organisasi serta usaha. Tantangan itu begitu mendesak karena sejak 2003, setelah menjadi persero, Pertamina bukanlah pemain tunggal tapi harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Bukan hanya dalam eksplorasi dan pengilangan, tapi juga dalam distribusi. Pompa-pompa bensin asing telah menyerbu Indonesia dengan pelayanan yang prima.

(C) SUARA PEMBAHARUAN

T A J U K R E N C A N A MENDAMBAKAN KA YANG AMAN (Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)

Dua kecelakaan kereta api yang melayani angkutan umum di Jabodetabek terjadi dua hari berturut-turut akhir pekan lalu. Kejadian pertama, Jumat (3/3). Atap gerbong keempat KRD 907 jurusan Rangkasbitung–Tanah Abang runtuh. Puluhan penumpang di atas atap berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari atap. Akibatnya, puluhan penumpang cedera.

Sehari kemudian, Sabtu (4/3), kecelakaan menimpa kereta api listrik (KRL) 531 jurusan Bogor–Jakarta. Saat memasuki Stasiun Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat, mendadak kabel aliran listrik atas KRL jatuh akibat tersangkut pantograf. Penumpang di atap panik. Mereka berusaha melompat untuk menyelamatkan diri pada saat kereta masih berjalan. Dua penumpang dipastikan tewas di tempat kejadian, yang satu akibat tersengat arus listrik, dan yang lain akibat pendarahan di kepalanya.

Kecelakaan kereta api yang kedua itu semestinya tidak terjadi kalau petugas kereta api mengikuti instruksi Menteri Perhubungan Hatta Rajasa. Menteri telah memerintahkan semua petugas stasiun agar tidak memberangkatkan kereta jika masih ada penumpang yang duduk di atap. Para penumpang pun bisa menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan bila mau belajar dari pengalaman sehari sebelumnya, yang menimpa KRD 907.

Dua kejadian tersebut kembali menegaskan betapa ceroboh dan rendahnya disiplin kita dalam berkereta. Tidak perlu diperdebatkan lagi, penumpang di atap kereta jelas sangat berbahaya. Sudah banyak kejadian penumpang tewas akibat jatuh dari atap kereta. Namun, kejadian-kejadian itu tidak pernah menjadi pembelajaran.

Dalam peristiwa itu, PT KA tidak bisa menimpakan kesalahan hanya kepada penumpang yang nekat dan ceroboh. Orang nekat naik ke atap gerbong karena kapasitas gerbong memang tidak memadai lagi untuk menampung penumpang yang ada.

Padahal mereka ingin tepat waktu tiba di tujuan. Frekuensi keberangkatan kereta masih terbatas. Belum lagi jalur tertentu, seperti dari Rangkasbitung–Tanah Abang masih satu trek, belum dua trek seperti Jakarta–Bogor atau Jakarta–Bekasi.

Pemerintah, dalam hal ini PT KA, dituntut harus disiplin. Instruksi Menteri Hatta Rajasa untuk tidak memberangkatkan kereta bila masih ada penumpang di atap sudah jelas. PT KA harus menegakkan disiplin karena hal ini berkaitan dengan angkutan massal. Bila ceroboh, risikonya besar. Karena itu, tidak ada jalan lain, PT KA harus terus membenahi manajemennya agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang.

Bila PT KA tegas dalam menegakkan disiplin, masyarakat pasti tak akan menolak. Kita berharap kecelakaan itu bisa menjadi pelajaran untuk pembenahan ke dalam. Jika tidak dibenahi, kita pantas bertanya: kapan naik kereta bisa aman?

T A J U K R E N C A N A
PESTA JAZZ MEMBUKA MATA DUNIA
(Suara Pembaharuan/Senin, 6 Maret 2006)

Seminggu terakhir ini, Jakarta benar-benar pesta jazz. Dimulai dari 19 konser di universitas, klub musik, kafe, mal, hotel, dan pusat hiburan dengan judul "Java jazz on the Move", berakhir dengan digelarnya "Jakarta International Java Jazz Festival" (JIJF) pada 3-5 Maret di Jakarta Convention Center (JCC).

Selama tiga hari, tak kurang 1.000 penyanyi dan musisi tampil. Mulai grup lokal yang sedang naik daun, Mocca dan White Shoes & The Couple Company, hingga yang sudah kondang seperti Patti Austin, James Brown, Dave Koz, Take 6, Incognito, Brand New Heavies, Kool & The Gang, dan Lee Ritenour. Tiket masuk harian Rp 350.000, belum termasuk pertunjukan khusus yang tiketnya Rp 150.000, laris manis terjual.

Semua orang berdecak kagum. Bagaimana tidak, di Indonesia yang belum pulih ekonominya, ada pesta musik jazz yang tak kalah besar dengan North Sea Jazz Festival di Amsterdam dan New Orleans Jazz and Heritage Festival di New Orleans, AS.

Bahkan beberapa orang yang sudah menghadiri dua pesta jazz di atas mengatakan, Java jazz lebih hebat dan lebih besar. Lee Ritenour saat tampil bersama peniup saksofon, Gerald Albright, di Plenary Hall mengatakan, "*Java Jazz Festival is the top, top, top, top jazz festival in the world.*"

Kita tentu bangga dengan pesta jazz tersebut. Perhelatan akbar yang menguras pikiran, tenaga, dan uang itu, sedikit banyak telah mengubah pandangan orang tentang Indonesia.

Musisi jazz legendaris, James Brown mengatakan, Java jazz telah mengubah pandangan masyarakat di seluruh dunia tentang Indonesia. "Saya sangat bangga bisa tampil di Java Jazz".

Tetapi pekerjaan besar membuka mata dunia, seperti misi IJF, *Bringing to the World to Indonesia*, tidak berhenti sampai di sini. Sukses IJF hanya titik awal dari pembuka "kegelapan" yang melanda Indonesia hampir sembilan tahun terakhir. Kita tentu tidak mau berlama-lama dalam gelap. Mari kita sama-sama bahu-membahu menunjukkan kalau Indonesia "terang", supaya orang lain mau mendekat dan mau berteman.

Beberapa perusahaan milik negara, seperti Garuda Indonesia dan BNI, Pemerintah Provinsi DKI melalui program "Enjoy Jakarta", perusahaan swasta nasional dan internasional, telah membantu membuka tabir gelap Indonesia. Tentu pekerjaan itu akan lebih afdol jika pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, bisa berperan lebih aktif lagi dengan menjadikan JIJF sebagai agenda resmi tahunan pemerintah. Mari kita bawa dunia ke Indonesia!

T A J U K R E N C A N A **PILKADA DI TANAH PAPUA**

(Suara Pembaharuan/Jumat, 10 Maret 2006)

Hari ini (10/3) warga Provinsi Papua datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suara bagi calon kepala daerah (gubernur) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Ada lima pasang calon dan warga tinggal memilih siapa yang mereka jagokan untuk memimpin Papua lima tahun ke depan.

Siapa pun gubernur yang terpilih, itu adalah pilihan rakyat yang harus dihormati. Harapan warga Papua, gubernur baru harus berjuang lebih keras lagi untuk meningkatkan kesejahteraan warga Papua di provinsinya dan menyatukan mereka sebagai sumber daya manusia yang potensial. Masalah kelaparan di Kabupaten Yahukimo, misalnya, hendaknya menjadi perhatian. Bencana kelaparan seperti itu mestinya tidak perlu terjadi. Belum lagi soal keamanan, pelanggaran hak asasi manusia, dan banyak persoalan lain.

Selama ini Papua dirundung banyak masalah. Sepertinya, masalah tidak pernah habis. Beberapa waktu lalu kita terkejut karena tanpa sebab yang jelas, 43 warga Papua menyeberang ke Australia. Bagaimana nasib mereka selanjutnya belum diketahui. Pemaparan berbagai masalah ini untuk menunjukkan betapa calon kepala daerah terpilih di provinsi itu harus siap menguraikan berbagai masalah yang tidak mudah itu.

Sementara itu, besok (11/3) pilkada yang lain digelar di Papua, yakni di Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar). Kita memberi perhatian serius untuk pilkada ini karena status Irjabar masih menjadi perdebatan di Papua sampai sekarang. Belum lama ini Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menolak pemekaran Irjabar. Pegangan mereka adalah UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Namun, Jakarta tetap memaksakan kehendak agar Pilkada di Irjabar tetap diselenggarakan.

Mestinya, UU Otonomi Khusus Papua itulah yang menjadi payung hukum berkaitan dengan status Papua saat ini. Masalah-

nya, secara *de facto* Irjabar telah ada. Konflik ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dilaksanakan secara konsisten.

Tentu saja perlu jalan keluar yang bijak berkaitan dengan dua pilkada di Papua. Para elite politik, baik di Jakarta, Papua maupun Irjabar harus duduk satu meja untuk sama-sama mencari jalan keluar terbaik mengatasi masalah kedudukan kedua provinsi itu.

Berdasarkan laporan wartawan harian ini, warga antusias mengikuti pilkada. Karena itu, kita berharap masalah politik yang dihadapi Papua jangan sampai membuat rakyat Papua jadi susah. Mereka merasa antusias dengan pilkada karena mereka melihat ada harapan di sana. Harapan itu jangan sampai dihancurkan oleh pertikaian politik para elite.

T A J U K R E N C A N A
KESERiusAN MEMBERANTAS JUDI
(Suara Pembaharuan/Jumat, 10 Maret 2006)

Sudah sejak lama segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia. Namun, harus diakui tidak gampang untuk memberantasnya. Bagi yang sudah kecanduan, apa pun dilakukan untuk memenuhi hasrat yang menantang dalam dirinya. Rasanya hati belum puas apabila belum judi. Jadi, tujuannya bukan hanya untuk mendapat uang sebanyak-banyaknya, tetapi sudah mengarah pada kebutuhan batin. Inilah yang berbahaya.

Judi tidak hanya membahayakan bagi si penjudi, tetapi juga keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sudah banyak cerita, bagaimana kehidupan rumah tangga hancur gara-gara judi, bahkan sebuah bangsa juga bisa pecah karena judi. Akibat kecanduan judi, segala harta yang diharapkan bisa untuk membesarkan anak dan memenuhi kebutuhan harian, ludes di meja taruhan. Sudah begitu, masih setumpuk utang yang harus dilunasi untuk memenuhi hasrat bertaruh.

Yang menjadi persoalan, keinginan untuk berjudi juga didorong fasilitas yang ada. Saat ini masih cukup banyak arena untuk judi, baik untuk kelas bawah dengan togel, hingga kelas atas seperti permainan rollet dengan berbagai versi, *blackjack*, hingga pertandingan olahraga pun menjadi ajang taruhan. Di mata penjudi, sepertinya tidak ada permainan tanpa taruhan. Itulah yang menyebabkan kehancuran kepribadian seseorang, juga masyarakat.

Di Indonesia, sarana judi masih banyak dijumpai. Mulai dari tukang becak hingga permainan untuk kalangan atas. Mengapa itu bisa berkembang? Tentu saja karena hukum seperti ini tidak berdaya untuk merengkuhnya. Ada tangan-tangan kuat tak terlihat yang terus mendorong praktik perjudian, sekaligus mengisi pundi-pundi uangnya menjadi berlimpah. Siapa pun tahu, uang tidak berbicara tetapi sangat berkuasa.

Oleh karena itulah, penegasan Kepala Polri Jenderal Pol Sutanto bahwa segala bentuk perjudian di Indonesia tetap menjadi target utama untuk diberantas oleh jajaran kepolisian.

Bahkan, dia memerintahkan agar judi diberantas sampai ke akar-akarnya dengan menangkap siapa pun yang terlibat, termasuk aktor intelektual atau bandar perjudian tersebut (*Pembaruan*, 9/3).

Kita sangat mendukung langkah tegas Kapolri untuk secara konsisten memberantas segala bentuk perjudian. Kita berharap sikap tersebut benar-benar menjadi sikap Polri sebagai lembaga yang juga menjadi sikap anggota kepolisian RI. Itu berarti, polisi juga harus bersikap profesional dalam menangani segala bentuk perjudian.

Sikap tegas itu juga harus dicerminkan dengan menindak oknum-oknum anggota Polri yang juga ikut terlibat dalam bisnis perjudian. Jangan sampai pernyataan Kapolri hanya sebuah retorika yang kurang direspons oleh anak buahnya. Kita tunggu keseriusan semua pihak untuk ikut memberantas perjudian, sebagai apresiasi kita terhadap ketegasan Polri.

T A J U K R E N C A N A
NAKHODA BARU PERTAMINA
(Suara Pembaharuan/Kamis, 9 Maret 2006)

Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membenahi Pertamina mulai terbukti. Salah satu yang langsung dilakukan adalah mengganti direksi BUMN perminyakan tersebut. Widya Purnama pun lengser dari kursi direktur utama, digantikan Ari Soemarno.

Banyak pihak yang menghubungkan pergantian itu dengan tarik ulur di pemerintah, menyangkut penentuan operator ladang minyak Blok Cepu, antara Pertamina dan Exxon Mobil Oil asal Amerika sebab sejak lama Widya sangat tidak ingin Exxon memonopoli Blok Cepu.

Pergantian direksi di sebuah perusahaan adalah hal yang lazim. Banyak alasan mengapa harus ada pergantian. Namun, pergantian direksi tak pernah disikapi secara biasa bila itu terjadi di BUMN kita. Mengapa? Sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak lama BUMN adalah mesin uang. Tak hanya bagi negara, tetapi juga bagi orang-orang yang karena posisinya atau pengaruhnya di pemerintahan, merasa terlibat atau sengaja ingin dilibatkan.

Itulah yang menyedihkan. Sebagai entitas yang dimiliki negara, kehadiran BUMN ternyata hasilnya tidak sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat konstitusi. Pola pengelolaan ladang minyak di Tanah Air yang selalu melibatkan pihak lain menyebabkan banyak yang ingin mendekati Pertamina. Harapannya tentu agar bisa dilibatkan sebagai mitra dalam eksplorasi maupun eksploitasi sumur-sumur minyak, atau dalam kegiatan dari hulu hingga hilir lainnya. Sebab sudah terbayang keuntungan yang dicipratkan oleh semburan minyak yang masih menjadi sumber energi utama di muka bumi ini.

Pengalaman selama ini mencerminkan, Direksi Pertamina yang terpaksa dilengserkan umumnya terantuk godaan-godaan dari pola kerja sama usaha yang dijalankan secara tidak sehat. Hal itu pula yang dicurigai menjadi latar belakang pergantian direksi saat ini, yaitu buah dari tarik ulur pengelolaan ladang minyak di Blok Cepu yang tak berkesudahan.

Meski demikian, tak sedikit yang harus diganti karena dianggap gagal menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang sehat secara bisnis dan keuangan. Kenyataannya, hingga kini Pertamina masih belum menunjukkan kinerja sebagai BUMN strategis yang menyejahterakan masyarakat dalam arti sebenarnya. Justru sebaliknya, kini rakyat menghadapi pemiskinan yang faktor utamanya adalah minyak.

Kini, nakhoda telah berganti. Banyak catatan kelam yang harus dibenahi oleh direksi baru. Kita ingin, melalui Pertamina, minyak menjadi komoditas yang memakmurkan negeri ini dalam arti seluas-luasnya, tidak sekadar memperkaya segelintir pengusaha.

Kita tidak ingin minyak terus-menerus menjadi objek per-seteruan anak bangsa. Semoga momentum pergantian direksi ini bisa menjadi batu penjurur agar Pertamina tumbuh sebagai BUMN yang sejati.

T A J U K R E N C A N A
UJUNG TOMBAK YANG TERABAIKAN
(Suara Pembaharuan/Kamis, 9 Maret 2006)

Ribuan kepala desa dari beberapa provinsi berunjuk rasa di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (5/3). Mereka menuntut agar nasib mereka diperbaiki. Jalan untuk perbaikan itu adalah segera merevisi pasal-pasal dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah NO 72 Tahun 2005.

Bila mencermati UU tersebut, tampak bahwa masalah-masalah yang mengatur pemerintahan desa kurang sekali mendapat perhatian. Juga terdapat banyak pembatasan hak desa, seperti hak politik perangkat desa, masa jabatan kepala desa yang sebelumnya diatur dalam UU No 5 Tahun 1979 selama delapan tahun dan bisa dipilih kembali, yang kemudian berubah menjadi enam tahun.

Nasib kepala desa sejak Orde Lama hingga Era Reformasi hampir tidak pernah berubah. Mereka tidak pernah menjadi subjek, tetapi selalu menjadi objek pemerintahan. Padahal, mereka adalah ujung tombak pemerintahan di tataran paling bawah. Bagaimana rakyat bisa maju kalau kepala desa dan perangkat desanya saja tidak diperhatikan nasibnya.

Kehidupan para kepala desa kerap memprihatinkan. Banyak kepala desa dan perangkat desa yang tidak mendapat honor. Bahkan untuk memilih kepala desa mereka menggunakan uang dari saku sendiri. Terkait dengan itu, mereka meminta supaya pemilihan kepala desa menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selain itu, hingga kini belum ada satu pun UU yang mengatur tentang kepala desa. Selama ini, seperti UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diubah dengan UU Pemerintahan Daerah bukanlah UU tentang kepala desa. Meskipun di dalam UU tersebut ada pasal yang mengatur tentang kepala desa, tetapi jumlahnya sangat sedikit.

Pengaturan soal kepala desa dalam UU Pemerintahan Daerah itu pun banyak yang rancu. Karena itu, para kepala

desa yang datang ke Jakarta menuntut supaya sejumlah pasal yang mengatur tentang kepala desa dalam UU tersebut direvisi. Misalnya, biaya pemilihan kepala desa juga perlu dibebankan ke APBD.

Selain itu, UU tersebut juga mengebiri hak berpolitik kepala desa dengan melarang mereka menjadi pengurus partai politik. Para kepala desa menghendaki ketentuan itu dihapus. Tuntutan ini wajar karena pada level lebih tinggi seperti bupati, gubernur, menteri, bahkan wakil presiden dan presiden, bisa menjadi pengurus partai. Kepala desa menuntut pasal-pasal yang dinilai kontraproduktif dan merupakan kemunduran bagi penyelenggaraan pemerintah desa agar diubah. Kita berharap kepala desa makin diberdayakan untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri. Mereka adalah ujung tombak pemerintah di lapangan.

T A J U K R E N C A N A **JANGAN BENTROK LAGI**

(Suara Pembaharuan/Kamis, 7 Maret 2006)

Berita bentrokan antara anggota TNI dan polisi di Ambon akhir pekan lalu membuat kita pilu. Bentrok itu dipicu oleh masalah sepele dan sifatnya personal. Akibatnya, terjadi serang menyerang antara aparat Kodam XVI Pattimura dan aparat Polda Maluku.

Ibarat dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah, itulah yang terjadi di Ambon. Dua pasukan bentrok, penduduk yang tidak berdosa harus menanggung derita. Satu anggota masyarakat tewas akibat tembak-menembak antara kedua kesatuan itu. Masyarakat Ambon yang mulai hidup tenang kembali cemas.

Tentu kita menyesalkan kejadian itu. Bentrokan antara anggota TNI dan polisi bukan baru terjadi sekarang. Bentrokan seperti itu sudah beberapa kali terjadi di beberapa daerah. Semuanya dipicu oleh masalah kecil dan persoalan bersifat pribadi. Namun, masalah pribadi itu kemudian dimanipulasikan menjadi masalah antarkesatuan. Akibatnya, terjadi bentrokan.

Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran polisi untuk menjaga keamanan sehari-hari mulai dari masalah lalu lintas sampai pengamanan. Setelah lepas dari TNI, polisi melakukan pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Sedangkan tugas TNI jelas, yakni menjaga keamanan negara. Namun, bukan tidak mustahil sering terjadi gesekan kepentingan di lapangan antar-anggota TNI dan Polisi. Benturan kepentingan itu mestinya diatasi dengan bijak, tidak melibatkan kesatuan masing-masing.

Kita berharap. Mereka yang terlibat bentrokan di Ambon mendapat sanksi yang tegas, tidak saja karena mencoreng citra TNI dan Polri, tetapi juga telah mengganggu ketenteraman masyarakat. Artinya, mereka tidak melakukan tugasnya menjaga keamanan masyarakat. Sanksi yang tegas akan menjadi pembelajaran bagi anggota TNI dan Polri agar tidak melakukan hal serupa.

Belajar dari pengalaman itu, kita berharap pemimpin TNI dan Polri terus melakukan koordinasi agar bentrok semacam ini bisa dihindari. Sikap proaktif para pemimpin TNI dan Polri di Ambon

telah mencegah meluasnya bentrokan itu. Mereka juga telah memutuskan agar para pelaku diproses secara hukum sambil terus melakukan konsolidasi internal agar masalah itu tidak meluas. Sebab, yang harus menanggung akibatnya justru masyarakat. Kita menyesalkan penyelesaian persoalan pribadi dengan senjata yang seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan negara itu.

Dalam kondisi sekarang, masih banyak hal penting yang perlu dilakukan oleh TNI dan Polri untuk bangsa ini. Masyarakat kita masih menghadapi begitu banyak masalah seperti korupsi, meningkatkan kejahatan baik jalanan maupun kerah putih, narkoba sampai terorisme. Sayang, bila potensi yang besar pada TNI dan Polri terbuang hanya untuk bentrok antarmereka seperti yang terjadi di Ambon akhir pekan lalu.

T A J U K R E N C A N A
SEBULAN PERDA PENCEMARAN UDARA
(Suara Pembaharuan/Kamis, 7 Maret 2006)

Sudah satu bulan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, namun belum ada tanda-tanda Jakarta bebas asap rokok dan pencemaran udara. Di angkutan umum masih terlihat orang dengan santai mengisap rokok. Demikian pula di tempat-tempat yang seharusnya bebas dari asap rokok, masih terlihat orang tetap merokok, tidak menghiraukan tanda larangan merokok.

Harus kita akui, waktu sebulan belumlah cukup untuk menilai sebuah peraturan yang berupaya mengubah kebiasaan seseorang. Terlebih kebiasaan itu sudah membudaya bagi seseorang. Butuh waktu untuk membiasakan merokok di tempat-tempat yang telah ditentukan, sesuai Peraturan Gubernur No 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Perda yang dikeluarkan Gubernur Sutiyoso pada 4 Februari 2005 itu memang menuntut kedisiplinan semua pihak, terutama kedisiplinan para perokok. Adalah hak setiap orang untuk menikmati udara segar di Ibukota. Karena itulah, perokok tidak bisa sembarangan membakar tembakau di sembarang tempat. Mereka harus bisa mengendalikan diri dan menghargai orang lain yang tidak merokok.

Menjadi sangat memprihatinkan setiap kali melihat ibu hamil di angkutan umum yang dipaksa menghirup asap rokok yang menyedapkan. Memang nikmat bagi perokok yang seolah tidak peduli dengan keadaan, tetapi bencana bagi si ibu dan bayinya karena jelas-jelas asap rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.

Yang menjadi persoalan hingga saat ini adalah Pemprov DKI tidak siap dengan Perda itu. Hal ini dapat dilihat masih terbatasnya jumlah petugas pengawas pelaksanaan Perda, dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar perda. Tidak mengherankan bila gema pemberlakuan perda itu hanya bertahan di minggu-minggu pertama pelaksanaan, setelah itu suasana normal kembali.

Berdasarkan pantauan *Pembaruan*, ternyata Perda No 2/ 2005 itu belum direspons dengan baik oleh pengelola gedung yang menjadi target Perda. Sejumlah rumah makan dan kafe di sejumlah pusat perbelanjaan, belum memisahkan tempat khusus untuk pengunjung yang merokok dan yang tidak merokok (*Pembaharuan*, 6/3).

Kita berharap Pemprov DKI konsisten dengan peraturan yang telah dibuatnya. Sudah setahun lebih Perda No 2/2005 dikeluarkan, namun sosialisasi dan persiapan untuk pelaksanaan masih minim dilakukan. Sama halnya dengan larangan membuang sampah sembarangan tetapi Pemprov tidak menyediakan tempat sampah yang memadai. Memang tidak ada kata terlambat untuk mewujudkan kota Jakarta yang nyaman dan segar. Harapan kita, ke depan kekurangan tersebut dapat diperbaiki.

(D) KOMPAS

TAJUK RENCANA RUU PORNOGRAFI DITANGGAPI BERAGAM (Kompas/selasa, 7 maret 2006/hal. 6)

Hadirnya tanggapan beragam terhadap rancangan undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi tampak jelas dari Bali.

Di tempat lain, termasuk di Jakarta, bermacamragaman reaksi itu ada. Namun, dari Balilah bermacamragaman tanggapan itu lebih jelas. Hal itu wajar dan masuk akal bermacamragaman reaksi itu mencerminkan bermacamragaman sosial, budaya, serta pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia yang adalah juga beragam.

Suatu bermacamragaman yang dinyatakan dalam kesepakatan kita perihal Bhineka Tunggal Ika. Kemacamragaman dalam kesatuan. Kesatuan dalam bermacamragaman.

Tidak disangsikan tujuan baik dan mulia yang terkandung dalam RUU Pornografi dan Pornoaksi. Namun, pada sisi lain, mudah dimengerti bahwa persoalan semacam itu menimbulkan perbedaan. Bukan sekadar perbedaan antarcita rasa sebutlah tradisional dan modern, tetapi juga karena suatu pemikiran dan tanggapan yang serius dan bertanggung jawab. Sekaligus juga ada perbedaan sebagai cerminan kebhinekaan masyarakat bangsa kita.

Benar pula, karena hadirnya pengaruh global, pembaruan pengertian bersama perihal pornografi dan pornoaksi diperlukan. Globalisasi juga memengaruhi perihal selera, bahkan tata nilai, termasuk yang menyangkut pornografi dan pornoaksi. Termasuk pengaruh keterbukaan dan interaksi perjumpaan dan pergaulan antarbangsa misalnya dalam industri pariwisata.

Jika penyusunan undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi diteruskan, pesan itulah yang perlu ditangkap dan dihormati bahwa ada bermacam sikap, penilaian, cita rasa, dan tanggapan. Bahwa sampai batas tertentu, perbedaan tanggapan itu merupakan cermin dan implikasi dari bermacamragaman masyarakat Indonesia. Kemacamragaman tetapi dalam persatuan itulah sosok realitas masyarakat bangsa kita.

Persoalan itu semakin harus kita pahami dan kita pertimbangkan karena orientasi otonomi sebagai ekspresi kekuasaan dan

wewenang lokal memberikan kesan merembet ke mana-mana. Tampak kecenderungan kabupaten pun merasa harus membuat aturan sendiri bagi wilayahnya tentang eksekusi kehidupan seks.

Apa jadinya jika kecenderungan membuat peraturan sendiri merambat ke mana-mana. Apa jadinya jika misalnya subjektivitas lokal atau pemegang kekuasaan lokal cenderung memberlakukan sesuatu untuk daerah kekuasaannya tanpa memperhitungkan seberapa jauh peraturan lokal itu konsisten atau tidak bertentangan dengan perundang-undangan nasional.

Kita memang hidup dalam masa perubahan yang dipengaruhi oleh interaksi global. Bersikap kritis dan cerdas agar mampu mengambil manfaat yang dibawa atau merupakan akibat dari interaksi global itu.

Bagi kita, Indonesia, niscaya bukanlah tanpa pesan dan tanpa makna, ungkapan bersayap, Bhineka Tunggal Ika. Kemacamragaman dalam kesatuan. Kesatuan dalam kemacamragaman. Kita juga harus tanggap terhadap perubahan dan gejala yang dibawa oleh perubahan.

T A J U K R E N C A N A
CHINA PERANGI KEMISKINAN
(Kompas/Selasa, 7 Maret 2006/Hal. 6)

Isu kesenjangan kemakmuran dijadikan fokus utama pertemuan tahunan Kongres Rakyat Nasional China, yang dibuka hari Minggu 5 Maret lalu.

Sejumlah persoalan strategis seperti masalah Taiwan dan peningkatan postur militer juga dibahas dalam sidang 10 hari yang dihadiri 2.927 anggota delegasi Kongres Rakyat Nasional (parlemen). Namun, masalah ketimpangan kaya-miskin dan kota-pedesaan dijadikan fokus utama. Kesenjangan ekonomi memang semakin sensitif di tengah kilatan mesin pembangunan ekonomi, lebih-lebih belakangan ini.

Proses pembangunan China telah menimbulkan kesenjangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Sekitar 800 juta dari 1,3 miliar penduduk kurang menikmati hasil pembangunan dan umumnya tinggal di pedesaan.

Ketimpangan itu sudah menimbulkan frustrasi sosial yang diekspresikan dalam berbagai aksi protes. Sebelum keadaan menjadi runyam, penguasa China segera bertindak dengan memerangi kemiskinan.

Sesungguhnya Pemerintah China sudah melakukan berbagai langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Alokasi dana pembangunan pedesaan tahun 2006 ini misalnya naik 15 persen dibandingkan tahun lalu sehingga total menjadi 41,9 miliar dollar AS dari 274 miliar dollar anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dana pembangunan pedesaan itu dinilai belum mencukupi sehingga perlu dibahas dalam sidang tahunan Kongres Rakyat yang akan menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) ke-11.

Repelita ke-11 akan difokuskan pada peningkatan kemajuan pedesaan. Segera terbayang, perkembangan pesat akan terjadi di daerah pedesaan dalam lima tahun mendatang.

Apalagi penguasa China sudah terbukti memiliki kemampuan merealisasikan kebijakan, yang telah menjamin keberlangsungan proses pembangunan sekitar tiga dasawarsa terakhir.

Tingkat pertumbuhan ekonomi China tahun ini tetap mengesankan, diproyeksikan delapan persen, meski turun dari 9,9 persen tahun lalu, dan lebih rendah dari proyeksi Bank Dunia pada level 9,2 persen. Tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak hanya menimbulkan kisah sukses pembangunan, tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial.

Namun, pemerintah dan parlemen China cepat bertindak untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Sudah terbayang betapa China benar-benar akan tampil perkasa jika telah memakmurkan seluruh lapisan rakyatnya Lebih-lebih lagi kalau diperkuat oleh demokratisasi dalam bidang politik.

T A J U K R E N C A N A
BEBAS DAN RIUH, TETAPI STABIL
(Kompas/Selasa, 9 Maret 2006/Hal. 6)

Untuk menyambut kunjungan Presiden AS George W Bush ke India pekan lalu, Fareed Zakaria, editor internasional *Newsweek*, menulis kolom panjang.

Terjemahan bebas dari alinea dalam artikel mingguan itu: masuk akal jika India yang berpenduduk begitu besar menjalani demokrasi yang riuh, adakalanya runyam, oleng, tetapi disertai kestabilan berjangka panjang.

Kalimat itulah yang teringat ketika kita mencermati kondisi Indonesia dewasa ini. Setiap hari lewat media massa kita saksikan unjuk rasa, dalam unjuk rasa terjadi bentrokan dengan aparat.

Sedikit-sedikit memberi kesan resah dan rusuh, ketertiban terganggu, dan acap kali kita bertanya, sampai kapan kondisi itu berlanjut. Apa pula pengaruhnya untuk kepastian hukum, kestabilan dan tumbuhnya iklim yang positif untuk pengembangan ekonomi.

Kesan dan pengamatan itu membangkitkan sikap mendua yang berlawanan. Ya, resah, "rusuh", suasana tak karuan, bebas leluasa itulah bagian proses demokratisasi. Namun, kepastian dan kestabilan, ketertiban yang sekurang-kurangnya memberikan kesempatan kepada warga dan masyarakat bekerja dan pemerintah menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis adalah pula sisi lain dari proses demokrasi.

Tetapi bukankah yang lebih berat sebelah keresahan dan "kerusuhan"nya, adalah, sebutlah, orang banyak. Kelompok-kelompok kecil yang diorganisasi, massa banyak. Bukanlah pimpinan politik, bukan elite politik.

Cobalah kita lihat lebih jauh duduknya perkara. Kita ambil contoh yang kini aktual lagi. Pemerintah merumuskan kebijakan. Untuk melaksanakannya diperlukan partisipasi legislatif. Pemerintah yang terus-menerus dikritik, lamban dalam melaksanakan kebijakannya, berusaha mengoreksi diri.

Dalam prosesnya diperlukan bentuk partisipasi lembaga legislatif. Jika lembaga legislatif tidak menyertai langkah per-

cepatan pelaksanaan eksekutif, hasilnya terhambat juga atau tidaklah optimal.

Bukankah dalam proses pemerintahan demokrasi, memang dari "sono"-nya ada pembagian tugas. Pemerintah sebagai eksekutif bertugas melaksanakan kebijakan yang telah menjadi keputusan. Legislatif terlibat ketika membicarakannya dan membuat undang-undang dan peraturan.

Pendapat dan pemahaman itu benar, tetapi tidak lengkap. Tugas pokok legislatif di parlemen maupun di depan publik akhirnya mempunyai tugas yang bermuara sama, yakni agar proses pemerintahan demokrasi itu menghasilkan perbaikan perikehidupan rakyat banyak. Bukan saja di bidang politik, tetapi sekaligus dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Dengan sengaja kita kemukakan pandangan itu dengan satu tujuan bagaimana proses demokrasi yang resah, riuh, ruwet, oleng tetap menjamin kestabilan yang diperlukan untuk mewujudkan program dan karya nyata bagi perbaikan perikehidupan semua warga.

T A J U K R E N C A N A
ANCAMAN ISRAEL TAK CIUTKAN HAMAS
(Kompas/Selasa, 9 Maret 2006/Hal. 6)

Kemenangan organisasi militan Hamas dalam pemilu parlemen Palestina bulan Januari lalu rupanya masih terus menggelisahkan Israel.

Ketika Hamas sedang dalam proses membentuk pemerintahan sekarang ini pun, Israel ingin menerornya, yaitu dengan mengeluarkan ancaman, pihaknya bisa saja membunuh pemimpin Hamas, Ismail Haniya.

Ancaman terakhir disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Shaul Mofaz, Selasa (7/3), sehari setelah Israel melancarkan serangan terhadap truk es krim di Gaza City yang menewaskan dua anggota Jihad Islam, tiga warga yang ada di dekat sasaran, dua di antaranya anak-anak.

Pada satu sisi perkembangan terakhir di Timur Tengah ini memang tidak menggembirakan. Israel melancarkan serangan udara sebagai aksi balasan terhadap Jihad Islam yang dianggap sebagai pelaku serangan bom bunuh diri di Israel dan pelaku serangan roket dari Gaza semenjak tentara dan pemukim Israel meninggalkan wilayah ini tahun lalu.

Selain dipicu oleh kejadian-kejadian tersebut, Israel juga terus merasa tidak nyaman dengan tampilnya Hamas di kekuasaan karena kelompok ini diketahui masih bersumpah untuk menghancurkan Israel. Hamas juga menolak seruan internasional untuk meninggalkan ideologi kekerasan dan anti-Israel. Di pihak lain Hamas sejauh ini bisa mempertahankan penghentian aksi peledakan bom bunuh diri selama satu tahun.

Selanjutnya wartawan menanyakan, apakah Haniya juga akan disasar kalau Hamas memulai kembali serangan. Mofaz menjawab, kalau Hamas tidak mau mengakui persetujuan (yang sejauh ini ada antara Israel dan Palestina), juga tidak bersedia meninggalkan kekerasan, dan terus menantang Israel, tak seorang Hamas/Palestina yang imun. Bukan hanya Ismail Haniya.

Menanggapi ancaman ini, juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan, "Ancaman Israel tidak membuat takut Hamas atau

rakyat Palestina, dan taktik pemerasan dan ancaman ini tidak akan membelenggu kami."

Hamas memang tak menyurutkan perlawanan sejak aksi perlawanan merebak lagi tahun 2000. Sementara itu, Israel juga telah membalas dan membunuh sejumlah pemimpin mereka, termasuk yang senior, seperti salah satu pendirinya, Sheik Ahmad Yassin.

Memang, sejak ada penghentian tembak-menembak di antara keduanya diberlakukan, Israel tidak lagi menyasar petinggi Hamas. Namun, dengan keluarnya komentar Mofaz, suasana permusuhan jelas semakin meningkat. Sikap Mofaz mencerminkan apa yang oleh Abu Zuhri sebagai "terorisme negara".

DAERAH PERTUMBUHAN

(Kompas/Selasa, 8 Maret 2006/Hal. 6)

Pekan lalu pemerintah meluncurkan paket kebijakan investasi. Meski mendapat kritikan mengenai ukuran keberhasilannya, langkah itu sangat diperlukan.

Mengapa? Karena pemerintah sudah menjanjikan untuk meluncurkan paket, kebijakan perbaikan iklim investasi. Tidak kurang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menyampaikan janji tersebut di hadapan ratusan pengusaha Jepang lengkap dengan kerangka waktunya.

Kedua, kita memang harus memulai langkah, sekurang apa pun langkah tersebut. Terlalu lama iklim investasi dibiarkan stagnan sehingga sejak krisis keuangan tahun 1998, lebih banyak modal yang keluar Indonesia daripada modal yang masuk dan ditanamkan di sini.

Tentu berbagai kritikan bisa dipakai pemacu, bukan hanya untuk memperbaiki rencana kerja, tetapi juga mengaplikasikan rencana itu. Harus diupayakan hasil yang nyata dalam beberapa bulan ke depan bahwa paket kebijakan yang diluncurkan itu memang bisa berjalan.

Ada sebuah masukan yang tentunya bisa dijadikan bahan pertimbangan, yakni ditunjuknya beberapa daerah yang bisa dijadikan percontohan bagi perbaikan iklim investasi tersebut. Bahkan, bukan hanya daerahnya, akan lebih baik lagi jika kita mampu menetapkan komoditas yang akan dikembangkan.

Masukan itu sangat masuk akal karena dua hal. Pertama, kerusakan yang kita hadapi akibat krisis keuangan demikian besarnya. Kedua, wilayah yang harus dibangun kembali, mulai dari Aceh sampai Papua, begitu luasnya, dan secara jujur harus kita katakan bahwa kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya secara serentak seluruh wilayah itu.

Dengan adanya penetapan daerah-daerah pertumbuhan, fokus pengawasan bisa menjadi lebih kecil. Bahkan, ukuran keberhasilannya pun lebih mudah bisa kita ukur. Dengan demikian, peluang bagi keberhasilan, akan semakin tinggi.

Keberhasilan pembangunan di daerah-daerah itu selanjutnya bisa dijadikan model untuk ditularkan ke daerah-daerah lain. Bahkan kita tidak perlu menunggu sampai daerah-daerah pertumbuhan itu berhasil karena daerah-daerah lain pasti akan mengikuti apabila keberhasilan mulai dirasakan.

Tentu menjadi pertanyaan, apakah penunjukan daerah daerah pertumbuhan tidak menimbulkan pertanyaan dan bahkan juga iri hati? Sepanjang hal itu dilakukan secara terbuka dan dijelaskan secara tepat pula, pasti semua orang akan memahami.

Sekali lagi dengan keterbatasan kemampuan, baik finansial maupun sumber daya manusia, kita memang harus bertahap membangun kembali negeri ini. Yang terpenting, semua itu untuk tujuan yang jelas bagaimana membangun kembali perekonomian negara dan hasilnya untuk semua warga. Terlalu lama sudah kita hidup dalam keterimpitan ekonomi yang akhirnya bisa saling menyalahkan.

T A J U K R E N C A N A

JUTAAN ORANG KELAPARAN DI AFRIKA

(Kompas/Selasa, 8 Maret 2006/Hal. 6)

Ancaman kelaparan hebat melanda Kenya dan Somalia akibat bencana kekeringan. Korban meninggal mulai berjatuhan di dua negara Afrika itu.

Program Pangan Dunia (WFP) menggambarkan, situasi di Kenya terus memburuk akibat kelaparan yang digambarkan paling buruk selama 22 tahun terakhir. Puluhan orang mulai berguguran dalam beberapa hari terakhir.

Bencana kemanusiaan benar-benar akan terjadi jika sekitar 3,5 juta orang dari 32 juta penduduk Kenya tidak segera dibantu. Jumlah orang yang mengalami kelangkaan pangan terus meningkat.

Dampak kekeringan panjang yang diperkirakan akan berlanjut sampai awal Februari 2007 memang luar biasa. Hewan ternak seperti domba, keledai, sapi, dan unta juga terancam, dan mulai mati dalam kecepatan yang mencemaskan.

Tidak kalah mengerikan keadaan di Somalia Sekitar 1,7 juta orang dari 10 juta penduduk negeri itu juga mengalami kelangkaan pangan berat dan terancam mati kelaparan.

Pemerintah Somalia sendiri tidak siap menghadapi bencana kelaparan hebat ini. Kesulitan serupa dialami Pemerintah Kenya dan beberapa negara tetangga. Bahkan, pejabat WFP menyatakan, sekitar 11 juta orang mulai mengalami kesulitan pangan di Etiopia dan Djibouti.

Kisah kekeringan dan kelaparan sering muncul dari Benua Afrika Awal tahun 1980-an, Etiopia menimbulkan keprihatinan global karena jutaan orang meninggal karena kelaparan dan penyakit.

Bencana kekeringan dan kelaparan di berbagai negara Afrika sering diperburuk oleh bahaya kekerasan, konflik sosial, perang saudara, dan wabah penyakit. Krisis ekologi juga luar biasa.

Afrika pun seolah tenggelam di bawah tumpukan berbagai persoalan itu sehingga sering dijuluki sebagai benua yang hilang, *the lost continent*. Sejauh ini para pemimpin dan masyarakat di kawasan itu belum berhasil melepaskan diri dari jebakan krisis multidimensi.

Kekacauan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan telah menghambat operasi kemanusiaan dalam menyalurkan bantuan. Sering terjadi, banyak korban berjatuhan karena bantuan datanganya terlambat.

Keadaan di Afrika dalam peta global tampak kontras, terutama dengan negara-negara maju. Negara-negara Barat tidak lagi mengalami kelangkaan, *scarcity*, tetapi justru kelimpahan, *affluent*

Perbedaan itu sekaligus menggambarkan ketimpangan per-ekonomian global. Sampai sekarang belum ada keseriusan untuk mengurangi kesenjangan itu.

T A J U K R E N C A N A
TETAP NAIK DI ATAP KERETA
(Kompas/Jumat, 10 Maret 2006/Hal. 6)

Menteri Perhubungan Hatta Rajasa termasuk menteri yang sigap. Pekan lalu ia segera "sidak" begitu terjadi kecelakaan kereta api Rangkasbitung—Jakarta.

Pukul 06.00 pagi sudah di Stasiun Tanah Abang. Agar atap kereta tidak lagi roboh dan menyebabkan kecelakaan, diimbanya penumpang jangan lagi naik di atas atap kereta api (KA).

Apa yang terjadi? Penumpang tetap naik di atas atap. Barulah turun ketika pihak KA juga ngotot. Tidak berangkat, sebelum penumpang turun. Mungkin terdesak pilihan dilematis antara kerja tepat waktu atau terlambat, turunlah penumpang dari atas atap. Apakah atap kereta sejak itu bersih dari penumpang?

Sama sekali tidak. Ternyata, sudah lebih dulu pimpinan kereta api mengajak dan memaksa penumpang jangan duduk di atap kereta. Kecuali melanggar peraturan, sekaligus membahayakan penumpang sendiri. Kecelakaan sudah berkali-kali terjadi. Pelanggar dikenai sanksi hukuman, diminta bayar denda.

Namun, tetap saja kereta api jurusan-jurusan tertentu, seperti Rangkasbitung—Jakarta, berpenumpang di atas atapnya. Mengapa tidak disiplin. Lebih jauh, mengapa nekat, padahal tahu naik atap KA berbahaya.

Mengapa begitu nekat, sampai di hadapan menteri yang menyidak dan memintanya turun bahkan menunda keberangkatan kereta, mereka tetap nekat. Menteri Perhubungan pun menemukan penjelasan dan jawabannya: tidaklah cukup hanya melarang, menegakkan disiplin, bahkan menghukum. Harus pula menambah gerbong dan frekuensi perjalanan KA di jalur padat itu.

Kita angkat kenyataan naik atap KA berikut sikap nekat para penumpangnya karena hal semacam itu kini merupakan gejala meluas. Bentuk dan manifestasinya beragam: unjuk rasa, protes, bisa hasil pilkada, bisa bupati atau walikota yang dinilai berpersoalan.

Benarkah gejala itu sekadar karena kita kini bebas dan kebebasan demokrasi itu berinteraksi dengan media yang setiap hari

juga melaporkannya. Bukankah interaksi itu juga menimbulkan efek demonstratif? Kiranya faktor-faktor itu ikut berperan.

Namun, demi kebaikan dan perbaikan kita bersama, ingin pula menunjuk hadirnya faktor-faktor lain. Jangan-jangan telah begitu sempit dan sesaknya kenyataan kebutuhan hidup layak yang mendasar. Semakin bertambahnya kemiskinan, sempitnya lapangan kerja.

Jangan-jangan juga karena sikap peduli yang tidak lagi dirasakan rakyat banyak. Dari siapa sikap peduli, empati, serta setia kawan berkehidupan bersama itu diharapkan banyak orang? Dari pemerintah dan para pejabat berikut lembaga dan birokrasinya.

Namun juga dari para pemimpin dan elite pimpinan politik serta masyarakat. Dari lembaga dan dunia usaha yang masih lebih baik kondisinya dari rakyat banyak. Demokrasi juga berperan serta bertanggung jawab membuka kepekaan sikap peduli, bahkan sikap peduli yang diwujudkan dalam karya dan perbuatan nyata.

T A J U K R E N C A N A
PEROMBAKAN RADIKAL DAN PBB IDEAL
(Kompas/Jumat, 10 Maret 2006/Hal. 6)

Berita yang kemarin kita baca adalah usulan perombakan PBB seperti disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan hari Rabu, 8 Maret, lalu.

Sekjen PBB mengusulkan perubahan besar-besaran yang hasilnya bisa merampingkan prosedur yang kaotik, membuat perekrutan dan pelatihan lebih profesional, dan bisa menyubkontrakkan layanan di luar negeri karena mahal kalau dikerjakan di New York.

Proposal Annan itu sendiri muncul pada saat badan dunia ini tengah mendapat tekanan untuk mengoreksi dan mengatasi kelemahan di bidang manajemen, seperti dicerminkan dalam skandal program minyak untuk makanan di Irak.

Duta Besar AS untuk PBB John Bolton menganggap perombakan radikal merupakan hal yang benar. Annan juga mengatakan perubahan besar merupakan hal esensial guna menanggapi perubahan yang menghadang PBB setelah berdiri selama 60 tahun.

Usulan Sekjen PBB itu jika dijalankan akan membutuhkan biaya sebesar 500 juta dollar AS. Namun, sebagian staf meragukan motif dan efektivitas perubahan yang diusulkan Annan. Usulan Annan dianggap "upaya terus-menerus pihak manajemen untuk merongrong hak dan tunjangan staf". Sebagian staf khawatir akan kehilangan pekerjaan. Yang lain khawatir langkah Annan tidak akan menghasilkan penghematan, tetapi justru sebaliknya.

Apabila AS dan negara-negara Uni Eropa mendukung proposal Annan. Negara berkembang banyak yang menentang. Di Majelis Umum yang beranggotakan 191 negara, usulan Annan diperkirakan akan mendapat ulasan kritis. Sebagian negara berkembang mencurigai usulan perubahan sebagai upaya negara besar dan Dewan Keamanan untuk mendominasi kewenangan di PBB.

PBB kita idealkan untuk bermanfaat sebesar-besarnya bagi bangsa-bangsa di dunia. Sejauh ini muncul kesan kuat, ia banyak diperalat untuk melayani kepentingan negara-negara besar. Upaya untuk merombak Dewan Keamanan agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman tampak alot dalam pelaksanaan.

Sekarang diusulkan perombakan untuk meningkatkan kinerjanya. Tetapi usulan itu mengundang kontroversi karena merosotnya saling kepercayaan antara negara besar dan negara berkembang.

Sayang juga bahwa untuk perbaikan internalnya saja badan dunia ini sudah diliputi tarik-menarik kepentingan. Bisa kita pertanyakan, bagaimana ia lalu bisa menangani urusan di luar sana, yang masih dililit oleh konflik, kemiskinan, penyakit, dan sebagainya? Yang sekarang ini tentu bukan PBB yang kita idealkan.

TINJAU ULANG IZIN GLOBAL TV
(Tempo/Senin, 6 Maret 2006/Hal. A2)

Setiap orang berhak menerima informasi. Semestinya hak menyebarkan informasi juga dimiliki oleh setiap warga negara. Prinsip ini sudah berjalan dalam penerbitan media cetak. Mereka yang berminat menyebarkan informasi melalui barang cetakan kini tidak perlu lagi meminta surat izin usaha penerbitan.

Kasus *Global TV*, yang terjadi ketika B.J. Habibie berkuasa, menjelaskan kepada kita bahwa prinsip kesetaraan hak warga negara itu belum terwujud di dunia elektronik televisi. Hak menyebarkan informasi melalui televisi masih memerlukan izin prinsip dan frekuensi dari pemerintah (yang mewakili negara).

Pada zaman Soeharto, izin diberikan hanya kepada kalangan dekat Istana. Setelah itu, izin prinsip penyiaran dan frekuensi dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan dan Departemen Penerangan. Proses seleksinya tidak banyak diketahui. Kondisi ini berlangsung sampai Departemen Penerangan dibubarkan pada Oktober 1999.

Izin untuk *Global TV* mewakili masa pemberian izin televisi secara tertutup itu-proses yang seharusnya dikoreksi. Selain itu, ada dua hal yang patut dipersoalkan sekitar *Global TV*. Yang pertama masalah peralihan kepemilikan izin dari PT Global Informasi Bermutu, yang didirikan oleh mereka yang bisa digolongkan sebagai "kelompok Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia", kepada kelompok Bimantara. Ini menyangkut soal frekuensi yang merupakan domain publik yang dikuasai negara. Izin diberikan khusus kepada pengusaha tertentu melalui berbagai pertimbangan. Dengan begitu, jual-beli izin harus dilarang karena transaksi itu "melewati" kewenangan negara untuk menguji kelayakan kelompok pembeli izin.

Yang kedua adalah soal misi yang diberikan negara kepada *Global TV* Awalnya, pada Juli 1999, pemberian frekuensi *Global TV* dilakukan bukan untuk tujuan komersial. Kelompok The International Islamic Forum for Science Technology and Human Resource Development merancang stasiun yang mengedepankan pendidikan, budaya, serta tayangan kemanusiaan.

Izin pun keluar. Namun, *Global TV* tidak mampu melakukan siaran hingga jatuh tempo izin. Ketika diambil alih oleh Grup Bimantara pada 2000, stasiun itu menyiarkan program milik stasiun MTV-program hiburan khusus untuk remaja dan orang dewasa dari luar negeri. Pelanggaran misi siaran pun terjadi-sesuatu yang dilarang: Undang-undang Penyiaran Tahun 1997. Tapi ketika itu terjadi kekosongan regulator siaran televisi. Departemen Perhubungan tidak mengurus materi siaran, sedangkan Departemen Penerangan sudah dibubarkan. -Komisi Penyiaran Indonesia, yang kini mengawasi siaran, belum lagi terbentuk.

Maka meninjau kembali izin *Global TV* adalah langkah koreksi yang perlu. Selanjutnya, setiap izin frekuensi perlu ditenderkan secara terbuka. Pemberian izin televisi secara tertutup, yang membuat sebagian stasiun nasional berada di kalangan dekat bekas presiden Soeharto, harus segera diakhiri.

EDITORIAL
PELAJARAN UNTUK ANGKATAN DARAT
(Tempo/Senin, 8 Maret 2006/Hal. A2)

Serahkan semua persoalan kepada ahlinya. Ini pelajaran penting yang harus diambil Tentara Nasional Indonesia dari kasus raibnya uang perumahan prajurit sejumlah Rp 129 miliar yang dua hari lalu terungkap di Dewan Perwakilan Rakyat. Kenyataan pahit yang diakui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Djoko Santoso di depan Komisi Pertahanan itu menunjukkan bahwa niat mulia menolong prajurit saja ternyata tak cukup. Niat itu perlu disertai keahlian yang memadai.

Tanpa keahlian yang cukup, jelas bahaya sekali mengelola uang yang tidak kecil itu. Padahal yang dikelola adalah gaji prajurit yang dikumpulkan dari bilangan gaji yang tak bisa dibilang besar. Impian prajurit untuk memiliki perumahan yang layak jelas terancam sirna. Padahal kita tahu masih banyak rumah prajurit yang tidak layak huni.

Yang pertama kali harus diperiksa adalah Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan, lembaga yang dibentuk oleh Angkatan Darat untuk mengelola dana tadi. Lembaga itu harus menjelaskan mengapa Rp 29 miliar uang yang disimpan di Bank Mandiri ternyata hanya deposito *bodong* alias tak ada lagi dananya. Perlu dikejar juga ke mana Rp 100 miliar dana yang tersisa. Investasi yang ditanamkan ke sebuah yayasan mesti diteliti, termasuk jika ada pejabat yang memberikan rekomendasi. Karena fakta yang terjadi, bukannya untung yang didapat yayasan, tapi uang malah melayang.

Selain berupaya menyelamatkan dana yang raib, kasus ini banyak memberi peringatan. Pertama, soal kontrol terhadap dana. Rasanya aneh menjumpai pengurus yayasan yang begitu mudah memindahtangankan uang sebesar itu. Pengurus yayasan bisa saja beraksi sendirian, tapi tetap perlu dipastikan tak ada atasan yang ikut terlibat. Selanjutnya, mekanisme kontrol pengeluaran dana perlu diperbaiki.

Kedua, walaupun pemotongan prajurit itu sah dilakukan, seharusnya ada transparansi pengelolaan. Mereka yang gajinya dipotong berhak tahu sudah berapa banyak uang mereka terkumpul.

Mereka berhak tahu apakah dana itu sudah digunakan untuk kepentingan mereka. Transparansi seperti inilah yang tak pernah terjadi.

Tak kalah pentingnya adalah bagaimana uang itu dikelola. TNI jelas bukan lembaga pengelola keuangan. Angkatan perang tidak dilatih untuk itu. Jika berniat menyejahterakan prajurit, lebih baik bila TNI menyerahkan pengelolaan dana itu kepada lembaga-lembaga pengelola keuangan yang profesional. Dengan menyerahkan urusan kepada ahlinya, TNI tak perlu terperosok seperti ini.

EDITORIAL
KEPALA DESA JADI PENGURUS PARTAI
(Tempo/Jumat, 10 Maret 2006/Hal. A2)

Pertumbuhan demokrasi membawa tren baru. Banyak orang memilih jalur politik agar secepatnya berkuasa. Dengan membentuk partai baru atau bergabung dengan partai yang sudah ada, orang berharap dapat terangkut gerbong kekuasaan. Orang masuk partai lantaran ingin menjadi presiden, gubernur, bupati, walikota, atau anggota parlemen. Di sisi lain, agar tetap berkuasa, bupati dan walikota masuk partai politik.

Fenomena pasca-Orde Baru ini tentu saja bagus. Orang tak lagi mencibir politik sebagai sesuatu yang penuh lumpur. Politik diartikan juga sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Betapapun demikian, setiap proses perlu dicermati. Contohnya ialah ketika ribuan kepala desa se-Jawa dan Bali berdemonstrasi di lapangan kompleks MPR/DPR dan menuntut agar mereka diperbolehkan menjadi pengurus partai politik. Tuntutan ini agaknya seiring dengan tren tadi: agar tetap berkuasa, kali ini pada tingkat desa.

Para kepala desa itu meminta lembaga legislatif merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Yang mereka tolak adalah ketentuan yang melarang kepala desa menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, serta terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.

Semangat yang diusung oleh peraturan itu sesungguhnya sudah tepat. Kepala desa ditempatkan pada posisi netral, tidak berpihak pada partai tertentu. Seharusnya, dengan tujuan yang sama, bupati, walikota, dan gubernur juga dilarang menjadi pengurus partai.

Sebagai orang yang bersentuhan langsung dengan rakyat dalam kehidupan sehari-hari, sikap netral kepala desa mutlak diperlukan. Ia harus mampu menangani persoalan politik di tingkat bawah secara arif, tidak partisan. Keterlibatan politik sebagai pengurus partai akan mengikis kearifan ini. Keseimbangan dalam masyarakat desa bisa porak-poranda lantaran tetuanya berpihak pada partai tertentu.

Niscaya belum terhapus dalam ingatan kita tatkala kepala desa menjadi perpanjangan tangan kekuasaan Orde Baru. Mereka tidak sanggup dan tidak berani menentukan pilihan sendiri. Semua dijalankan seperti titah pusat.

Lagi pula, hanya partai yang memiliki infrastruktur hingga ke desa yang siap bertarung di lapangan untuk memperebutkan kekuasaan politik di tingkat desa. Dari sejarah kita tahu partai politik mana itu.

Jelas, ini tidaklah fair. Dengan kepala desa menjadi pengurus partai, akan kembali juga pola-pola lama yang dipakai dalam mempertahankan kekuasaan. Dan itu jelas menyengsarakan masyarakat desa. Dengan menolak tuntutan para kepala desa, kita justru menyelamatkan pertumbuhan demokrasi kita secara keseluruhan.

EDITORIAL
DANA ABADI MINYAK BUMI
(Tempo/Kamis, 9 Maret 2006/Hal. A2)

Selain dari pembenahannya atas kinerja perusahaan, keberhasilan Direktur Utama Pertamina yang baru diangkat kemarin akan dinilai dari seberapa besar setorannya kepada kas negara. Selama ini, seluruh hasil penjualan minyak yang ditambang diserahkan kepada kas negara untuk membiayai pembangunan. Pola pemanfaatan minyak seperti yang terjadi sekarang sudah berlangsung sejak awal Indonesia merdeka.

Jika tak ada penemuan sumur minyak baru, dalam jangka waktu 12-13 tahun mendatang, deposit minyak kita akan habis. Lalu akankah kekayaan alam yang tak bisa diperbarui ini dihabiskan sampai tak tersisa untuk anak-cucu kita nanti? Bukankah kekayaan alam itu seharusnya menjadi semacam dana pensiun yang akan menyelamatkan Indonesia pada masa mendatang? Kita perlu mencontoh Norwegia, yang punya program *Oil Fund*. Seluruh hasil penjualan minyak ditabung dan diinvestasikan sebagai dana abadi. Pemerintah hanya memanfaatkan hasil investasi itu. Pengumpulan dana abadi model Norwegia-besarnya sudah mencapai US\$ 200 miliar, sudah juga diikuti negara tetangga kita, Timor Leste.

Apa mungkin Indonesia bisa meniru Norwegia? Bisa kalau pemerintah punya niat. Tapi jelas pelaksanaan niat itu perlu dilakukan secara bertahap. Menyetor seluruh hasil penjualan minyak saat ini sebagai dana abadi agaknya kurang realistis. Anggaran belanja kita masih sangat bergantung pada penerimaan minyak dan gas.

Di dalam anggaran belanja, sumbangan minyak dan gas masih sangat besar, yaitu hampir Rp 184 triliun. Angka ini mencapai sekitar 30 persen dari total anggaran belanja. Tentu tidak mudah menambal anggaran sebegini banyak jika pendapatan minyak dan gas dimasukkan seluruhnya sebagai dana abadi.

Pajak harus digenjut. Ini pun tidak gampang saat perekonomian hanya tumbuh 5-6 persen seperti sekarang. Namun, pemasukan pajak memang dirasa belum maksimal. Perbaikan

menyeluruh, termasuk meminimalkan korupsi pajak, menjadi syarat mutlak agar pendapatan pajak bertambah. Masalah lain adalah mengurangi konsumsi minyak. Impor minyak Indonesia, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, sudah melampaui produksi minyak dari bumi kita. Sejak 2005, ada tekor sekitar 200 ribu barel sehari. Kalau mau ada sisa untuk ditabung, konsumsi harus dikurangi. Sejalan dengan itu, diversifikasi energi dan pemakaian energi nonminyak mesti menjadi "gerakan nasional".

Memang sulit bagi pemerintah saat ini menyisihkan seluruh penjualan minyak untuk ditabung. Tapi bagaimana jika untuk setiap sumur minyak baru yang ditambang hasil penjualannya mulai diinvestasikan sebagai dana abadi? Jika kelak Blok Cepu mulai ditambang, mungkin ide dana abadi ini bisa mulai dijalankan. Kalau tak bisa seluruh hasil penjualan sumur minyak baru, mungkin separuh atau bahkan seperempat bagian bisa disisihkan untuk dana abadi itu.

Yang penting adalah kesadaran: kekayaan alam itu bukan seluruhnya milik kita yang hidup sekarang. Itu juga milik generasi yang belum lagi dilahirkan ke bumi kita.

EDITORIAL
CEGAH KORBAN KERETA API
(Tempo/Selasa, 7 Maret 2006/Hal. A2)

Dua kecelakaan kereta api pekan lalu dan empat orang yang tewas membuktikan bahwa alat transportasi massal itu sudah tak mampu mengatasi membeludaknya penumpang. Ratusan orang harus berjejal setiap hari di atap gerbong kereta api Jabotabek.

Mereka yang menyalung nyawa di atap kereta adalah bagian dari 600 ribu orang yang menggunakan jasa kereta komuter Jabotabek. PT Kereta Api Indonesia sekarang ini hanya mampu menyediakan 480 gerbong. Untuk mencapai angka yang ideal, PT Kereta Api Indonesia perlu menambah 120 gerbong lagi. Tak mudah memecahkan masalah ini.

Tidak mungkin ada penambahan gerbong tanpa ada tambahan rel. Saat ini, hanya Jakarta-Bogor yang sudah menggunakan rel ganda. Bekasi Jakarta sudah memiliki jalur rel ganda, tapi frekuensi kereta Jabotabek yang lewat masih rendah karena harus bergantian dengan kereta jarak jauh. Sementara itu, Jakarta-Serpong masih rel tunggal. Dengan kapasitas rel yang ada, frekuensi perjalanan baru mencapai 20 menit sekali.

Pemerintah; menurut Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, akan menyelesaikan proyek jalur ganda Jakarta-Serpong dan dua jalur ganda Jakarta-Bekasi pada 2007. Pada tahun itu juga disediakan 160 gerbong untuk menambah yang ada sekarang. Dengan semua tambahan itu, frekuensi perjalanan bisa ditingkatkan menjadi lima menit sekali.

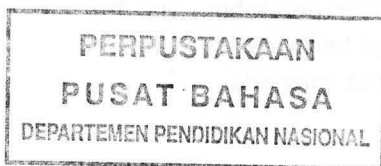
Rencana Menteri Hatta memang bagus. Namun, solusi itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya besar. Sementara kita menunggu pembangunan rel baru, bukan tidak mungkin kecelakaan serupa akan terulang. Maka disarankan PT Kereta Api Indonesia membereskan sejumlah masalah, misalnya penumpang gelap.

Data PT Kereta Api Indonesia menyebutkan ada 125 ribu penumpang gelap di kereta Jabotabek atau 20 persen dari total penumpang. Akibatnya, dihitung secara kasar saja, pemasukan PT Kereta Api yang hilang mencapai Rp 50 miliar per tahun. Hal itu terang mengurangi kemampuan PT Kereta Api berinvestasi-membeli loko atau gerbong baru-dan memelihara kereta yang ada.

Sayangnya, keberadaan penumpang gelap itu bisa terjadi karena kelakuan aparat PT Kereta Api sendiri. Kebanyakan mereka membayar dengan ongkos yang lebih rendah ke tangan kondektur. Praktek ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan hampir tak ada upaya dari manajemen PT Kereta Api untuk membereskannya. Seharusnya, soal ini bukan sesuatu yang sulit dilakukan PT Kereta Api.

Pemerintah juga harus mempercepat pembangunan rel ganda. Ini memang tanggung jawab pemerintah. Ketika Menteri Hatta mengatakan pembangunan rel ganda terlambat 10 tahun, itu hanya menegaskan bahwa pemerintah tak pernah serius membenahi angkutan umum. Padahal kereta api yang memadai bisa menjadi solusi berbagai masalah Ibu Kota, termasuk kemacetan dan polusi.

Jika jalan tol Cipularang bisa dikebut dalam setahun, tak ada alasan bagi pemerintah untuk memperlama penyelesaian pembangunan rel kereta api. Jika rakyat kecil yang hendak dibela, pemerintah perlu mencurahkan segenap kekuatan untuk memperbaiki moda angkutan kereta api.



Kepaduan wacana (*discourse*) selain didukung oleh aspek gramatikal atau kohesi gramatikal juga didukung oleh aspek leksikal atau kohesi leksikal. Dalam wacana tertentu diperlukan pengetahuan dan penguasaan kohesi yang baik. Pengetahuan dan penguasaan kohesi tidak saja bergantung pada pengetahuan kita tentang kaidah-kaidah bahasa, tetapi juga pengetahuan kita tentang realitas. Selain mempunyai bentuk dan makna dan merupakan aspek formal bahasa, kohesi tergolong juga sebagai organisasi sintaksis atau merupakan wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan. Kohesi lebih cenderung mengacu pada aspek formal bahasa. Hal itu berarti bahwa kohesi adalah hubungan antarkalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun strata leksikal tertentu. Oleh karena itu, dalam editorial surat kabar berbahasa Indonesia, alat kohesi leksikal ternyata digunakan juga untuk menghasilkan tuturan yang padu, seperti kesinoniman, keantoniman, kehiponiman, kemeroniman, keparoniman, kolokasi, dan reptisi/pengulangan.

Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun, Jakarta Timur 13220

www.pusatbahasa.diknas.go.id

ISBN 978-970-685-794-